



BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1 Pembentukan Pemerintah Daerah

Kabupaten Rokan Hulu yang terletak dalam wilayah Provinsi Riau merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Sebelumnya, Rokan Hulu merupakan salah satu wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah I Kabupaten Kampar, namun sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, pada tanggal 12 Oktober 1999 Rokan Hulu yang dikenal dengan Negeri Seribu Suluk ini secara resmi menjadi sebuah Kabupaten yang diberi nama Kabupaten Rokan Hulu dengan ibukotanya berkedudukan di Pasir Pengaraian.

Pada awal berdirinya, Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan meliputi 80 desa dan enam Kelurahan. Pada akhir tahun 2002, Kabupaten Rokan Hulu menjadi 10 (sepuluh) wilayah Kecamatan, 6 Kelurahan dan 104 desa. Dalam perkembangan selanjutnya, tahun 2003 dimekarkan 2 Kecamatan sehingga menjadi 12 kecamatan, dimana kecamatan yang baru dibentuk yaitu: Kecamatan Tandun dan Kabun. Dua kecamatan itu dibentuk setelah 3 (tiga) desa yang berasal dari Kabupaten Kampar resmi menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003, sedangkan Kecamatan Tandun yang lama berubah nama menjadi Kecamatan Ujung Batu.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2005 kembali dilakukan pemekaran beberapa kecamatan sehingga kecamatan menjadi 14 yaitu, Kecamatan Kunto Darussalam dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu, Kecamatan Bonai Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2004.

Pada Tahun 2007, Kabupaten Rokan Hulu bertambah menjadi 16 Kecamatan. Kecamatan yang dimekarkan yaitu: Kecamatan Rokan IV Koto bertambah Kecamatan Pendalian IV Koto, dan Kecamatan Kepenuhan bertambah menjadi Kecamatan Kepenuhan Hulu, sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007.

1.2 Kondisi Geografis

Dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Rokan Hulu terletak pada $100^{\circ}50' - 101^{\circ}52'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}15' - 1^{\circ}30'$ Lintang Utara, dengan ketinggian antara 10 – 164 meter dari permukaan laut. Iklim Kabupaten Rokan Hulu pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur udara maksimum rata-rata $31^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$, yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Batas wilayah Rokan Hulu disebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kecamatan Bangkinang Barat-Kabupaten Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kecamatan Bangkinang-Kabupaten Kampar. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu kurang lebih $7.449,45 \text{ km}^2$ atau $\pm 7,88\%$ dari luas wilayah Provinsi Riau ($\pm 94.561,60 \text{ Km}^2$), terdiri dari 85% daratan dan 15% rawa-rawa/perairan.



1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penataan kelembagaan sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Sebagai daerah tingkat II, Kabupaten Rokan Hulu dikepalai oleh seorang Bupati, dan semenjak berdirinya Kabupaten Rokan Hulu, sudah terjadi 5 kali pergantian masa jabatan Bupati. Dua pejabat Bupati yang dipilih sebelum terbentuknya DPRD kabupaten, Masa Bakti 2006-2011, Kabupaten Rokan Hulu di pimpin oleh Drs. H. Achmad, Msi sebagai Bupati Rokan Hulu dan H. Sukiman sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu kemudian untuk masa bakti 2011-2016, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh Drs. H. Achmad, MSi dan Ir. H. Hafith Syukri, MM sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu. Berdasarkan hasil Pemilu Serentak Tahun 2015, Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh H. Suparman sebagai Bupati Rokan Hulu dan H. Sukiman sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu untuk periode 2016 – 2021. Pada tanggal 14 Februari 2018 Wakil Bupati Rokan Hulu H. Sukiman dilantik menjadi Bupati Rokan Hulu untuk melanjutkan periode 2016-2021. Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh H. Sukiman sebagai Bupati Rokan Hulu dan H. Indra Gunawan sebagai Wakil Bupati Rokan Hulu untuk periode 2021 – 2024 hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Riau.

Sejalan dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Perangkat Pemerintah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 20 Dinas, 6 Badan, dan 16 Kecamatan.

1.3.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2016 mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan pembinaan hukum yang menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan daerah kabupaten ;
2. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah kabupaten, perangkat wilayah administratif dan atau instansi vertikal;
3. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas/pekerjaan serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
4. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan daerah kabupaten;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

5. Pengkoordinasian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
6. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan pelayanan umum dilingkungan Kabupaten Rokan Hulu;
7. Menetapkan Prosedur pedoman teknis terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Melaksanakan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
10. Mengkoordinasikan dan perumusan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintahan daerah;
11. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Badan/Lembaga masyarakat dalam upaya meningkatkan hasil pelaksanaan tugas;
12. Melaksanakan Pelayanan teknis administratif kepada Bupati Rokan Hulu;
13. Mengkoordinasikan segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu;
14. Menyenggarakan dan membina keamanan dan ketertiban dilingkungan sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
15. Melaksanakan pembinaan karir pegawai dilingkungan Kabupaten Rokan Hulu;
16. Mengadakan Kontrol terhadap aktifitas para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten;
17. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati Rokan Hulu dalam rangka pengambilan Peraturan yang menyangkut fungsi umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
18. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan;
19. Memberikan keabsahan atas berkas dan dokumen dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
20. Memberikan penilaian SKP para Asisten dan menandatangani SKP para Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
21. Memberikan petunjuk/arahan kepada bawahan dalam hal pelaksanaan tugas;
22. Mendisposisi surat-surat kepada para bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
23. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati Rokan Hulu;
24. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas tiga Staf Ahli Bupati yaitu;
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan.Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas tiga Asisten yaitu :
 - a. Asisten Tata Pemerintahan;
 - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Asisten Administrasi Umum.Setiap Asisten masing-masing membawahi bagian-bagian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- a. Asisten Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat.
- b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 - 1) Bagian Hukum;
 - 2) Bagian Umum;
 - 3) Bagian Organisasi;
 - 4) Bagian Perlengkapan dan Protokol.

Setiap Bagian masing-masing membawahi Sub Bagian yaitu :

- a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Perangkat dan Layanan Pemerintah Daerah dan Desa.
- b. Bagian Administrasi Kewilayahan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Batas;
 - 2) Sub Bagian Fasilitasi Pertanahan;
 - 3) Sub Bagian Tata Kelola dan Inovasi Pemerintah Daerah.
- c. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Peliputan Dokumentasi dan Publikasi;
 - 2) Sub Bagian Informasi, Media Cetak dan Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Data, Konsep dan Media Luar Ruang.
- d. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Program dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Pelelangan;
 - 3) Sub Bagian Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- e. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Agama;
 - 2) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
 - 3) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan.
- f. Bagian Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- g. Bagian Hukum terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Peraturan.
- h. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Tata Laksana;
 - 3) Sub Bagian Analisis Jabatan.
- i. Bagian Umum terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;



- 3) Sub Bagian Persandian dan Tata Usaha;
- j. Bagian Perlengkapan dan Protokol terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Protokol dan Acara;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga.

1.3.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor KPTS. 061/ORG/IV/2002, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan meliputi administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya Sekretariat Dewan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberi bimbingan dan pembinaan teknis administrasi dalam rangka tercapainya hasil kerja yang maksimal;
2. Memberi saran, informasi dan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan;
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang ada pada Sekretariat DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Persidangan dan Produk Hukum membawahi Sub Bagian Persidangan, Sub Bagian Risalah dan Sub Bagian Perundang -Undangan dan Pengkajian Produk Hukum;
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Dokumentasi dan Peliputan, Sub Bagian Protokol;
4. Bagian Umum membawahi Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
5. Bagian Keuangan membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Verifikasi dan Pembukuan.

1.3.3 Dinas

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas merupakan Perangkat Daerah yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggungjawab melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan seperti yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016.

Dinas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 20 (dua puluh) Dinas, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

2. Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hulu;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rokan Hulu;
6. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu;
7. Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu;
9. Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu;
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu;
14. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu;
15. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu;
18. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu;
19. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Rokan Hulu;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu.

1.3.4 Badan

Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan adalah Perangkat Daerah yang diserahkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Badan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berjumlah empat unit, seperti yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016, yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu;
2. Badan Kepegawain, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Rokan Hulu;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

1.3.5 Inspektorat

Unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu seperti yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu No.58 Tahun 2019, Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretaris;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV;



6. Inspektur Pembantu wilayah V; dan
7. Kelompok Jabatan fungsional.

1.3.6 Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan seperti yang dituang dalam Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016.

Kabupaten Rokan Hulu saat ini membawahi 16 Kecamatan, terdiri dari: Kecamatan Rambah; Kecamatan Rambah Samo; Kecamatan Rambah Hilir; Kecamatan Tandun; Kecamatan Tambusai; Kecamatan Tambusai Utara; Kecamatan Bangun Purba; Kecamatan Kepenuhan; Kecamatan Ujung Batu; Kecamatan Rokan IV Koto; Kecamatan Kunto Darussalam; Kecamatan Kabun; Kecamatan Bonai Darussalam; Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam; Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Kecamatan Pendalihan IV Koto.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Secara umum beberapa hal penting yang dijelaskan dalam ekonomi makro yaitu meliputi Pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pengangguran, dan penerapan ekonomi makro. Ekonomi makro juga membahas pendekatan analitik, yang melibatkan penggunaan metode matematika dan statistik untuk memahami dan memprediksi perilaku ekonomi. Dalam konteks bisnis, ekonomi makro membantu perusahaan dalam memahami pasar, menyesuaikan produksi, dan meminimalkan biaya produksi. Untuk sisi pemerintah, indikator ekonomi makro dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan dan evaluasi kebijakan pemerintah.

Kebijakan ekonomi menggambarkan antara tujuan utama pembangunan dengan capaian indikator yang dituju dan bagaimana antar komponen saling terkait, baik kebijakan ekonomi pusat maupun daerah. Kebijakan ekonomi daerah menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi. Adapun arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 memiliki tema *“Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Daerah, Infrastruktur yang Berimbang serta Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas melalui Pelayanan Publik yang Prima”*.

Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengacu kepada arah kebijakan Nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Provinsi Tahun 2019-2024 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan pembangunan daerah Provinsi Riau. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi serta isu strategis Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan tidak lepas dari kebutuhan akan anggaran. Maka dari itu diperlukan suatu anggaran dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Salah satu Misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu adalah mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah, dengan prioritas kedua yaitu Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan.

Pada tahun 2023 diharapkan akan terjadi pengembangan struktur perekonomian dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan ke sektor-sektor lainnya, sehingga sektor-sektor strategis ekonomi lokal lainnya bisa tumbuh.

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 dapat digambarkan dari evaluasi selama semester pertama pelaksanaan APBD. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan melalui evaluasi terhadap



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu secara umum realisasi tahun 2022 sampai dengan pertengahan tahun 2023. Evaluasi meliputi seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester I Tahun 2023 dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap realisasi keuangan dan realisasi kinerja.

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada tahun 2023 bertujuan untuk:

- (1) Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
- (2) Konsistensi antara dokumen perencanaan;
- (3) Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
- (4) Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan;
- (5) Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD; dan
- (6) Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Target indikator makro ekonomi Kabupaten Rokan Hulu yang ingin dicapai pada tahun 2023 diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang diwujudkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Selain asumsi kondisi makro ekonomi nasional, untuk mencapai target indikator makro ekonomi Kabupaten Rokan Hulu, berikut asumsi – asumsi yang digunakan sebagai prasyarat tercapainya rencana target makro Kabupaten Rokan Hulu 2023 yang kemudian dituangkan dalam Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rokan Hulu, antara lain:

- a. Pertumbuhan Ekonomi berkisar 3,29% – 4,48%;
- b. Tingkat Kemiskinan pada Kisaran 10,06%-10,14%;
- c. IPM berkisar 69,67% – 70,73%;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kisaran 2,5% – 3,5%;

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hulu mencatat jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2023 sebanyak 430,436 penduduk. Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Dari 287.231 angkatan kerja, ada sebanyak 277.332 penduduk yang bekerja, sedangkan sisanya 9.899 merupakan penduduk menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan. Penduduk usia kerja dan angkatan kerja merupakan pembentuk indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 sebesar 66,73 persen. Kemudian dari total angkatan kerja sebanyak 3,45 persen merupakan pengangguran, indikator ini dikenal dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Angka pengangguran di Kabupaten Rokan Hulu mengalami penurunan sebesar 0,17 poin dibandingkan TPT tahun 2022 yang sebesar 3,62 persen. Hal ini merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan mendorong masyarakat untuk lebih berdaya dalam berwirausaha.

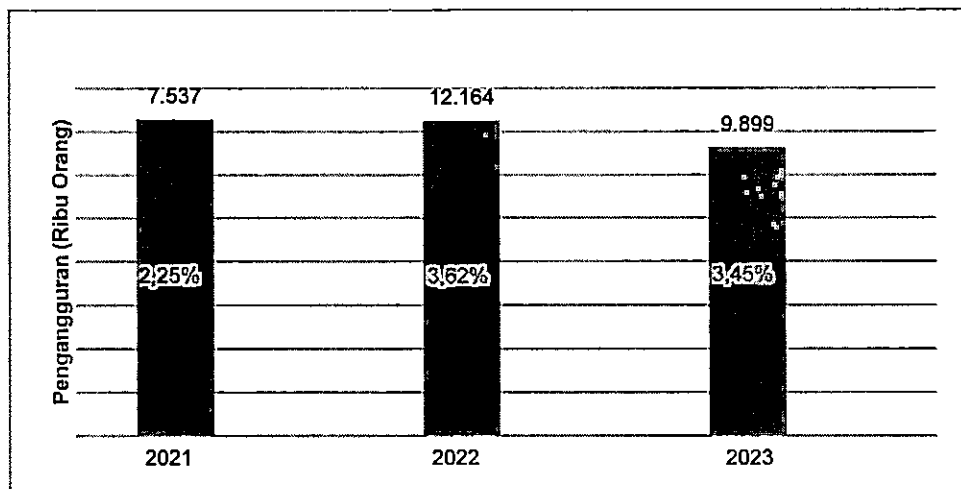
Berdasarkan status pekerjaan utama, jumlah pekerja formal di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 50,46 persen, sedangkan jumlah pekerja informal sebesar 49,54 persen. Pekerja formal mencakup penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan penduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Pekerja dengan status buruh/ karyawan/pegawai mendominasi pekerja formal sebesar 74,79 persen yaitu sebesar 104.668 jiwa.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 mencapai 3,62 persen, meningkat 1,37 persen dibanding tahun 2021 yang mencapai 2,25 persen. Tingkat pengangguran terbuka yang ada di kabupaten Rokan Hulu merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong pembukaan lapangan kerja baru serta peningkatan keterampilan dan mental kerja masyarakat yang dapat membangun mental kewirausahaan dan kemandirian masyarakat. Berdasarkan data BPS tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK mengalami penurunan menjadi 64,07 persen pada tahun 2022, dibandingkan dengan tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,50 persen. Berikut ini dapat dilihat jumlah dan tingkat pengangguran Kabupaten Rokan Hulu dalam runtun waktu (*time series*) Agustus 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023 pada grafik 2.1.

Grafik 2.1
Jumlah dan Tingkat Pengangguran
Tahun 2021 – Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Riau

Indikator selanjutnya dalam menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran perbandingan dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata – rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita riil. IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Hal ini menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, indikator target Pembangunan dalam pembahasan asumsi makro antara pemerintah dan DPR, salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan salah satu indikator penentuan Dana Insentif Daerah (DID).

Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu mencapai 71,02%, meningkat 0,71% dibandingkan tahun 2022 sebesar 70,31%. Dengan kata lain, pada tahun 2023 ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu tergolong tinggi. Rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan lemahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hulu. Lemahnya kualitas sumber daya ini terlihat pada rendahnya Angka Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hulu,



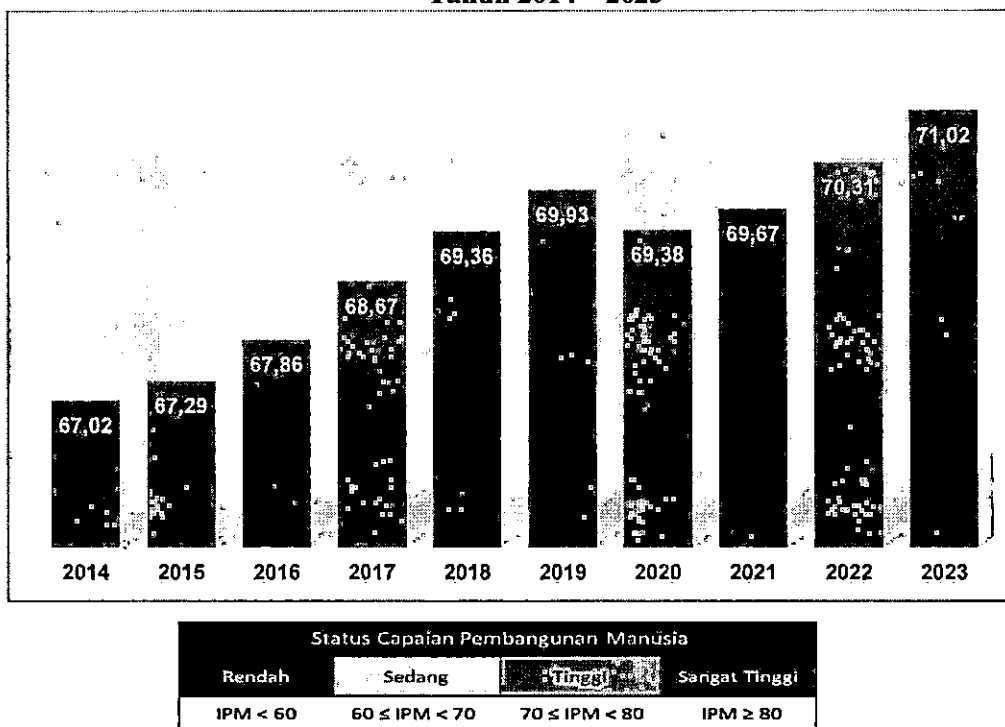
yaitu menempati urutan ke sembilan di Provinsi Riau pada tahun dengan Angka Harapan Hidup sebesar 70,51 meningkat 0,33% pada tahun 2023 sebesar 70,84%.

Sementara itu, dari sisi pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rokan Hulu sebesar 12,86% tahun 2022 juga masih berada di bawah rata-rata Kabupaten Rokan Hulu meningkat 0,02% pada tahun 2023 sebesar 12,88%.

Dan untuk taraf hidup layak, pengeluaran per kapita di Kabupaten Rokan Hulu naik 2,06% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp9.841.000,00 Pengeluaran per kapita tahun 2023 disesuaikan sebesar Rp10.055.000,00.

Pertumbuhan pada tahun 2023 telah berada di atas rata-rata pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per tahun selama 2014 – 2023. Berikut ini pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu secara runtun waktu (time series) selama 10 tahun terakhir mulai dari tahun 2014-2023 pada grafik 2.2

Grafik 2.2
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2014 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Riau

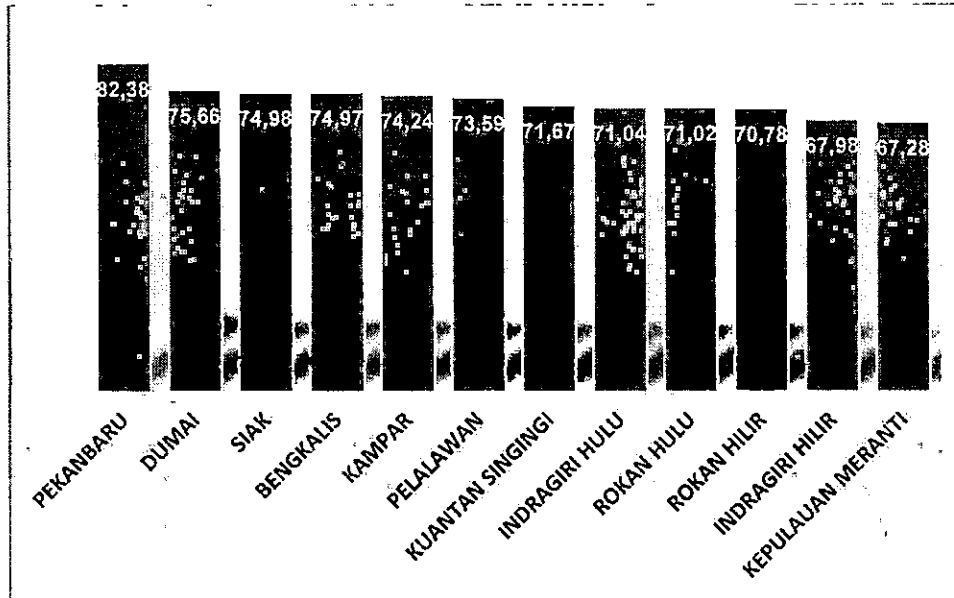
Grafik 2.2 memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,02%, artinya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu telah berada pada tingkat “TINGGI”, yaitu berada pada range “ ≤ 70 sampai dengan < 80 ”.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia sebesar 74,95%, meningkat 0,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya (74,45%). Pada tahun 2023, seluruh provinsi di Indonesia memiliki pertumbuhan IPM lebih tinggi dibandingkan periode pelaporan sebelumnya. Pada tingkat nasional, Provinsi Riau menempati peringkat 10 dari 38 Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hulu menempati peringkat 9 dari 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau



dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi pada tahun 2023. Berikut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau tahun 2023 pada grafik 2.3

Grafik 2.3
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Riau

Indikator selanjutnya dalam menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau masyarakat secara *absolute* atau *relative* untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan demi keberlangsungan hidupnya. Kemiskinan adalah masalah paling mendasar dan pelik yang masih dialami negeri ini. Masalah ini tentu nya tidak hanya terjadi di Indonesia, banyak negara yang juga berkuat dengan kemiskinan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, di antaranya minat bekerja, tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, hingga kebijakan pemerintah terkait pemerataan pembangunan.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan diukur dari sisi finansial yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dihitung dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran per kapita setiap bulan dibawah garis kemiskinan. Pada maret tahun 2023 garis kemiskinan di Provinsi Riau sebesar Rp658.611,00 per kapita per bulan. Pada tahun 2023 garis kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp647.599,00 per kapita per bulan.

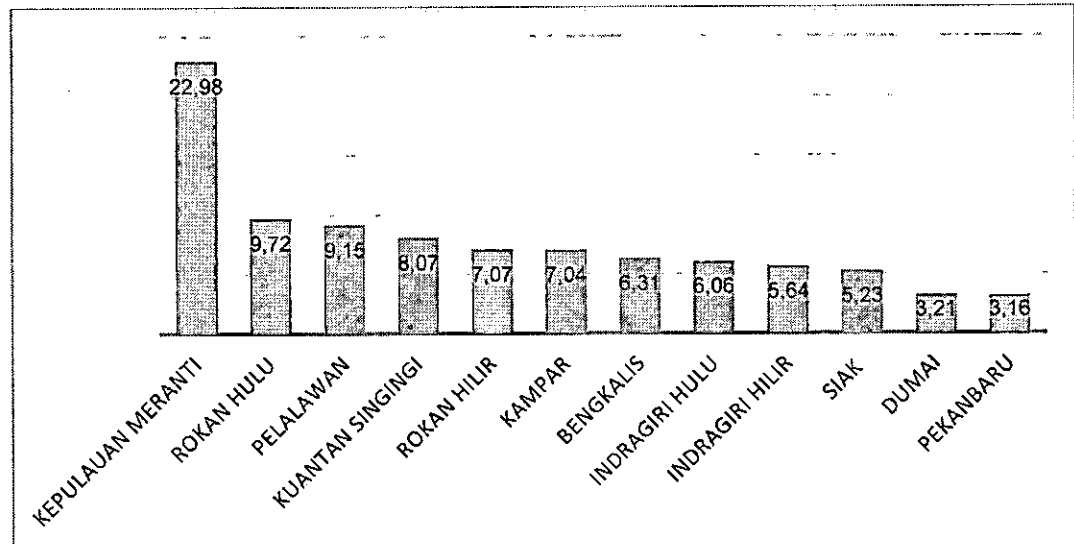
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu dari Tahun 2019 hingga 2023 cenderung berfluktuasi, tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 10,53 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 10,31 persen pada tahun 2020 dan selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 10,40 di tahun 2021, pada tahun 2022, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 9,95 persen, terakhir pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 9,72 persen. Untuk itulah Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk dengan melaksanakan berbagai program



pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan sosial.

Berikut ini rincian tingkat Persentase kemiskinan di Provinsi Riau sampai dengan Maret tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik 2.4.

Grafik 2.4
Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Riau

Selanjutnya, indikator terakhir dalam menilai/mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu Rasio Gini (*Gini Ratio*). Pengukuran tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana dan paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah dengan menghitung koefisien Gini. Rasio Gini (*Gini Ratio*) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Pengukuran didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jadi Rasio Gini (*Gini Ratio*) akan mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat pada suatu wilayah. Pengukuran didasarkan dengan nilai berkisar antara 0 (sangat merata) hingga 1 (sangat timpang). Dengan klasifikasi antara lain:

- Gini Rasio $< 0,3$: Ketimpangan rendah
- Gini Rasio $0,3 - 0,49$: Ketimpangan sedang
- Gini Rasio $> 0,5$: Ketimpangan tinggi

Koefisien gini yang rendah menunjukkan bahwa distribusi pendapatan atau kekayaan yang sama atau merata, sedangkan koefisien gini yang tinggi menunjukkan ketidakmerataan distribusi pendapatan atau kekayaan. "0" mendeskripsikan kesetaraan sempurna, dimana setiap orang memiliki pendapatan yang sama persis. Sedangkan "1" mendeskripsikan ketidaksetaraan sempurna, dimana satu orang memiliki semua pendapatan, sementara orang lain memiliki pendapatan nol.

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk, akan tetapi pemerataan

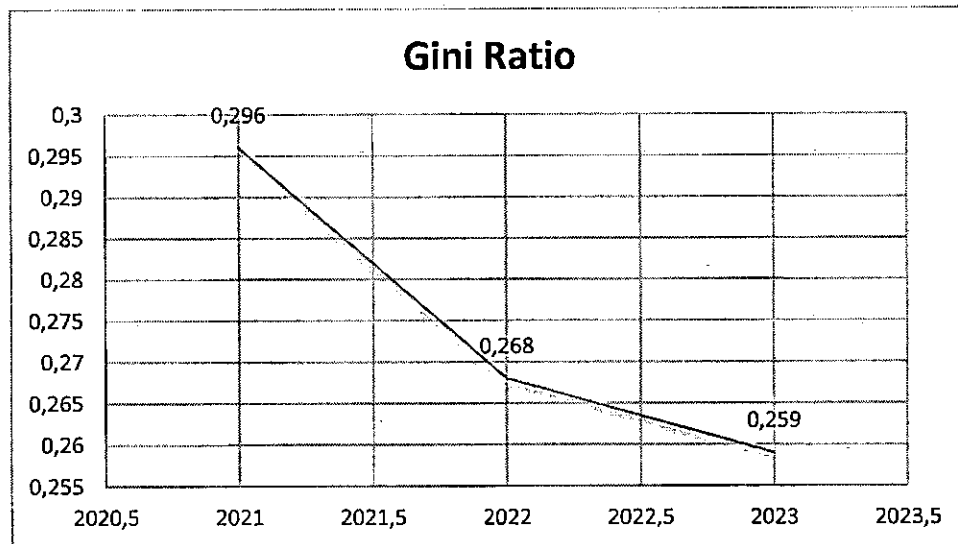


PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Pada Maret tahun 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang diukur oleh Rasio Gini adalah sebesar 0,259. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Rasio Gini Maret tahun 2022 yang sebesar 0,268. Adapun Rasio Gini Kabupaten Rokan Hulu dalam tiga tahun terakhir disajikan pada Grafik 2.5 sebagai berikut:

Grafik 2.5

Rasio Gini Kabupaten Rokan Hulu dalam 3 tahun terakhir



Hal penting lainnya yang perlu dijelaskan adalah *Mandatory Spending* di dalam pemerintahan. *Mandatory spending* adalah pengeluaran pemerintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan harus dilakukan setiap tahun. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Dan anggaran kesehatan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Dalam APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah mengalokasikan dan memenuhi anggaran *mandatory spending*. Alokasi anggaran untuk *mandatory spending* tersebut di antaranya fungsi pendidikan sebesar Rp601.964.011.855,00 atau 31,26% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 20%. Kemudian fungsi kesehatan di alokasi kan sebesar Rp229.326.582.971,00 atau 14,31% dari kewajiban yang harus di alokasikan sebesar 10%.

Pengukuran kinerja ekonomi daerah juga dapat dilihat dari nilai PDRB Per kapita. Besaran PDRB Per kapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Per kapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Per kapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktivitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Per kapita



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun, PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 Sektor yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri Pengolahan (4) Pengadaan Listrik dan Gas (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (6) Konstruksi (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (8) Transportasi dan Pergudangan (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10) Informasi dan Komunikasi (11) Jasa Keuangan dan Asuransi (12) Real Estate (13) Jasa Perusahaan (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (15) Jasa Pendidikan (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan (17) Jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting kemajuan perekonomian suatu daerah. Oleh karena itu, PDRB sering kali di jaga agar tetap tumbuh oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan ekonomi. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Rokan Hulu sebesar 49.614,31 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan 28.093,638 Milyar Rupiah untuk Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 5,02 % dibanding tahun 2021. Dilihat dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada sektor jasa transportasi dan pergudangan sebesar 16,05 persen.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu menurut lapangan usaha didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, di antaranya : (1) pertanian, kehutanan, dan perikanan (2) industri pengolahan (3) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor (4) pertambangan dan penggalian dan (5) konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu.

Pembentuk PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 54,70 persen (angka ini meningkat dari 51,12 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 26,15 persen (naik dari 25,20 persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 5,05 persen (turun dari 5,88 persen di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,88 persen (turun dari 6,20 persen di tahun 2018) dan lapangan usaha konstruksi sebesar 3,20 persen, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 s.d 2022**
Kabupaten Rokan Hulu

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	51,12	51,16	54,22	55,66	54,7



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
2	Pertambangan dan penggalian	6,2	5,78	4,28	4,38	4,88
3	Industri pengolahan	25,20	25,08	25,25	25,06	26,15
4	Pengadaan listrik dan gas	0,09	0,10	0,10	0,09	0,08
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
6	Konstruksi	3,78	3,89	3,55	3,28	3,20
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	5,88	6,25	5,35	5,06	5,05
8	Transportasi dan pergudangan	0,58	0,60	0,55	0,49	0,52
9	Penyediaan akomodasi dan makanan	0,35	0,35	0,27	0,27	0,26
10	Informasi dan komunikasi	0,92	0,97	0,99	0,9	0,82
11	Jasa keuangan dan asuransi	1	0,97	0,94	0,87	0,83
12	Real estate	0,69	0,69	0,66	0,59	0,53
13	Jasa perusahaan	0,01	0,01	0,00	0	0
14	Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,98	2,88	2,70	2,37	2,03
15	Jasa pendidikan	0,46	0,47	0,46	0,41	0,36
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,20	0,22	0,23	0,22	0,2
17	Jasa lainnya	0,55	0,58	0,44	0,40	0,38
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018- 2022

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, industri pengolahan peranannya sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 3 persen. Kondisi ekonomi suatu negara tidak dapat terlepas dari pengaruh inflasi, terutama negara berkembang (termasuk Indonesia). Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus, berkaitan erat dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ke tidak lancar distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Sehingga inflasi merupakan proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah dalam mengatur perekonomiannya dapat terlihat dari kemampuan pemerintah dalam mengendalikan kenaikan harga barang dan jasa di wilayahnya. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan kenaikan harga yang berlangsung secara terus menerus dan saling pengaruh mempengaruhi. Laju inflasi di Kabupaten Rokan Hulu belum di hitung oleh Badan Pusat Statistik, maka untuk melihat Laju Inflasi di Kabupaten Rokan Hulu metode yang di gunakan melihat kabupaten/ kota yang struktur PDRB nya mirip dengan Kabupaten Rokan Hulu (*sister city*), untuk di Provinsi Riau struktur PDRB nya yang mendekati Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Dumai.

Sejalan dengan indikator – indikator yang telah dijelaskan di atas, APBD tahun 2023 mampu menjabarkan prioritas – prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dan mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan – permasalahan dan tantangan yang dihadapi. prioritas pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 meliputi:

- (1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan;
- (2) Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata;
- (3) Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- (4) Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Aman dan Tenteram berlandaskan Adat dan Budaya serta Agama yang berbeda;
- (5) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik serta menjamin Kehidupan Politik dan Penegakan Hukum.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 juga selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Rokan Hulu

Tahun 2023

NO	NASIONAL	ROKAN HULU
1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata
2	Peningkatan Kualitas SDM : Kesehatan & Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan
3	Penanggulangan Pengangguran	
4	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	
5	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan	
6	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon terhadap Perubahan Iklim)	
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar antara lain : Air Bersih dan Sanitasi	Pemenuhan Infrastruktur Dasar Pedesaan dan Peningkatan kualitas Infrastruktur Perkotaan sesuai Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
8	Pembangunan IKN	

Sumber : Perubahan RKPD Tahun 2023

2.2 Kebijakan Keuangan

Implementasi kebijakan ekonomi yang ditetapkan membutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah mewujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD TA.2023 tanggal 22 Desember 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA. 2023.

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan Perubahan APBD sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan beberapa perubahan / pergeseran terkait penyusunan APBD tahun 2023, yaitu:

1. Peraturan atas Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA. 2023;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

2. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023;
3. Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA. 2023.
4. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023

Target pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.882.239.308.693,00 dan Anggaran Belanja sebesar Rp1.845.289.413.043,26. Lebih rinci Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun Anggaran 2023 menetapkan kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.882.239.308.693,00 dengan rincian pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4

Target Pendapatan pada APBD TA 2023

Uraian	APBD (Rp)	Pergeseran APBD (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Asli Daerah	135.432.111.868,00	157.176.389.988,00	21.744.278.120,00	16,06
Pendapatan Transfer	1.539.199.938.000,00	1.724.931.194.042,00	185.731.256.042,00	12,07
Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	131.724.663,00	131.724.663,00	100
Jumlah	1.674.632.049.868,00	1.882.239.308.693,00	207.607.258.825,00	12,40

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendongkrak pendapatan daerah di Kabupaten Rokan Hulu antara lain sebagai berikut:

- 1) Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
- 2) Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah, dengan cara



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah, melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu dan memperluas potensi basis pajak;
- 3) Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah;
 - 4) Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2023;
 - 5) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang di milik;
 - 6) Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil dana perimbangan;
 - 7) Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerja sama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
 - 8) Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
 - 9) Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan di fokus kan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - 10) Melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah tentang retribusi daerah sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi komponen utama pendapatan daerah. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat terutama untuk DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumnya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya.

Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastian nya masih rendah. Kondisi ini terjadi, mungkin di sebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Secara umum Kebijakan Belanja Daerah adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar belanja daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah,



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri. Dengan kata lain, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pada tahun 2023, belanja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ditargetkan sebesar Rp1.925.679.380.635,00 untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dengan rincian pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Perbandingan Belanja pada APBD dan perubahan TA.2023

Uraian	APBD (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Belanja Operasi	1.185.637.313.245,00	1.285.098.923.522,00	99.461.610.277,00	8,39
Belanja Modal	237.620.318.507,00	374.806.820.303,00	137.186.501.796,00	57,73
Belanja Tidak Terduga	20.919.246.129,00	9.335.520.000,00	(11.583.726.129,00)	(55,37)
Belanja Transfer	241.010.171.987,00	256.438.116.810,00	15.427.944.823,00	6,40
Jumlah	1.685.187.049.868,00	1.925.679.380.635,00	240.492.330.767,00	14,27

Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan Provinsi Riau. Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

- 1) Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja operasi, modal, tidak terduga maupun belanja transfer dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah;
- 2) Penyesuaian belanja *mandatory* Bagi Hasil Desa dan Alokasi Dana Desa;
- 3) Penyesuaian Belanja BLUD pada RSUD dan puskesmas;
- 4) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- 5) Penyesuaian Belanja DID dan DAU;
 - 6) Menampung anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyesuaian petunjuk teknis DAK dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi;
 - 7) Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 8) Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SiLPA yang bersifat terikat, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK non fisik dengan memperhitungkan sisa dana tahun 2023;
 - 9) Merencanakan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2023;
 - 10) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional;
 - 11) Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan stunting, pengentasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi *covid-19*;
 - 12) Mengalokasikan belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, dengan maksud untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun kebijakan pemerintah terkait dengan pembiayaan terdiri dari:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan pembiayaan yaitu pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bersumber dari penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Tahun 2022 yaitu sebesar Rp44.440.071.941,81.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran,antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

2.3 Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 dapat terlihat pada indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan membandingkan antara pergeseran APBD terakhir dengan Realisasi APBD sampai dengan 31 Desember 2023. Lebih rinci terkait pencapaian target kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

2.3.1. Pencapaian Target Kinerja Pendapatan

Peningkatan target kinerja di bidang pendapatan dibagi menurut jenis yang diperoleh dari 15 OPD penghasil pendapatan yang mempunyai target pendapatan yang telah di konsolidasikan, dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.845.813.897.701,22 atau 98,06% dari target pendapatan sebesar Rp1.882.239.308.693,00 dengan rincian pada 2.6

Tabel 2.6

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	
			(Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	157.176.389.988,00	148.540.528.998,22	8.635.860.989,78	94,51%
Pendapatan Transfer	1.724.931.194.042,00	1.697.148.794.040,00	27.782.400.002,00	98,39%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	131.724.663,00	124.574.663,00	7.150.000,00	94,57%
Jumlah	1.882.239.308.693	1.845.813.897.701,22	36.425.410.991,78	98,06%

Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp148.540.528.998,22 atau 94,51% dari anggaran sebesar Rp157.176.389.988,00 dengan rincian Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari:

(1) Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.829.112.388,92 atau 95,25% dari anggaran sebesar Rp71.213.298.828,00 dengan rincian pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	
			(Rp)	(%)
Pajak Hotel	862.560.000,00	742.857.383,00	119.702.617,00	86,12%
Pajak Restoran	5.000.000.000,00	3.831.552.094,92	1.168.447.905,08	76,63%



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Pajak Hiburan	264.000.000,00	137.306.400,00	126.693.600,00	53,01%
Pajak Air Reklame	1.605.290.558,00	1.702.689.130,00	(97.398.572,00)	106,07%
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	17.488.000.000,00	20.374.263.447,00	(2.886.263.447,00)	116,50%
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.000.000.000,00	3.860.292.749,00	(860.292.749,00)	128,68%
Pajak Parkir	575.000.000,00	650.480.154,00	(75.480.154,00)	113,13%
Pajak Air Tanah	250.000.000,00	188.440.810,00	61.559.190,00	75,38%
Pajak Sarang Burung Walet	384.000.000,00	85.410.500,00	298.589.500,00	22,24%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	1.007.187.551,00	1.492.812.449,00	40,29%
PBBP2	16.284.448.270,00	11.801.751.523,00	4.482.696.747,00	72,47%
Pajak BPHTB-Pemindahan Hak	23.000.000.000,00	3.880.780.025,00	19.119.219.975,00	16,87%
BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	19.566.100.622,00	(19.566.100.622,00)	0,00%
Jumlah	71.213.298.828,00	67.829.112.388,92	3.384.186.439,08	95,25%

(2) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.533.083.042,00 atau 68,55% dari anggaran sebesar Rp12.447.813.040,00 dengan rincian pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Realisasi Retribusi Tahun Anggaran 2023

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Retribusi Jasa Umum	3.435.722.000,00	3.127.379.000,00	308.343.000,00	91,03%
Retribusi Jasa Usaha	7.212.091.040,00	4.185.548.000,00	3.026.543.040,00	58,04%
Retribusi Perizinan Tertentu	1.800.000.000,00	1.220.156.042,00	579.843.958,00	67,79%
Jumlah	12.447.813.040,00	8.533.083.042,00	3.914.729.998,00	68,55%

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.398.005.508,00 atau 104,26% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.300.000.000,00 dapat dirincikan pada Tabel 2.9.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.9

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.300.000.000,00	2.398.005.508,00	(98.005.508,00)	104,26%
Jumlah	2.300.000.000,00	2.398.005.508,00	(98.005.508,00)	104,26%

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp69.780.328.059,30 atau 97,99% dari anggaran sebesar Rp71.215.278.120,00 dengan rincian pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	3.600.000.000,00	24.044.925,00	3.575.955.075,00	0,67%
Jasa Giro	3.300.000.000,00	2.126.426.468,83	1.173.573.531,17	64,44%
Pendapatan Bunga	3.651.000.000,00	281.849.316,00	3.369.150.684,00	7,72%
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.484.853.468,00	5.632.908.306,93	-3.148.054.838,93	226,69%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.001.223,00	56.216.875,00	-53.215.652,00	1.873,13%
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.007.500,00	31.896.500,00	-21.889.000,00	318,73%
Pendapatan dari Pengembalian	169.210.718,00	223.051.239,00	-53.840.521,00	131,82%
Pendapatan BLUD	57.984.555.211,00	61.347.584.428,54	-3.363.029.217,54	105,80%
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	12.650.000,00	56.350.000,00	-43.700.000,00	489,25%
Jumlah	71.215.278.120,00	69.780.328.059,30	1.434.950.060,70	97,99%

Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.697.148.794.040,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

atau 98,39% dari anggaran sebesar Rp1.724.931.194.042,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.332.681.526.410,00 atau 96,92% dari anggaran sebesar Rp1.382.952.863.374,00 dengan rincian sebagai berikut:

(a) Dana Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp365.763.246.229,00 atau 91,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp401.663.246.229,00 dengan rincian pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	100.226.158.005,00	86.226.158.005,00	14.000.000.000,00	86,03%
Bagi Hasil PPh Pasal 21	14.351.077.511,00	13.351.077.511,00	1.000.000.000,00	93,03%
Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	594.999.058,00	594.999.058,00	0,00	100,00%
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.285,00	32.285,00	0,00	100,00%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	227.935.983.446,00	209.035.983.446,00	18.900.000.000,00	66,47%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	9.329.935.711,00	9.329.935.711,00	0,00	100,00%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	37.570.997,00	48.709.997,00	-11.139.000,00	100,00%
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4.551.963.718,00	4.540.824.718,00	11.139.000,00	100,00%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	43.163.831.287,00	41.163.831.287,00	2.000.000.000,00	74,15%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	0,00	0,00	0,00	0,00%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.471.694.211,00	1.471.694.211,00	0,00	100,00%
Jumlah	401.663.246.229,00	365.763.246.229,00	35.900.000.000,00	91,06%



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp678.915.439.397,00 atau 99,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp679.644.550.000,00, dengan rincian pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Dana Alokasi Umum (DAU)	679.644.550.000,00	678.915.439.397,00	729.110.603,00	99,89%
Jumlah	679.644.550.000,00	678.915.439.397,00	729.110.603,00	99,89%

(c) Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp58.208.064.851,00 atau 96,75% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp60.160.710.845,00, dengan rincian pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	551.602.000,00	550.788.100,00	813.900,00	99,85%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.557.615.000,00	14.074.043.449,00	483.571.551,00	96,68%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMP	4.542.679.000,00	4.220.397.419,00	322.281.581,00	92,91%
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	11.606.568.559,00	11.128.281.539,00	478.287.020,00	95,88%
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	352.734.000,00	252.494.000,00	100.240.000,00	71,58%
DAK Fisik-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	19.397.301.000,00	19.395.194.951,00	2.106.049,00	99,99%
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	111.030.400,00	93.586.000,00	17.444.400,00	84,29%
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	9.041.180.886,00	8.493.279.393,00	547.901.493,00	93,94%
Jumlah	60.160.710.845,00	58.208.064.851,00	1.952.645.994,00	96,75%

(d) Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp229.794.775.933,00 atau 95,16% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp241.484.356.300,00, dengan rincian pada Tabel 2.14.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.14
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	92.881.240.000,00	92.375.165.634,00	506.074.366,00	99,46%
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.030.000.000,00	2.030.000.000,00	0,00	100,00%
DAK Non Fisik-TPG PNSD	93.847.132.000,00	91.033.351.660,00	2.813.780.340,00	97,00%
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.617.000.000,00	1.260.335.132,00	356.664.868,00	77,94%
DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.631.868.000,00	3.631.868.000,00	0,00	100,00%
DAK Non Fisik-BOP PAUD	8.196.600.000,00	8.078.435.358,00	118.164.642,00	98,56%
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.021.200.000,00	2.020.912.501,00	287.499,00	99,99%
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	29.298.626.300,00	23.462.796.134,00	5.835.830.166,00	80,08%
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.625.320.000,00	3.867.856.614,00	1.757.463.386,00	68,76%
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	386.000.000,00	297.312.500,00	88.687.500,00	77,02%
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	278.418.000,00	160.382.000,00	63,45%
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.103.800.000,00	1.051.554.400,00	52.245.600,00	95,27%
DAK Non Fisik-PK2UMK	406.770.000,00	406.770.000,00	0,00	100%
Jumlah	241.484.356.300,00	229.794.775.933,00	11.689.580.367,00	95,16%

(2) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Penyesuaian

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp153.364.327.500,00 atau 101,98% dari anggaran sebesar Rp150.383.976.000,00 dengan rincian pada Tabel 2.15:

Tabel 2.15
Realisasi Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Dana Penyesuaian	150.383.976.000,00	153.364.327.500,00	-2.980.351.500,00	101,98
Dana Insentif Daerah (DID)	10.513.250.000,00	13.493.601.500,00	-2.980.351.500,00	101,98
Dana Desa	139.870.726.000,00	139.870.726.000,00	0,00	100,00
Jumlah	150.383.976.000,00	153.364.327.500,00	-2.980.351.500,00	101,98

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp211.102.940.130,00 atau 110,18% dari anggaran sebesar Rp191.594.354.668,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

(a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp155.121.779.862,00 atau 114,97% dari anggaran sebesar Rp134.918.205.000,00 dengan rincian pada Tabel 2.15:

Tabel 2.15

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.918.205.000,00	155.121.779.862,00	(20.203.574.862,00)	114,97
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	31.425.045.610,00	35.630.907.637,00	(4.205.862.027,00)	113,38
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	34.131.239.070,00	26.154.485.085,00	7.976.753.985,00	76,63
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	41.468.651.650,00	66.280.442.135,00	(24.811.790.485,00)	159,83
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.113.365.043,00	1.413.296.802,00	(299.931.759,00)	126,94
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	26.779.903.627,00	25.642.648.203,00	1.137.255.424,00	95,75
Jumlah	134.918.205.000,00	155.121.779.862,00	(20.203.574.862,00)	114,97

(b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp55.981.160.268,00 atau 98,77% dari anggaran sebesar Rp56.676.149.668,00 dengan rincian pada Tabel 2.16:

Tabel 2.16

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Bantuan Keuangan	56.676.149.668,00	55.981.160.268,00	694.989.400,00	98,77
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	56.676.149.668,00	55.981.160.268,00	694.989.400,00	98,77
Jumlah	56.676.149.668,00	55.981.160.268,00	694.989.400,00	98,77

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp124.574.663,00 atau 94,57% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp131.724.663,00. dengan rincian pada Tabel 2.17.



Tabel 2.17

**Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2023**

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	131.724.663,00	124.574.663,00	7.150.000,00	94,57
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	131.724.663,00	124.574.663,00	7.150.000,00	94,57
Jumlah	131.724.663,00	124.574.663,00	7.150.000,00	94,57

2.3.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Belanja

Indikator pencapaian target kinerja belanja yang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan Pemerintah kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Operasi	1.285.098.923.522,00	1.194.920.933.139,95	90.177.990.382,05	92,30%
Belanja Modal	374.806.820.303,00	356.642.073.590,00	18.164.746.713,00	95,15%
Belanja Tidak Terduga	9.335.520.000,00	9.153.526.845,00	181.993.155,00	98,05%
Belanja Transfer	256.438.116.810,00	255.207.270.537,00	1.230.846.273,00	99,52%
Jumlah	1.925.679.380.635,00	1.815.923.804.111,95	109.755.576.523,05	94,30%

Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.786.737.031.500,00 atau 96,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.972.851.645.524,00 dengan rincian pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Pegawai	673.793.662.760,00	603.842.271.673,00	69.951.391.087,00	89,62%
Belanja Barang dan Jasa	539.077.413.802,00	532.662.237.285,95	6.415.176.516,05	98,81%
Belanja Bunga	0,00	0	0,00	-
Belanja Subsidi	0,00	0	0,00	-
Belanja Hibah	71.162.846.960,00	57.407.324.181,00	13.755.522.779,00	80,67%
Belanja Bantuan Sosial	1.065.000.000,00	1.009.100.000,00	55.900.000,00	94,75%
Jumlah	1.285.098.923.522,00	1.194.920.933.139,95	90.177.990.382,05	92,98%



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp356.642.073.590,00 atau 95,15% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp374.806.820.303,00, dengan rincian pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.239.868.857,00	50.670.206.258,00	10.569.662.599,00	82,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.316.975.890,00	64.342.140.106,00	1.974.835.784,00	97,02
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	237.391.301.733,00	235.512.051.262,00	1.879.250.471,00	99,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.778.673.823,00	6.038.713.964,00	3.739.959.859,00	61,75
Belanja Modal Aset Lainnya	80.000.000,00	78.962.000,00	1.038.000,00	98,70
Jumlah	374.806.820.303,00	356.642.073.590,00	18.164.746.713,00	95,15

Realisasi Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.153.526.845,00 atau 98,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp9.335.520.000,00 dengan rincian pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Tidak Terduga	9.335.520.000,00	9.153.526.845,00	181.993.155,00	98,05
Jumlah	9.335.520.000,00	9.153.526.845,00	181.993.155,00	98,05

Realisasi Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp255.207.270.537,00 atau 99,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp256.438.116.810,00 dengan rincian pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
BELANJA TRANSFER – BELANJA BAGI HASIL	8.436.611.187,00	7.205.792.096,00	1.230.819.091,00	85,41



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD	Realisasi	Sisa Anggaran	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.436.611.187,00	7.205.792.096,00	1.230.819.091,00	85,41
BELANJA TRANSFER-BANTUAN KEUANGAN	248.001.505.623,00	248.001.478.441,00	27.182,00	100
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	248.001.505.623,00	248.001.478.441,00	27.182,00	100
Jumlah	256.438.116.810,00	255.207.270.537,00	1.230.846.273,00	99,52



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagaimana di atur dalam Lampiran II Pertautan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1) Ikhtisar Realisasi Pendapatan

Berikut di sajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023.

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	157.176.389.988,00	148.540.528.998,22	108.322.526.723,15
Pendapatan Transfer	1.724.931.194.042,00	1.697.148.794.040,00	1.376.524.490.105,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	131.724.663,00	124.574.663,00	92.490.092.646,00
Jumlah	1.882.239.308.693,00	1.845.813.897.701,22	1.577.337.109.474,15

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam perhitungan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp1.882.239.308.693,00 Sedangkan realisasi pendapatan tersebut adalah sebesar Rp1.845.813.897.701,22 atau 98,06%, terjadi peningkatan realisasi Pendapatan sebesar Rp268.476.788.227,07 atau (17,02%) dibandingkan Tahun 2022 realisasi sebesar Rp1.577.337.109.474,15.

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD secara keseluruhan sebesar Rp148.540.528.998,22 atau 94,51% dari target sebesar Rp157.176.389.988,00. Terdiri dari Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp67.829.112.388,92 atau 95,25% dari target sebesar Rp71.213.298.828,00. Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp8.533.083.042,00 atau 68,55% dari target sebesar Rp12.447.813.040,00, Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.398.005.508,00 atau 104,26% dari target sebesar Rp2.300.000.000,00, dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp69.780.328.059,30 atau 97,99% dari target sebesar Rp71.215.278.120,00.

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.697.148.794.040,00 atau 98,39% dari target sebesar Rp1.724.931.194.042,00 yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.486.045.853.910,00 atau 96,92% dari target sebesar Rp1.533.336.839.374,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp211.102.940.130,00 atau 110,18% dari target Rp191.594.354.668,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp1.332.681.526.410,00 atau 96,36% dari target sebesar Rp1.382.952.863.374,00. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5.256.625.000,00 atau 50,00% dari target Rp10.513.250.000,00, Dana Desa sebesar Rp139.870.726.000,00 atau 100% dari target Rp139.870.726.000,00, serta Insentif Fiskal sebesar Rp8.236.976.500,00 atau 0,00% dari target Rp0,00 Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp155.121.779.862,00 atau 114,97% dari target



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

sebesar Rp134.918.205.000,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp55.981.160.268,00 atau 98,77% dari target Rp56.676.149.668,00.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp124.574.663,00 atau 94,57% dari target Rp131.724.663,00.

2) Ikhtisar Realisasi Belanja

Berikut disajikan realisasi dan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 yang tercatat anggaran sebesar Rp1.925.679.380.635,00 dengan Realisasi belanja sebesar Rp1.815.923.804.111,95 atau sebesar 94,30%.

Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Operasi	1.285.098.923.522	1.194.920.933.139,95	1.108.917.595.074,14
Belanja Modal	374.806.820.303	356.642.073.590,00	244.048.047.090,57
Belanja Tak Terduga	9.335.520.000	9.153.526.845,00	26.553.965.877
Belanja Transfer	256.438.116.810	255.207.270.537,00	237.000.639.863,00
Jumlah	1.925.679.380.635	1.815.923.804.111,95	1.616.520.247.904,71

3.2 Pencapaian Belanja Menurut Urusan Pemerintah dan SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pada tahun sebelumnya serta tantangan yang akan dihadapi pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menetapkan prioritas pembangunan menjadi beberapa urusan yang terdiri dari Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, urusan pilihan, Unsur pendukung urusan pemerintah, Unsur penunjang urusan pemerintah, Unsur pengawasan urusan pemerintah, Unsur Kewilayahan dan Unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut adalah sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Dalam rangka pelaksanaan urusan Pendidikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara implementatif dilaksanakan oleh Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi anggaran urusan Pendidikan sebesar Rp591.358.761.260,00 dengan arah kebijakan anggaran yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Pengelolaan Pendidik.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan ditangani oleh Dinas Kesehatan. Kebijakan anggaran untuk bidang kesehatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan antara lain pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, sebesar Rp229.326.582.791,00.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kebijakan Anggaran untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumberdaya Air, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dan Program Penataan Bangunan Gedung. Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang ini ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan pagu Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang sebesar Rp223.977.532.462,00 .

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebijakan anggaran untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Pemukiman, Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan total pagu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp108.316.699.185,00.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Kebijakan anggaran untuk Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan Program Penanggulangan Bencana, dengan total pagu urusan sebesar Rp24.532.668.976,00.

6. Urusan Sosial

Kebijakan anggaran untuk Urusan Sosial dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, dengan total pagu Urusan Sosial sebesar Rp12.744.669.354,00.

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Bidang Tenaga Kerja

Kebijakan anggaran untuk Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial, dengan total pagu urusan Tenaga Kerja sebesar Rp646.555.900,00.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Anak, dan seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dan Program Perlindungan Khusus Anak, dengan total pagu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp1.816.495.900,00.

3. Urusan Pangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan dengan total pagu Urusan Pangan sebesar Rp6.295.885.436,00.

4. Urusan Pertanahan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Sekretariat Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan total pagu urusan sebesar Rp239.368.500,00.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Kebijakan anggaran untuk Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan dengan total pagu urusan sebesar Rp13.719.329.397,00.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan anggaran untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Pendaftaran Penduduk, dengan total pagu urusan sebesar Rp10.343.590.628,00.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Administrasi Pemerintah Desa, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan total pagu Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp6.772.354.633,00.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB),



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan total pagu urusan sebesar Rp11.948.359.032,00.

9. Urusan Perhubungan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan total pagu urusan sebesar Rp16.310.328.816,00.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebijakan anggaran untuk Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan total pagu urusan sebesar Rp14.646.632.642,00.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan anggaran untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Makro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM, dengan total pagu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp5.336.747.079,00.

12. Urusan Penanaman Modal

Kebijakan anggaran untuk Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan total pagu urusan sebesar Rp10.108.716.659,00.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan total pagu Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp2.186.314.400,00.

14. Urusan Statistik

Kebijakan anggaran untuk Urusan Statistik dilaksanakan oleh Komunikasi dan Informatika. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan total pagu Urusan Kebudayaan sebesar Rp106.711.100,00.

15. Urusan Persandian

Kebijakan anggaran untuk Urusan Persandian dilaksanakan oleh Komunikasi dan Informatika. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

diarahkan pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan total pagu Urusan Kebudayaan sebesar Rp259.920.000,00.

16. Urusan Budaya

Kebijakan anggaran untuk Urusan Budaya dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Program Pengelolaan Permuseuman dengan total pagu Urusan Perpustakaan sebesar Rp2.806.967.000,00.

17. Urusan Perpustakaan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pembinaan Perpustakaan dengan total pagu Urusan Perpustakaan sebesar Rp5.611.969.195,00.

18. Urusan Kearsipan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengelolaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan total pagu Urusan Kearsipan sebesar Rp168.552.800,00.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan total pagu Urusan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.926.763.000,00.

2. Urusan Pariwisata

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dan Program Pemasaran Pariwisata, dengan total pagu Urusan Pariwisata sebesar Rp5.820.991.731,00.

3. Urusan Pertanian

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Peternakan dan Perkebunan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengendalian dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluh Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan total pagu Urusan Pertanian sebesar Rp37.777.232.230,00.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

4. Urusan Perdagangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan, Program Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Program standarisasi dan perlindungan konsumen, Program penggunaan dan pemasaran produk Dalam Negeri, dengan total pagu Urusan Perdagangan sebesar Rp9.483.626.300,00.

5. Urusan Perindustrian

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program perencanaan dan pengembangan industri dengan total pagu urusan sebesar Rp5.605.815.866,00.

6. Urusan Transmigrasi

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan total pagu urusan sebesar Rp50.000.000,00.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Kebijakan anggaran untuk Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan total pagu Urusan sebesar Rp64.635.272.155,00.

2. Sekretariat DPRD

Kebijakan anggaran untuk Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, dengan total pagu Urusan sebesar Rp68.053.487.271,00.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

1. Urusan Perencanaan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan total pagu Urusan Perencanaan sebesar Rp11.825.481.425,00.

2. Urusan Keuangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Satuan Kerja



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program pengelolaan Keuangan Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan barang Milik daerah, dengan total pagu Urusan Keuangan sebesar Rp325.489.711.921,00.

3. Urusan Kepegawaian

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Kepegawaian Daerah, dengan total pagu urusan sebesar Rp10.089.875.804,00.

4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan total pagu urusan sebesar Rp232.557.000,00.

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penelitian Dan Pengembangan, dengan total pagu urusan sebesar Rp997.603.800,00.

6. Urusan Pengelolaan Perbatasan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pengelolaan perbatasan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kebijakan anggaran diarahkan pada Program Pengelolaan Perbatasan, dengan total pagu urusan sebesar Rp129.742.600,00

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

1. Urusan Pengawasan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi, dengan total pagu Urusan Pengawasan sebesar Rp13.245.779.192,00.

G. Unsur Kewilayahan

1. Urusan Kewilayahan

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh Seluruh Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum, program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan total pagu Urusan Kewilayahan sebesar Rp39.259.294.085,00.



H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kebijakan anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kebijakan anggaran diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya, program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan total pagu Urusan Kewilayahan sebesar Rp29.474.432.660,00.



BAB IV IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Kebijakan Umum, Dasar Hukum, dan Tujuan Pelaporan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

4.1.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan daerah yang meliputi penerapan SAP berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi yang menjadi panduan dalam pengakuan dan pengukuran atas transaksi atau peristiwa serta pengungkapannya dalam penyajian laporan keuangan.

4.1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyajian dan penyusunan laporan keuangan daerah bersumber kepada pedoman / Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Permendagri Nomor Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- 13) Peraturan lainnya yang terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4.1.3 Tujuan Pelaporan

Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi



- para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:
- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 - e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman,
 - f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas pemerintah daerah.

4.2 Asumsi Dasar dan Defenisi

4.2.1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari Asumsi atas *kemandirian entitas; kesinambungan entitas; keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*

A. KEMANDIRIAN ENTITAS

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. *Entitas Pelaporan* adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Entitas Akuntansi* adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban. Oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.



B. KESINAMBUNGAN ENTITAS

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

C. KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (*MONETARY MEASUREMENT*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.2.2 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. **Arus Kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
3. **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
4. **Aset Tak Berwujud** adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
5. **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. **Basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
9. **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
10. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
12. **Entitas Akuntansi** adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
13. **Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
14. **Investasi** adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 15. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 16. **Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
 17. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 18. **Laporan keuangan gabungan** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
 19. **Laporan keuangan interim** adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
 20. **Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
 21. **Materialitas** adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
 22. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 23. **Pembiayaan (*financing*)** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 24. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 25. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 26. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 27. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 28. **Pos luar biasa** adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yg terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
 29. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan



- membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan
 31. **Selisih kurs** adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
 32. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 33. **Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
 34. **Surplus/Defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
 35. **Surplus/Defisit-LO** adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
 36. **Tanggal pelaporan** adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

4.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

1) KAS DAN SETARA KAS

PENGUKURAN KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENGAKUAN KAS DAN SETARA KAS

Terkait dengan pengakuan aset dalam paragraf 67 dan 68 PSAP 01, secara umum pengakuan aset dilakukan:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAS DAN SETARA KAS

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;



- b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
- c. Kebijakan manajemen setara kas.

2) INVESTASI JANGKA PENDEK

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PENDEK

- a. Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- b. Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar;
- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PENDEK

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan;
- c. Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah;
- d. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PENDEK

- a. Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
- b. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- c. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
- d. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
- e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

3) PIUTANG DAN UANG MUKA

PENGAKUAN PIUTANG

Piutang diakui pada saat akhir periode laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi pada saat jatuh tempo;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang undangan/pungutan pendapatan daerah dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari harus dipenuhinya kriteria:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan;
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria :

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang pendapatan berdasarkan Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- b. Piutang Dana Alokasi Umum, apabila alokasi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Perbedaan antara alokasi dengan realisasi transfer dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah;
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK;
- d. Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, apabila alokasi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur;
- e. Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi hak pemerintah daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah;

Piutang lainnya berdasarkan Peristiwa tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:

- a. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- b. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

- a. Pengakuan Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban Belanja/Uang Muka yang Harus



Dipertanggungjawabkan dan Beban Dibayar Dimuka.

- b. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

PENGUKURAN PIUTANG

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang pendapatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas negara/ daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk metode *official assessment* dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan:
 - 1) dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - 2) dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
 - 3) dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
- b. Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
- c. Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:
 - a. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- c. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- e. Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar pemerintah daerah.

Pengukuran Piutang transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran Piutang lainnya berdasarkan peristiwa tuntutan ganti rugi dilakukan dengan:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapus bukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - 1) Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penyesuaian nilai piutang dapat dilakukan dengan cara:

- a. Metode Penghapusan Langsung; dan
- b. Metode Penyisihan.

Metode Penghapusan Langsung adalah Penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih, digunakan ketika tidak memungkinkan mengestimasi



piutang tidak tertagih, atau ketika jumlah piutang relatif kecil dibandingkan dengan total aset lancar.

Metode Penyisihan adalah Penyisihan sejumlah piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih, digunakan ketika jumlah piutang relatif besar dibandingkan dengan total aset lancar.

PENGUKURAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a. Penilaian Kualitas Piutang;
- b. Pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

- a. jatuh tempo Piutang; dan
- b. upaya penagihan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas diragukan; dan
- d. Kualitas macet.

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

Kualitas macet adalah piutang yang:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- b. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa Piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- b. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
- c. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;
- d. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir;
- e. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik;
- f. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan fidusia (UU Nomor 42 Tahun 1999) atas kendaraan bermotor; dan
- g. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan.

Agunan lainnya dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Daerah.

Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:

- a. 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
- b. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
- d. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan.

PEMBERHENTIAN PENGAKUAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapus bukuan (*write down*).

Penghapus bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

Penghapus bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakompabel menjadi ekstrakompabel.

Penghapus bukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapus bukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapus bukuan.

Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
- b. Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang.

Penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan pertimbangan antaralain:

- a. Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
- b. Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
- c. Debitor mengalami musibah (*forcemajeure*);
- d. Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahliwaris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- e. Debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - 3) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - 4) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Tata cara penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.

Penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapus bukuan ini masih dicatat secara ekstra kompitabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Kriteria penghapus bukuan piutang, adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar dari pada kerugian penghapus bukuan.
 - 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapus bukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapus bukuan.
- c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapus bukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapus bukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapus bukuan tersebut.

Penghapusan tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapusan tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;
- b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit;
- e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f. Penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hokum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
- g. Penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown*



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

Kewenangan penghapusan piutang dilaksanakan oleh Bupati melalui Surat Keputusan

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang. Pencatatan Perubahan Jumlah Piutang harus disajikan dan diungkapkan jika terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan Piutang oleh Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitur yang memiliki kualitas macet. Penghapusan Piutang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Perlakuan akuntansi penghapusan dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan penambahan jumlah Piutang dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan. Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. Pencatatan pengurangan jumlah Piutang dilakukan apabila:

- a. Surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
- b. Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

4) BEBAN DIBAYAR DIMUKA PENGAKUAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

PENGUKURAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA



Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

PENGUNGKAPAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5) PERSEDIAAN PENGAKUAN PERSEDIAAN

- a. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.
- b. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

PENGUKURAN PERSEDIAAN

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang dinilai satuannya relatif rendah, peraturannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis barang cetakan, dan yang sejenis.

Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dan nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Dengan metode periodik ini, pencatatan dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir / harga pokok produksi terakhir/nilai wajar jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

Metode periodik untuk persediaan yang penggunaannya sulit didefinisikan, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadinya penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

- a. Persediaan dilakukan sebagai bagian dari aset lancar
- b. Pengungkapan untuk persediaan di dalam laporan keuangan, antara lain:
 - 1) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - 2) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

6) INVESTASI JANGKA PANJANG PENGAKUAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).



Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

- a. Deviden Tunai;
- b. Deviden Saham; dan
- c. Bagian Laba.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk *Deviden* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
- b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
- b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

PENGUKURAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

- a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
- b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan;
- c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
- d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
- e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- Metode Biaya;
- Metode Ekuitas; dan
- Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Persentase Penyisihan Nilai Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	10 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	25 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	75 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen.



Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN INVESTASI JANGKA PANJANG

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi

7) KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

PENGAKUAN ASET TETAP

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap berlaku hanya untuk Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Peralatan dan mesin sebesar sama dengan Rp1.000.000,00 atau melebihi untuk pengadaan baru;
- b. Gedung dan Bangunan sebesar sama dengan atau melebihi Rp20.000.000,00 kecuali pengerjaan pengecatan dan atau wallpaper; dan
- c. Untuk Jalan, Irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

PENGUKURAN ASET TETAP

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- b. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- c. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah :
- 1) Biaya Konstruksi Fisik
Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.
 - 2) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.
 - 3) Biaya Pengawasan Konstruksi
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.
 - 4) Biaya Pengelolaan Kegiatan
Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:
 - a) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran
Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.
 - b) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis
Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.
- f. Komponen Biaya
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- Biaya perjalanan dinas;
 - Biaya ATK;
 - Biaya perencanaan;
 - Biaya pengawasan;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- Biaya panitia lelang (honor panitia lelang yang dapat dibagikan secara proposional terhadap seluruh paket yang dilelang);
- Biaya persiapan tempat;
- Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- Biaya pemasangan (*installation cost*);
- Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- Biaya konstruksi.

Perolehan Secara Gabungan

Aset tetap diperoleh secara gabungan adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset tetap. Perhitungan alokasi nilai masing-masing jenis aset atau bidang aset ditentukan dengan menghitung proporsi dari:

- 1) Nilai wajar masing-masing aset tetap atau bidang aset tetap di pasaran, atau
- 2) Nilai kontrak konstruksi (untuk aset tetap yang bersifat fisik/konstruksi), atau
- 3) Luas bidang aset Sebagai contoh:

Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga melakukan pembangunan gedung dengan 3 lokasi. Untuk pembangunan gedung tersebut, kontrak perencanaan dilakukan secara gabungan oleh satu *supplier*. Dengan kata lain, 1 *supplier* menangani 3 bidang aset dengan lokasi yang berbeda. Nilai kontrak perencanaan adalah sebesar Rp125.000.000,00 untuk ketiga gedung. Masing-masing gedung direncanakan dibangun dengan luasan sebagai berikut:

Jenis Gedung	Luas Bangunan
A	70 m ²
B	150 m ²
C	120 m ²
Total Luas Bangunan	340 m²

Maka perhitungan alokasi nilai perencanaan untuk menghitung harga perolehan masing-masing gedung adalah sebagai berikut:

Jenis Gedung	Luas Bangunan	Proporsi	Nilai Perencanaan (Rp)
A	70 m ²	20,6%	25.750.000
B	150 m ²	44,1%	55.125.000
C	120 m ²	35,3%	44.125.000
Total Luas Bangunan	340 m²	100%	125.000.000

ASET YANG BERASAL DARI PERTUKARAN ASET

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga



dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.



PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PENGAKUAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

PENGUKURAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan

- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan atau dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurangan nilai aset tetap.
- Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.
- Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;

- Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa masa manfaat setelah peninjauan.
 - Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
 - Penyusutan disajikan di Neraca sebesar akumulasi nilai penyusutannya.
- e. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	50
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	50
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	25
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi.

PENGUNGKAPAN ASET TETAP

- a. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- b. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- c. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 3) Jika ada, nama penilaian dependen;
 - 4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
- d. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca diungkapkan secara rinci dalam Catatan dan Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.



KAPITALISASI ASET TETAP PENGAKUAN KAPITALISASI ASET TETAP

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien;
 - 2) bertambah umur ekonomis;
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
- b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

PENGUKURAN KAPITALISASI ASET TETAP

Batasan jumlah pengeluaran yang dapat dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten. (PSAP 07 paragraf 49).

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan peralatan dan mesin sama dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih dari pengadaan baru.
- b. Gedung dan bangunan sebesar sama dengan atau melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kecuali pengerjaan pengecatan dan atau *wallpaper*.
- c. Untuk Jalan, Irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.

Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dapat dikapitalisasi berupa:

Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;

Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunanyang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- b. Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
- c. Pembayaran atas pembangunan gedung melalui kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan per termin. Apabila proses pembangunan gedung tersebut melampaui periode pelaporan (pertengahan dan akhir tahun), maka biaya yang telah dikeluarkan



dikapitalisasi sebagai” Konstruksi Dalam Pengerjaan”.

Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu Nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
- b. Pengeluaran untuk pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

Pengeluaran untuk pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.

Pengeluaran untuk pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:

- a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
- b. Pengeluaran yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KAPITALISASI ASET TETAP

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (dikapitalisasi). (PSAP 07 paragraf 49). Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMN/D.

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

1. Kontruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan gaji-gaji yang dibayarkan dalam kasus pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan nilai yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.
3. Dalam pelaksanaan konstruksi aset tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah aset tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material.

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu benda berwujud harus konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

keuangan jika :

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
 - a. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasikan menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
 - c. Penyelesaian konstruksi dalam Pengerjaan Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.
 - d. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
 - e. Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decisiontree*) sebagai berikut:
 - 1) Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*);
 - 2) Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
 - 3) Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Kebijakan Akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - c. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah (walaupun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh) namun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan didalam CaLK.
 - d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
 - e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pekerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Kontruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapus bukukan.
 - f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai akan diakui sebagai KDP.



PENGUKURAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- b. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - 1) Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyedia;
 - 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ketempat lokasi pekerjaan;
 - 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- d. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - 1) Asuransi;
 - 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- e. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- f. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasikan dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- g. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- h. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasikan tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- i. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- j. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *forcemajeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasikan.
- k. Kontrak konstruksi yang mencakup berapa jenis pekerjaan yang penyelesaian jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

diperhitungkan biaya pinjam. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

1. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perenanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

PENGUNGKAPAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

8) KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA PENGAKUAN ASET LAINNYA

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan aset serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan aset dan aset lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan;
- b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan;
- c. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai;
- d. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang;
- e. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang;
- f. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang; dan
- g. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

Aset Tak Berwujud diakui pada saat:

- a. Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan



b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

PENGUKURAN ASET LAINNYA

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. b. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak. Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

- a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
- b. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban; dan
- c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya *professional* yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari; dan
- c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan



penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketigadi Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- a. Masa manfaat dan metode amortisasi;
- b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
- c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

AMORTISASI ASET LAINNYA PENGAKUAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

PENGUKURAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 (Empat) tahun.

PENGUNGKAPAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Amortisasi aset tidak terwujud diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

9) KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk;

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

PENGAKUAN PROPERTI INVESTASI

Properti investasi diakui sebagai aset jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan



- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. Biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut tidak diakui sebagai jumlah tercatat properti investasi. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian.

PENGUKURAN PROPERTI INVESTASI

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut:
 - 1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - 2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - 3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- d. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- e. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
- f. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas.
- g. Jika aset yang diperoleh melalui pertukaran tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Kondisi tersebut berlaku untuk pertukaran yang (a) tidak memiliki substansi komersial; atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal;
- h. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - 1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - 2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - 3) selisih antara huruf (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- i. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - 1) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - 2) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar.
- j. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.



- k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar

Pengukuran setelah pengakuan awal

- a. Properti Investasi diukur dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Pada saat revaluasi, properti Investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- g. Jika jumlah tercatat properti Investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
- h. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
- i. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Alih guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan;
- c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; dan/atau
- d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi

Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto



dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK terkait properti investasi antara lain:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat Properti Investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) Pelepasan;
 - 4) Penyusutan;
 - 5) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) Perubahan lain
- f. Apabila entitas melakukan revaluasi atas Properti Investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Uraian Properti Investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) Nilai tercatat sebelum revaluasi
 - 5) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar; dan
 - 6) Nilai tercatat Properti Investasi setelah revaluasi;
- g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. Apabila pengklasifikasian atas Properti Investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan Properti Investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari Properti Investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j. Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - 1) Penghasilan sewa menyewa biasa dari Properti Investasi;
 - 2) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;



- 3) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk pemeliharaan atau untuk perbaikan peningkatan;
- m. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

4.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI UTANG

1) UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) PENGAKUAN

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Pengukuran utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Penyajian dan pengungkapan utang perhitungan pihak ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2) UTANG BUNGA (*ACCRUED INTEREST*)

Pengakuan utang bunga (*accrued interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan

Pengukuran utang bunga (*accrued interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Penyajian dan pengungkapan utang bunga (*accrued interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.



3) UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Definisi utang jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi Utang Jangka Pendek Lainnya sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

Pengakuan utang jangka pendek lainnya

Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pengukuran utang jangka pendek lainnya

Pengukuran atas Utang Jangka Pendek Lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

Pengungkapan utang jangka pendek lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4) KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN PENGAKUAN KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan

Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.

Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi

Pengungkapan kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

5) BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG PENGAKUAN BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. (PSAP 09 paragraf 14).

Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*). (PSAP 09 paragraf 17).

Pengukuran bagian lancar utang jangka panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Penyajian dan pengungkapan bagian lancar utang jangka panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

6) PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PENGAKUAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7) UTANG BEBAN PENGAKUAN UTANG BEBAN Utang Beban diakui pada saat:

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8) UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA PENGAKUAN UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.



Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian Dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

9) UTANG DALAM NEGERI PENGAKUAN UTANG DALAM NEGERI

1. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
2. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengukuran utang dalam negeri

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Penyajian dan pengungkapan utang dalam negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

10) UTANG LUAR NEGERI

Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

Pengakuan utang luar negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran utang luar negeri

Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata



uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran,

perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG LUAR NEGERI

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).

Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

11) UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA PENGAKUAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

PENGUKURAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

4.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS EKUITAS

PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

PENGUKURAN EKUITAS

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).



4.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN LRA

1) PENDAPATAN LRA

Pengakuan Pendapatan LRA

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; dan
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD yang belum disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai Pendapatan Ditangguhkan.

- a. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- b. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

PENGUKURAN PENDAPATAN LRA

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (*normal*) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA dibukukan dengan menggunakan rekening belanja tak terduga.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN LRA

Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).



Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu; dan
- e. Pengungkapan Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari a) Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain pendapatan yang Sah b) klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Transfer-Lra Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui oleh PPKD.

Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

Penyajian Dan Pengungkapan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



4.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Pengakuan Belanja

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD;
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan hingga tanggal pelaporan belum dipertanggungjawabkan / dimintakan penggantian dari RKUD, dengan ketentuan Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal SKPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen, honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang, ATK, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan. Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien;
 - b) Bertambah umur ekonomis;
 - c) Bertambah Volume; dan
 - d) Bertambah Kapasitas Produksi.
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material /melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang dikeluarkan. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.

Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.

Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pengukuran Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan/atau aset tidak berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Klasifikasi belanja tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Belanja juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010



tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai penambah saldo kas dan pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang saldo kas dan ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Catatan atas Laporan Keuangan terkait belanja harus mengungkapkan/menyajikan rincian belanja, penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka, penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasi belanja daerah serta informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) BELANJA OPERASI PENGAKUAN BELANJA OPERASI

Pengakuan belanja operasi pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD atau bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan menggunakan dokumen SP2D GU atau SP2D Nihil.

Pengukuran Belanja Operasi

Pengukuran belanja operasi dilakukan dengan asas bruto yaitu sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada bukti pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Operasi

Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) BELANJA MODAL PENGAKUAN BELANJA MODAL

Pengakuan Belanja Modal dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD berdasarkan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bersamaan dengan pengakuan Belanja Modal dilakukan pengakuan atas Aset Tetap (basis akrual).



Pengukuran Belanja Modal

Pengukuran Belanja Modal dilakukan berdasarkan jumlah nominal yang tercantum dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Modal

Belanja Modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4) BELANJA TAK TERDUGA

Pengakuan Belanja Tak Terduga

Pengakuan Belanja Tak Terduga pada saat terjadinya pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran yang sah atau dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Tak Terduga

Pengukuran Belanja Tak Terduga berdasarkan nilai yang diterima dalam bukti pengeluaran atas belanja tak terduga atau berdasarkan jumlah nilai dalam dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5) KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Pengakuan Transfer

Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun sesuai dengan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Transfer ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

PENGUKURAN TRANSFER

Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSFER

Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan klasifikasi Transfer dan disajikan setelah klasifikasi Belanja. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.8. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. (PSAP 02 Paragraf 7).

Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

i. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

ii. PENGELUARAN PEMBIAYAAN PENGAKUAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian Dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4.9 SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

4.10 PENGAKUAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

Akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.



Penyajian Dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1) PENDAPATAN-LO

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

- a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan; dan
- b. Dalam hal badan layanan Umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

Penetapan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan-LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh masyarakat, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak-LO. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat "Piutang Pajak Daerah" di debit dan "Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.
- b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap "Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengna rincian obyek terkait)".
- c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan



kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.

b. Ketidakpastian penerimaan yang cukup tinggi

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

Penetapan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

2) PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO

Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
- b. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

pendapatan lainnya yang sah.

- c. Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli Daerah-LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.

Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (*understated*) maupun lebih (*overstated*).

Pendapatan Asli Daerah-LO untuk rincian Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai karakteristik yang spesifik. Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai siklus yang tetap dan pasti. Misalnya pajak dibayarkan pada bulan Mei, maka wajib pajak membayar untuk waktu 12 (Dua Belas) bulan. Meskipun hak atas pajak kendaraan pada periode akuntansi berjalan hanya sekitar 8 (Delapan) bulan namun pada periode akuntansi berikutnya dan sebelumnya selalu dibayarkan pajak dengan jangka waktu yang sama. Sehingga hak atas pajak kendaraan tersebut diakui dengan jumlah yang sama untuk periode akuntansi bersangkutan. Dengan pertimbangan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor akan selalu dibayarkan untuk waktu 12 bulan (adanya kepastian jumlah hak yang akan diterima), tidak akan pernah ada klaim (restitusi), kepraktisan pengakuan maka Pajak Kendaraan Bermotor diakui haknya dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas dan nilai yang diakui adalah nilai pajak 12 bulan.

Pengukuran Pendapatan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan asas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

3) PENDAPATAN TRANSFER-LO PENGAKUAN PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul yaitu bersamaan dengan terbitnya peraturan mengenai Alokasi Pendapatan Transfer.

Pada saat Alokasi Pendapatan Transfer diterbitkan dan terjadi pengakuan Pendapatan Transfer-LO, jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pendapatan ini diakui dengan kondisi sebelum penerimaan kas. Oleh sebab itu saat pengakuan Pendapatan Transfer-LO akan menimbulkan akun Piutang Pendapatan Transfer-LO pada sisi debit.

Pencairan atau penerimaan distribusi Pendapatan Transfer-LO secara periodik mengurangi jumlah Piutang Transfer-LO dan tidak akan menambah Pendapatan Transfer-LO. Pencairan ini diakui berdasarkan Nota Kredit yang diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO hanya dilakukan di unit PPKD.



Pengukuran Pendapatan Transfer-LO

Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan jumlah Alokasi Pendapatan Transfer.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

4) LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini menjadi hak pemerintah daerah. Pendapatan Hibah-LO diakui pada saat perjanjian Hibah disetujui. Dana Darurat-LO terkait dengan sifatnya ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan dikeluarkannya Kas di Kas Daerah (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Pendapatan Lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak pemerintah daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO diukur dengan asas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

Penyajian Dan Pengungkapan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

5) PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO PENGAKUAN PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO

Pengakuan Pendapatan Non Operasional-LO pada saat hak atas pendapatan timbul. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-LO

Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

6) POS LUAR BIASA-LO PENGAKUAN POS LUAR BIASA-LO

Pos Luar Biasa-LO diakui pada saat hak atas pendapatan pos luar biasa timbul. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan



diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

Pengukuran Pos Luar Biasa-LO

Pos Luar Biasa-LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian Dan Pengungkapan Pos Luar Biasa-LO

Pos Luar Biasa-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

4.11. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Pengakuan Beban

Beban dapat diakui pada:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang panjang yang harus dilakukan. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengukuran Beban

Bebandiukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

1) BEBAN OPERASI

Pengakuan Beban Operasi

Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Pengukuran Beban Operasi

Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Operasi

Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) BEBAN TRANSFER PENGAKUAN BEBAN TRANSFER

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Transfer

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) BEBAN NON OPERASIONAL

Pengakuan Beban Non Operasional

Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4) BEBAN LUAR BIASA PENGAKUAN BEBAN LUAR BIASA

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.

Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

Pengukuran Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

Penyajian Dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO).



Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

10) KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI

Pengakuan Koreksi

Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.

Pengukuran Koreksi

Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN KOREKSI

Koreksi disajikan sesuai dengan akun yang dilakukan koreksi dan dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan penyajian dan pengungkapan koreksi pendapatan-LO diantaranya adalah:

- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

- Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akruwal menjadi basis Akruwal penuh, dilakukan:
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
 - b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Peristiwa Luar Biasa

- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - 1) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - 2) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - 3) berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - 4) memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- g. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1 Pendapatan	1.882.239.308.693,00	1.845.813.897.701,22	1.577.337.109.474,15

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.845.813.897.701,22 atau 98,06% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.882.239.308.693,00. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 mengalami Peningkatan sebesar Rp268.476.788.227,07 atau 17,02% dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp1.577.337.109.474,15. Pendapatan Daerah TA 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	157.176.389.988,00	148.540.528.998,22	108.322.526.723,15
2	Pendapatan Transfer	1.724.931.194.042,00	1.697.148.794.040,00	1.376.524.490.105,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	131.724.663,00	124.574.663,00	92.490.092.646,00
	JUMLAH	1.882.239.308.693,00	1.845.813.897.701,22	1.577.337.109.474,15

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	157.176.389.988,00	148.540.528.998,22	108.322.526.723,15

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu TA 2023 adalah sebesar Rp148.540.528.998,22 atau 94,51% dari anggaran TA 2023 sebesar Rp157.176.389.988,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp40.218.002.275,07 atau 37,13% dari realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp108.322.526.723,15. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan uraian objek sebagai berikut;

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Daerah	71.213.298.828,00	67.829.112.388,92	45.407.125.436,02
Retribusi Daerah	12.447.813.040,00	8.533.083.042,00	8.208.584.693,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.300.000.000,00	2.398.005.508,00	2.114.662.284,00
Lain-lain PAD yang Sah	71.215.278.120,00	69.780.328.059,30	52.592.154.310,13
Jumlah	157.176.389.988,00	148.540.528.998,22	108.322.526.723,15

Rincian masing-masing Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	71.213.298.828,00	67.829.112.388,92	45.407.125.436,02

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu TA 2023 dianggarkan sebesar Rp71.213.298.828,00 dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp67.829.112.388,92 atau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

95,25%. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp22.421.986.952,90 atau 49,38% Dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp45.407.125.436,02 dengan rincian objek sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Hotel	862.560.000	742.857.383,00	604.567.211,00
Pajak Restoran	5.000.000.000	3.831.552.094,92	3.678.686.239,52
Pajak Hiburan / Sirkus	264.000.000	137.306.400,00	113.918.963,00
Pajak Reklame	1.605.290.558	1.702.689.130,00	1.751.359.197,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	17.488.000.000,00	20.374.263.447,00	17.488.528.399,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.000.000.000,00	3.860.292.749,00	3.033.320.303,5
Pajak Parkir	575.000.000	650.480.154,00	519.458.256,00
Pajak Air Tanah	250.000.000	188.440.810,00	167.352.747,00
Pajak Sarang Burung Walet	384.000.000	85.410.500,00	92.623.000,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000	1.007.187.551,00	577.293.776,00
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan	16.284.448.270	11.801.751.523,00	11.155.559.528,00
BPHTB Pemindahan Hak	23.000.000.000,00	3.880.780.025,00	3.170.307.508,00
BPHTB Pemberian Hak Baru	0,00	19.566.100.622,00	3.054.150.308,00
Jumlah	71.213.298.828,00	67.829.112.388,92	45.407.125.436,02

Total realisasi pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp67.829.112.388,92 dari target/anggaran Rp71.213.298.828,00 atau tercapai 95,25%. Realisasi ini lebih rendah dari target dengan selisih kurang sebesar Rp3.384.186.439,08. Penjelasan masing-masing capaian pajak daerah sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp742.857.383,00 dari anggaran Rp862.560.000,00 atau tercapai 86,12%. Realisasi ini lebih rendah dari target/anggaran dengan selisih kurang sebesar Rp119.702.617,00. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan karena masih rendahnya kunjungan atau tingkat hunian hotel di Kabupaten Rokan Hulu, dan belum seluruh wajib pajak hotel membayar pajak hotel sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pada perda;
- Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 sebesar Rp3.834.527.924,92 atau tercapai 76,63% dari anggaran Rp5.000.000.000,00. Realisasi lebih rendah dari target/anggaran dengan selisih kurang sebesar Rp1.165.472.075,08. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan karena masih rendahnya transaksi di Restoran/Rumah Makan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, dan masih rendahnya kesadaran pemilik Restoran/Rumah Makan dalam membayar pajak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 Rp137.306.400,00 dari anggaran Rp264.000.000,00 atau tercapai 52,01%. Realisasi lebih rendah dari target/anggaran dengan selisih kurang sebesar Rp126.693.600,00. Realisasi Pajak Hiburan ini pada umumnya dari kegiatan atau tempat hiburan seperti pasar malam. Sehingga realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

capaian pajak hiburan ini sangat tergantung pada jumlah/seringnya kegiatan tersebut dilaksanakan penyelenggara.

- d. Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp1.702.689.130,00 dari anggaran Rp1.605.290.558,00 atau tercapai 106,07%. Realisasi melebihi dari target dengan selisih lebih sebesar Rp97.398.572,00. Realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan karena adanya upaya melakukan pendataan, pengawasan, dan sosialisasi yang dilaksanakan secara kontinu oleh petugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- e. Realisasi Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri Tahun 2023 sebesar Rp17.488.000.000,00 dari anggaran Rp20.374.263.447,00 atau tercapai 116,50%. Realisasi ini melebihi dari target dengan realisasi lebih tinggi/melebihi sebesar tercapai sebesar Rp2.886.263.447,00. Realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya penambahan pelanggan baru yang menggunakan listrik PLN, dan juga disebabkan karena adanya peningkatan tarif PPJ melalui revisi pada tarif bagi pelanggan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.
- f. Reaslisai Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain Tahun 2023 sebesar Rp3.860.292.749,00 dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 atau tercapai 128,68%. Realisasi ini melebihi dari target dengan realisasi lebih sebesar Rp860.292.749,00. Hal ini disebabkan karena adanya upaya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Petugas dan peningkatan penggunaan daya kepada masyarakat dan perusahaan;
- g. Realisasi Pajak Parkir Tahun 2023 sebesar Rp650.480.154,00 dari anggaran Rp575.000.000,00 atau tercapai 113,13%. Realisasi melebihi dari target dengan selisih lebih sebesar Rp75.480.154,00. Realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan karena adanya penambahan wajib pajak baru setelah dilakukan sosialisasi, pendataan dan pengawasan oleh petugas;
- h. Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp188.440.810,00 dari anggaran Rp250.000.000,00 atau tercapai 75,38%. Realisasi lebih rendah dari anggaran/target dengan selisih kurang sebesar Rp61.559.190,00. Hal ini disebabkan karena rendahnya transaksi dan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, serta pemahaman wajib pajak yang masih rendah;
- i. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2023 sebesar Rp85.410.500,00 dari anggaran Rp384.000.000,00 atau hanya tercapai 22,24%. Realisasi lebih rendah dari anggaran/target dengan selisih kurang sebesar Rp298.589.500,00. Rendahnya Realisasi pajak sarang burung walet dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat /pengusaha walet untuk membayar pajak daerahnya dan belum adanya sanksi yang tegas diberikan pada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak daerah;
- j. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) Tahun 2023 sebesar Rp1.007.187.551,00 dari anggaran Rp2.500.000.000,00 atau tercapai 40,29%. Realisasi lebih rendah dari anggaran/target dengan selisih kurang Rp1.492.812.449,00. Realisasi sangat rendah dari target yang ditetapkan, Hal ini disebabkan belum dilakukan pemungutan terhadap pajak MLB ini kepada pengusaha Quarry/MLB karena masih adanya permasalahan regulasi terkait perizinan bagi pengusaha, realisasinya MLB hanya berasal dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD;
- k. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2023 sebesar Rp11.801.751.523,00 dari anggaran Rp16.284.448.270,00 atau tercapai 72,47%. Realisasi PBBP2 lebih rendah dari anggaran dengan selisih kurang Rp4.482.696.747,00. Rendahnya realisasi ini disebabkan karena kurang kesadaran dan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

pemahaman masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar PBBP2.

1. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak sebesar Rp3.880.780.025,00 dari anggaran Rp23.000.000.000,00 atau tercapai 16,87%. Rendahnya capaian BPHTB Pemindahan Hak karena dalam penetapan anggaran/target termasuk memperhitungkan untuk target BPHTB Pemberian Hak Baru
- m. Realisasi BPHTB Pemberian Hak Baru sebesar Rp19.566.100.622,00 dari anggaran Rp.0,00 . Anggaran/target BPHTB Pemberian Hak Baru termasuk dalam perhitungan target/Anggaran (BPHTB) Pemindahan Hak.

Pajak BPHTB terdiri dari dari BPHTB Pemindahan Hak dan BPHTB Pemberian Hak Baru dengan realisasi 2023 sebesar Rp23.446.880.647,00 (Rp3.880.780.025,00+Rp19.566.100.622,00) dan anggaran/target BPHTB Rp23.000.000.000,00 (Rp23.000.000.000,00 +Rp0,00) atau capaian 101,94%. Realisasi BPHTB melebihi dari anggaran dengan selisih lebih Rp446.880.647,00. Capaian lebih target ini diantaranta disebabkan karena adanya perusahaan a.n PT.SSP (Sawit Sontang Permai) yang membayar BPHTB atas peningkatan hak, yaitu Hak guna Usaha (HGU).

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	12.447.813.040,00	8.533.083.042,00	8.208.584.693,00

Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Rokan Hulu TA 2023 dianggarkan sebesar Rp12.447.813.040,00 dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.533.083.042,00 atau 68,55% dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 lebih tinggi dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp8.208.584.693,00 dengan rincian jenis retribusi daerah sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	700.000.000,00	538.337.000,00	517.250.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	269.722.000,00	360.342.000,00	307.160.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar/Los	0,00	0,00	60.800.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	850.000.000,00	523.205.000,00	516.742.500,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	49.078.000,00	55.247.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	66.000.000,00	6.200.000,00	12.750.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	1.500.000.000,00	992.970.000,00	1.132.172.900,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	657.247.000,00	962.320.000,00
Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	0,00	25.755.000,00

62



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000,00	585.388.000,00	613.396.500,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	150.000.000,00	159.715.000,00	123.500.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	12.040.000,00	478.050.000,00
Retribusi Pemakaian Alat	500.000.000,00	504.650.000,00	6.300.000,00
Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70.278.000,00	77.005.000,00	75.472.000,00
Retribusi Pelayanan Rumah potong hewan	54.060.000,00	7.530.000,00	7.500.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga	750.000.000,00	65.720.000,00	126.930.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	500.000.000,00	35.950.000,00	30.500.000,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	4.177.753.040,00	2.737.550.000,00	2.342.595.500,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.800.000.000,00	1.220.156.042,00	814143.293,00
Jumlah	12.447.813.040,00	8.533.083.042,00	8.208.584.693,00

Total Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 lebih rendah/tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp12.447.813.040,00 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp8.533.083.042,00 atau 68,55% dari target dengan penjelasan sebagai berikut:

- Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan Tahun 2023 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp700.000.000,00 realisasi sebesar Rp538.337.000,00 atau 76,91% dengan selisih kurang sebesar Rp161.633.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana yang tersedia baik armada yang tidak memadai, akses jalan ke TPA yang berakibat terganggunya penanganan sampah otomatis masyarakat tidak berkenan dalam pembayaran retribusi;
- Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2023 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp269.722.000,00 tercapai sebesar Rp360.342.000,00 atau 133,60% selisih lebih sebesar Rp90.620.000,00. Realisasi lebih tinggi dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan meningkatnya Nilai kontrak parkir berdasarkan pengembangan titik/objek parkir dan meningkatnya jumlah armada/kendaraan yang parkir di objek parkir yang dikelola;
- Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 lebih rendah/tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp850.000.000,00 tercapai sebesar Rp523.205.000,00 atau 61,55% selisih kurang Rp326.795.000,00. Realisasi lebih rendah/tidak mencapai target, hal ini adanya perubahan sistem Pengujian Kendaraan Bermotor dari Buku Uji menjadi kartu Uji Elektronik sejak Tahun 2019, dimana Kendaraan yang akan di uji difoto dalam Gedung Uji dan Dimensi utama kendaraan harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga kendaraan yang over tidak bisa diproses uji kirnya. Ditutupnya pengawasan jembatan timbang dimana kendaraan yang masuk



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

kedalam jembatan timbang kartu kirnya harus hidup. Masih kurangnya pengawasan di jalan (Razia) yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan dan berdirinya peron-peron kelapa sawit sampai kedesa-desanya sehingga kendaraan yang wajib uji tidak lagi melintas di jalan raya atau melintasi kantor polisi dan rute perjalanan hanya dalam wilayah desanya saja;

- d. Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2023 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp50.000.000,00 tercapai sebesar Rp49.078.000,00 atau 98,16% dengan selisih kurang sebesar Rp992.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut disebabkan beberapa Perusahaan tidak mau membayar retribusi tersebut;
- e. Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Tahun 2023 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp66.000.000,00 realisasi sebesar Rp6.200.000,00 atau 9,39% dengan selisih kurang sebesar Rp59.800.000,00. tidak tercapainya target pendapatan tersebut disebabkan Penetapan target mengacu pada tahun-tahun sebelumnya saat ini Penyedotan Kakus/tinja hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan (subjek Retribusi) ;
- f. Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun 2023 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 tercapai sebesar Rp992.970.000,00 atau 66,20% dengan selisih kurang sebesar Rp507.030.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut disebabkan adanya keterlambatan pendistribusian Cap Tanda Tera (CTT) sebagai alat legalisasi pelaksanaan tera/ tera ulang oleh Direktur Metrologi (Dirmet) Kementerian Perdagangan, baru diterima oleh Dinas Perindag pada awal bulan february dan pada akhir bulan february seluruh alat standard harus dilakukan verifikasi oleh Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional 1 Medan oleh sebab itu seluruh alat dikirim ke Medan sampai dengan pertengahan mei, sehingga selama alat diverifikasi kegiatan pelayanan tera/tera ulang terhenti dan secara otomatis mempengaruhi realisasi penerimaan PAD. Pada akhir bulan November 2023 Perda nomor 9 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah dikeluarkan, berdasarkan regulasi ini maka retribusi pelayanan tera/ tera ulang tidak boleh dipungut kembali per tanggal 28 November 2023 sehingga perolehan PAD terhenti.
- g. Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023 sebesar Rp657.247.000,00 dari anggaran/target sebesar Rp0,00. Pada APBD P Tahun 2023 retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak ditargetkan karena adanya perubahan regulasi terkait Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Realisasi retribusi ini adalah dari piutang tahun 2022 dan realisasi atas ketetapan retribusi di awal tahun 2023 ;
- h. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2023 lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp1.660.000.000,00 tercapai sebesar Rp1.261.793.000,00 atau 76,01% dengan selisih kurang sebesar Rp398.207.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut karena berdasarkan Permen LHK No.5 Tahun 2021 Tentang cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan pasal 17 ayat 3 poin (d) bahwa hasil pemantauan air limbah uji oleh laboratorium yang telah mendapatkan registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kondisi laboratorium DLH masih sebagai laboratorium pengujian yang telah di Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional namun belum teregistrasi di KLHK sehingga pelaku usaha yang mau menguji air limbahnya di Lab DLH menjadi berkurang dan pelayanan pengujian laboratorium DLH hanya untuk pengujian Kualitas Air untuk pengujian Udara dan Tanah belum bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran sarana prasarana dan Sumber



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Daya Manusia (SDM);

- i. Realisasi Retribusi Pemakaian Ruang Tahun 2023 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00 tercapai sebesar Rp159.715.000,00 atau 106,48% dengan selisih lebih sebesar Rp9.715.000,00;
- j. Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor Tahun 2023 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 tercapai sebesar Rp12.040.000,00 atau 120,40% dengan selisih lebih sebesar Rp2.040.000,00;
- k. Realisasi Retribusi Pemakaian Alat Tahun 2023 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 tercapai sebesar Rp504.650.000,00 atau 100,93% dengan selisih lebih sebesar Rp4.650.000,00;
- l. Realisasi Retribusi Terminal Tahun 2023 lebih tinggi/melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp70.278.000,00 tercapai sebesar Rp77.005.000,00 atau 109,57% dengan selisih lebih sebesar Rp6.727.000,00;
- m. Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2023 lebih lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp54.060.000,00 tercapai sebesar Rp7.530.000,00 atau 13,93% dengan selisih kurang sebesar Rp46.530.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut disebabkan belum maksimalnya jumlah pemotongan hewan yang dilakukan RPH (Rumah Potong Hewan) hal itu di karenakan masih banyaknya peternak yang melakukan pemotongan hewan di TPH (Tempat Pemotongan Hewan) sehingga menjadi kendala untuk penarikan retribusi dan masih rendahnya daya beli Masyarakat sejak *covid-19*;
- n. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023 lebih lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp750.000.000,00 tercapai sebesar Rp65.720.000,00 atau 8,76% dengan selisih kurang sebesar Rp684.280.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut karena adanya permasalahan terhadap objek wisata yang dikelola pemerintah Kabupaten Rokan Hulu seperti Objek Wisata Menara Islamic 99 terdapat masalah teknis lift tidak berfungsi, Objek Wisata Suaman dimana objek wisata tersebut harus bagi hasil dengan Pemerintah Desa setempat sedangkan Objek Wisata Hapanasan masih kurang infrastruktur Listrik dan Internet sehingga minat pengunjung berkurang;
- o. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan Tahun 2023 lebih lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp500.000.000,00 tercapai sebesar Rp35.950.000,00 atau 7,19% dengan selisih kurang sebesar Rp464.050.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut dikarenakan induk ikan sudah afkir atau sudah tidak produktif lagi, sedikitnya induk ikan yang matang gonad dan juga faktor cuaca ekstrim yang menyebabkan benih yang dihasilkan berkurang, factor lainnya ialah pakan ikan yang tidak mencukupi jumlah komoditas yang terdapat di balai benih ikan;
- p. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan Tahun 2023 lebih lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp4.177.753.040,00 tercapai sebesar Rp2.737.550.000,00 atau 65,53% dengan selisih kurang sebesar Rp1.440.203.000,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut dikarenakan target sebesar Rp1.250.000.000,00 adalah penarikan dari tunggakan, surat tagihan sudah dikirimkan namun masih banyak pelanggan yang belum memenuhi kewajiban melunasi tunggakan selain juga sering terjadi kebocoran pekerjaan akibat Pembangunan parit jalan, sehingga suplai air kepada langganan tidak maksimal;
- q. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 lebih lebih rendah/tidak mencapai target dari Anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00 tercapai sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Rp1.220.156.042,00 atau 67,79% dengan selisih kurang sebesar Rp579.843.958,00. Tidak tercapainya target pendapatan tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran Masyarakat terkait dengan penggunaan PBG (Persetujuan Bangunan)/ SLF (Sertifikat Laik Fungsi, masih terbatasnya konsultan yang mempunyai Sertifikat Keahlian (SKA) untuk proses PBG/SLF di Kabupaten Rokan Hulu sehingga DMPTSP masih memakai konsultan dari luar Kabupaten Rokan Hulu dan masih banyak pemohon PBG/SLF yang lambat melengkapi persyaratan.

		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.300.000.000,00	2.398.005.508,00	2.114.662.284,00

Pada Tahun 2023 realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.398.005.508,00 atau 104,26% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp2.300.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp283.343.224,00 atau 13,40% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.114.662.284,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tersebut adalah pembagian dividen dari :

- 1) PT Bank Riau Kepri sebesar Rp1.690.162.237,00
- 2) Perumda BPR Rokan Hulu sebesar Rp707.843.271,00

		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	71.215.278.120,00	69.780.328.059,30	52.592.154.310,13

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Rokan Hulu TA 2023 sebesar Rp69.780.328.059,30 atau 97,99% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp71.215.278.120,00. Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp17.188.173.749,17 atau 32,68% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp52.592.154.310,13 dengan rincian sebagai berikut;

Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Hasil Penjualan Alat Angkutan	3.600.000.000,00	0,00	1.777.109.952,00
Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	15.000.000,00	0,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	9.044.925,00	135.747.726,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	3.376.375,00	0,00
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	5.668.550,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	3.300.000.000,00	1.948.877.409,83	2.369.326.318,25
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	940.148,00
Jasa Giro pada Rekening Dana Bos	0,00	177.549.059,00	470.637.606,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.651.000.000,00	281.849.316,00	549.391.535,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	40.299.250,00	2.000.458.716,00	9.541.167,00

we



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Lain-lain PAD yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.444.554.218,00	3.632.449.590,93	2.354.823.692,99
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan	0,00	0,00	614.225.539,36
Pendapatan denda pajak Hotel	0,00	2.005.413,00	38.000,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.001.223,00	19.154.469,00	15.444.065,00
Pendapatan denda pajak Hiburan	0,00	87.998,00	28.140,00
Pendapatan denda pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	0,00	9.708.979,00	14.130.674,00
Pendapatan denda pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	19.697.945,00	8.173.109,00
Pendapatan denda pajak Parkir	0,00	5.058.097,00	2.571.015,00
Pendapatan denda pajak Air Tanah	0,00	22.234,00	8.069,00
Pendapatan denda pajak sarang burung walet	0,00	481.740,00	482.080,00
Pendapatan Denda Retribusi Produksi Usaha Daerah	10.007.500,00	31.896.500,00	34.909.000,00
Pendapatan Dari Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	157.854.718,00	211.695.239,00	191.992.864,00
Pendapatan Dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri – Perjalanan Dinas Biasa	11.356.000,00	11.356.000,00	17.342.000,00
Pendapatan BLUD	57.984.555.211,00	61.347.584.428,54	43.955.541.609,53
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	12.650.000,00	56.350.000,00	69.750.000,00
Jumlah	71.215.278.120,00	69.780.328.059,30	52.592.154.310,13

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	1.724.931.194.042,00	1.697.148.794.040,00	1.376.524.490.105,00

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Rokan Hulu TA 2023 sebesar Rp1.697.148.794.040,00 atau 98,39% dari Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.724.931.194.042,00. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp320.642.750.747,00 atau 23,29% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.376.524.490.105,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.382.952.863.374,00	1.332.681.526.410,00	1.064.016.070.289,00
Pemerintah Pusat Lainnya	150.383.976.000,00	153.364.327.500,00	163.317.241.000,00
Pemerintah Transfer Antar Daerah	191.594.354.668,00	211.102.940.130,00	149.191.178.816,00
Jumlah	1.724.931.194.042,00	1.697.148.794.040,00	1.376.524.490.105,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.382.952.863.374,00	1.332.681.526.410,00	1.064.016.070.289,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebesar Rp1.332.681.526.410,00 atau 96,36% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.382.952.863.374,00 lebih rendah sebesar Rp268.665.456.121,00 atau 25,25% dari realisasi Tahun 2022 Rp1.064.016.070.289,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:			
Dana Bagi Hasil Pajak	115.172.266.859,00	100.172.266.859,00	87.597.180.127,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	286.490.979.370,00	265.590.979.370,00	114.397.541.000,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	679.644.550.000,00	678.915.439.397,00	642.058.489.477,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik	60.160.710.845,00	58.208.064.851,00	108.221.256.591,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	241.484.356.300,00	229.794.775.933,00	111.741.603.094,00
Jumlah	1.382.952.863.374,00	1.332.681.526.410,00	1.064.016.070.289,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.2.1 Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	401.663.246.229,00	365.763.246.229,00	201.994.721.127,00

Realisasi Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 sebesar Rp365.763.246.229,00 atau 91,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp401.663.246.229,00 Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 lebih tinggi sebesar Rp163.768.525.102,00 atau 81,08% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp201.994.721.127,00. Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil Terdiri dari:

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	115.172.266.859,00	100.172.266.859,00	87.597.180.127,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	286.490.979.370,00	265.590.979.370,00	114.397.541.000,00
Jumlah	401.663.246.229,00	365.763.246.229,00	201.994.721.127,00

Rincian Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai berikut:

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	115.172.266.859,00	100.172.266.859,00	87.597.180.127,00

Realisasi Dana Bagi hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp115.172.266.859,00 atau 86,98% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp100.172.266.859,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp12.575.086.732,00 atau 14,36% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp87.597.180.127,00. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pajak Bumi dan Bangunan	100.226.158.005,00	86.226.158.005,00	75.349.156.127,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	14.351.077.511,00	13.351.077.511,00	11.819.923.000,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25, 29	594.999.058,00	594.999.058,00	428.101.000,00
Cukai Hasil Tembakau	32.285,00	32.285,00	0,00
Jumlah	115.172.266.859,00	100.172.266.859,00	87.597.180.127,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp86.226.158.005,00 atau 86,03% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp100.226.158.005,00 Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp10.877.001.878,00 atau 14,44% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp75.349.156.127,00. Realisasi Bagi Hasil dari PPh pasal 21 Tahun 2023 sebesar Rp13.351.077.511,00 atau 93,03% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp14.351.077.511,00. Realisasi Bagi Hasil dari PPh pasal 21 Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp 1.531.154.511,00 atau 12,95% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.819.923.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN Tahun 2023 sebesar Rp594.999.058,00 atau 100% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp594.999.058,00. Realisasi Bagi Hasil dari PPh pasal 25 dan 29/WPSKPDN Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp166.898.058,00 atau 38,99% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp428.101.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2023 sebesar Rp 32.285,00 atau 100% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp32.285,00, sedangkan Tahun 2022 tidak terdapat Realisasi Cukai Hasil Tembakau (CHT).

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	286.490.979.370,00	265.590.979.370,00	114.397.541.000,00

Realisasi Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam Tahun 2023 sebesar Rp265.590.979.370,00 atau 92,70% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp286.490.979.370,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp151.193.438.370,00 atau 132,16% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp114.397.541.000,00. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) minyak bumi	227.935.983.446,00	209.035.983.446,00	97.198.965.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) gas bumi	9.329.935.711,00	9.329.935.711,00	3.994.893.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (land- rent)	37.570.997,00	48.709.997,00	56.402.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara (royalti)	4.551.963.718,00	4.540.824.718,00	2.892.430.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan	43.163.831.287,00	7.476.147.287,00	8.296.540.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
(PSDH)			
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.471.694.211,00	1.471.694.211,00	1.958.311.000,00
Jumlah	286.490.979.370,00	265.590.979.370,00	114.397.541.000,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum	679.644.550.000,00	678.915.439.397,00	642.058.489.477,00

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2023 adalah sebesar Rp678.915.439.397,00 atau 99,89% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp679.644.550.000,00. Realisasi DAU Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp36.856.949.920,00 atau 5,74% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp642.058.489.477,00.

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus	301.645.067.145,00	288.002.840.784,00	219.962.859.685,00

Realisasi DAK Tahun 2023 sebesar Rp288.002.840.784,00 atau 95,48% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp301.645.067.145,00. Realisasi DAK Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp68.039.981.099,00 atau 30,93% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp219.962.859.685,00 dengan rincian sebagai berikut:

Dana Alokasi Khusus		
DAK Fisik	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Bidang Pendidikan – Regular PAUD	551.602.000,00	550.788.100,00
Bidang Pendidikan – Regular SD	14.557.615.000,00	14.074.043.449,00
Bidang Pendidikan – Regular SMP	4.542.679.000,00	4.220.397.419,00
Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	11.606.568.559,00	11.128.281.539,00
Bidang Kesehatan dan KB- Reguler	352.734.000,00	252.494.000,00
Bidang Jalan – Penugasan Jalan	19.397.301.000,00	19.395.194.951,00
Bidang Kesehatan dan KB- Reguler Pengendalian Penyakit	111.030.400,00	93.586.000,00
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	9.041.180.886,00	8.493.279.393,00
JUMLAH	60.160.710.845,00	58.208.064.851,00

DAK Non Fisik	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
BOS Reguler	92.881.240.000,00	92.375.165.634,00
BOS Kinerja	2.030.000.000,00	2.030.000.000,00
TPG PNSD	93.847.132.000,00	91.033.351.660,00
Tamsil Guru PNSD	1.617.000.000,00	1.260.335.132,00
TKG PNSD	3.631.868.000,00	3.631.868.000,00
BOP PAUD	8.196.600.000,00	8.078.435.358,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

BOP Pendidikan Kesetaraan	2.021.200.000,00	2.020.912.501,00
BOKKB-BOK	29.298.626.300,00	23.462.796.134,00
BOKKB-BOKB	5.625.320.000,00	3.867.856.614,00
Fasilitasi Penanaman Modal	386.000.000,00	297.312.500,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	278.418.000,00
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.103.800.000,00	1.051.554.400,00
PK2UMK	406.770.000,00	406.770.000,00
JUMLAH	241.484.356.300,00	229.794.775.933,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.2.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	150.383.976.000,00	153.364.327.500,00	163.317.241.000,00

Transfer Pemerintah Pusat lainnya-Dana Penyesuaian merupakan Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Dana Insentif Daerah dan Insentif Fiskal dengan rincian sebagai berikut:

No	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Dana Insentif Daerah (DID)	10.513.250.000,00	13.493.601.500,00	25.497.828.000,00
2.	Dana Desa	139.870.726.000,00	139.870.726.000,00	137.819.413.000,00
	JUMLAH	150.383.976.000,00	153.364.327.500,00	163.317.241.000,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	191.594.354.668,00	211.102.940.130,00	149.191.178.816,00

Realisasi Penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar Rp211.102.940.130,00 atau 110,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp191.594.354.668,00. Penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 lebih tinggi sebesar Rp61.911.761.314,00 atau 41,50% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp149.191.178.816,00. Penerimaan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebagai berikut;

Pendapatan Transfer Antar Daerah			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak :	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	31.425.045.610,00	35.630.907.637,00	25.694.686.753,92
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	34.131.239.070,00	26.154.485.085,00	31.929.835.493,08
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan	41.468.651.650,00	66.280.442.135,00	39.705.815.016,00
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	1.113.365.043,00	1.413.296.802,00	1.349.623.408,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	26.779.903.627,00	25.642.648.203,00	28.958.343.145,00
Bantuan Keuangan Umum :			



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Transfer Antar Daerah			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak :	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus :			
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	56.676.149.668,00	55.981.160.268,00	21.552.875.000,00
JUMLAH	191.594.354.668,00	211.102.940.130,00	149.191.178.816,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	131.724.663,00	124.574.663,00	92.490.092.646,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 adalah sebesar Rp124.574.663,00 atau 94,57% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp131.724.663,00. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang sah Tahun 2023 lebih rendah sebesar Rp92.365.517.983,00 atau 99,87% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp92.490.092.646,00, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	131.724.663,00	124.574.663,00	92.490.092.646,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 adalah sebesar Rp124.574.663,00 atau 94,57% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp131.724.663,00. Penerimaan Pendapatan Hibah Tahun 2023 lebih rendah sebesar Rp92.365.517.983,00 atau 99,87% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp92.490.092.646,00, dengan rincian sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	92.490.092.646,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	131.724.663,00	124.574.663,00	0,00
Jumlah	131.724.663,00	124.574.663,00	92.490.092.646,00

Pada tahun 2023 untuk Dana BOS pada anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.2 Belanja	1.925.679.380.635,00	1.815.923.804.111,95	1.616.530.239.903,71

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.815.923.804.111,95 atau 94,30% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.925.679.380.635,00. Realisasi Belanja Tahun 2023 meningkat sebesar Rp19.9393.564.208,24 atau 12,33% dari realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp1.616.530.239.903,71. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.2.1 Belanja Operasi	1.285.098.923.522,00	1.194.920.933.139,95	1.108.927.587.073,14

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp1.194.920.933.139,95 atau 92,98% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.285.098.923.522,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp85.993.346.066,81 atau 7,75% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp1.108.927.587.073,14. Rincian Belanja Operasional sebagai



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

berikut:

Belanja Operasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	673.793.662.760,00	603.842.271.673,00	596.925.726.030,00
Belanja Barang/ Jasa	539.077.413.802,00	532.662.237.285,95	461.026.180.627,70
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	71.162.846.960,00	57.407.324.181,00	49.448.489.040,44
Belanja Bantuan Sosial	1.065.000.000,00	1.009.100.000,00	1.527.191.375,00
Jumlah	1.285.098.923.522,00	1.194.920.933.139,95	1.108.927.587.073,14

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	673.793.662.760,00	603.842.271.673,00	596.925.726.030,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp603.842.271.673,00 atau 89,62% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp673.793.662.760,00. Belanja Pegawai Tahun 2023 meningkat sebesar Rp6.916.545.643,00 atau 1,16% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp596.925.726.030,00 Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Gaji Pokok ASN	323.402.127.708,00	281.703.868.703,00	274.850.660.182,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	32.661.694.040,00	28.164.671.401,00	27.857.230.286,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.325.936.181,00	6.814.585.280,00	6.762.112.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.496.958.730,00	19.509.895.900,00	19.783.006.800,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.169.222.172,00	3.682.481.040,00	3.186.307.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	20.515.565.644,00	17.552.060.292,00	17.526.780.790,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	443.249.072,00	372.119.770,00	243.058.401,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.854.531,00	3.867.210,00	4.128.009,00
Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.156.118.690,00	15.445.727.272,00	16.255.278.288,00
Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	785.325.891,00	580.598.565,00	564.514.336,00
Belanja iuran Jaminan Kematian ASN	2.355.977.675,00	1.741.795.688,00	1.693.543.018,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	102.444.475.128,00	98.700.403.528,00	99.706.520.522,00
Pertimbangan Objektif lainnya	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	612.138.462,00	385.527.500,00	360.520.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	5.644.826.000	5.503.357.850,00	5.155.389.600,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.907.062.500,00	2.574.062.500,00	2.346.500.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.823.023.391,00	2.136.152.873,00	2.086.414.700,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	606.423.890,00	333.424.400,00	249.149.988,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	93.847.132.000,00	88.210.625.375,00	87.481.982.560,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.631.868.000,00	3.627.083.700,00	3.117.588.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.617.000.000,00	1.538.137.500,00	1.513.537.500,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium	99.360.000,00	64.200.000,00	138.600.000,00
Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.000.860.000,00	1.002.435.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	96.085.500,00	95.644.500,00	97.062.000,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	112.613.100,00	112.178.580,00	114.351.180,00
Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.743.000,00	85.900.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.451.247.000,00	1.453.530.750,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.659.600,00	134.101.800,00	135.380.700,00
Tunjangan Badan Musyawarah	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Komisi	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Badan Anggaran	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Badan Kehormatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.649.000.000,00	5.649.000.000,00	5.659.500.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.407.000.000,00	1.407.000.000,00	1.386.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.883.621,00	1.687.784,00	1.687.784,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.973.384.352,00	5.958.098.158,00	5.914.160.048,00
Tunjangan Perumahan	0,00	0,00	0,00
Tunjangan Kesehatan DPRD	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.370.000.000,00	8.370.000.000,00	8.385.000.000,00
Belanja Gaji Pokok KDHWKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.629.700,00	6.468.000,00	6.468.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.235.362,00	6.083.280,00	5.214.240,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.000.000,00	656.894,00	643.128,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2,00	1.330,00	720,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	257.520.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	500.000.000,00	499.800.000,00	396.000.000,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	994.690.000,00
Jumlah	673.793.662.760,00	603.842.271.673,00	596.925.726.030,00

Rincian Belanja Pegawai untuk pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah:

No.	Nama SKPD	Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	14.068.006.541,00	13.304.550.715,00	13.034.875.574,00
2	Sekretariat DPRD	27.928.531.353,00	27.703.890.414,00	27.901.752.376,00
3	Inspektorat	7.156.746.887,00	6.909.463.716,00	6.689.490.448,00
4	Bappeda	5.206.860.202,00	4.829.459.910,00	5.392.042.282,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	2.702.837.714,00	2.440.878.135,00	2.419.025.106,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.529.326.964,00	22.499.623.763,00	21.624.383.873,00
7	Badan Pendapatan Daerah	13.712.086.454,00	11.595.118.760,00	11.305.258.221,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.386.057.050,00	1.327.600.745,00	1.554.848.925,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.424.250.398,00	1.327.800.491,00	940.428.493,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	397.891.072.110,00	348.606.331.551,00	345.311.527.682,00
11	Dinas Kesehatan	77.782.463.385,00	74.454.029.037,00	71.909.646.168,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.050.244.830,00	6.541.962.349,00	6.256.218.169,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.336.906.044,00	6.847.917.895,00	6.844.394.572,00
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5.034.418.824,00	4.653.991.245,00	4.636.197.212,00
15	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	9.111.001.983,00	8.467.922.797,00	9.378.899.300,00
16	Dinas Peternakan dan Perkebunan	5.181.275.715,00	4.796.942.446,00	4.733.642.511,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No.	Nama SKPD	Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 (Rp)
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.961.185.004,00	2.724.774.518,00	2.692.343.285,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	2.203.704.754,00	1.963.796.151,00	2.055.804.035,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.243.732.951,00	2.107.905.552,00	1.844.426.856,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.739.323.879,00	2.435.451.474,00	2.411.024.330,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	1.772.137.006,00	1.542.562.810,00	1.799.307.481,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.236.318.522,00	3.122.323.469,00	3.016.969.266,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	2.608.146.752,00	2.297.213.320,00	2.364.130.213,00
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.509.239.816,00	2.315.547.408,00	2.358.700.293,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	4.943.452.634,00	4.717.704.149,00	4.618.031.720,00
26	Dinas Perhubungan	2.676.479.891,00	2.469.468.598,00	2.385.695.021,00
27	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3.040.500.495,00	2.751.945.833,00	2.193.316.302,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.357.221.185,00	2.127.425.299,00	1.830.499.448,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.899.405.105,00	4.647.415.423,00	4.509.881.294,00
30	Kecamatan Rambah	2.021.432.721,00	1.790.444.442,00	1.876.537.333,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	1.424.500.244,00	1.340.789.837,00	1.440.902.994,00
32	Kecamatan Kepenuhan	1.873.577.754,00	1.808.453.865,00	1.937.348.842,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	1.021.060.712,00	928.976.740,00	785.594.446,00
34	Kecamatan Tambusai	2.190.017.061,00	2.054.068.529,00	2.096.329.864,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	1.009.389.998,00	905.657.755,00	959.318.902,00
36	Kecamatan Bangun Purba	791.071.918,00	642.606.263,00	863.920.506,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	545.180.758,00	397.813.068,00	489.707.517,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	661.012.795,00	610.840.482,00	490.318.897,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	1.947.851.220,00	1.773.737.760,00	1.906.181.342,00
40	Kecamatan Rambah Samo	1.346.336.884,00	1.275.617.107,00	1.302.868.947,00
41	Kecamatan Ujungbatu	3.124.727.302,00	3.028.425.060,00	2.896.518.890,00
42	Kecamatan Kabun	1.880.459.105,00	1.859.084.759,00	1.723.176.271,00
43	Kecamatan Tandun	1.185.661.824,00	1.080.172.375,00	1.059.324.085,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	1.457.666.342,00	1.328.283.038,00	1.622.320.210,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	1.620.781.674,00	1.486.282.620,00	1.462.596.528,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	673.793.662.760,00	603.842.271.673,00	596.925.726.030,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa	539.077.413.802,00	532.662.237.285,95	461.026.180.627,70



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp532.662.237.285,95 atau 98,81% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp539.077.413.802,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp71.636.056.658,25 atau 15,54% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp461.026.180.627,70. Rincian belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Belanja Barang habis pakai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja bahan bangunan dan konstruksi	20.884.120,00	19.332.200,00	1.172.485.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.262.679.530,00	2.156.041.999,00	1.598.836.838,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.916.823.890,00	14.986.931.889,00	15.728.382.771,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	7.769.478.750,00	6.377.332.695,00	738.762.990,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	607.666.000,00	601.249.950,00	1.204.585.357,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	990.000,00	792.000,00	37.160.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	410.151.900,00	405.646.700,00	307.563.696,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	196.860.000,00	195.360.000,00	70.360.700,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.667.260.150,00	2.423.396.505,00	2.093.988.600,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	2.008.234.400,00	1.934.476.275,00	1.838.162.400,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	750.000.000,00	749.994.000,00	628.847.500,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	54.200.000,00	41.744.000,00	779.114.469,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.496.584.057,00	10.977.668.095,00	5.590.774.234,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.493.978.000,00	1.476.030.417,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.221.291.800,00	1.118.487.380,00	9.458.408.194,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	342.466.000,00	335.122.000,00	302.059.400,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.977.196.460,00	1.914.584.000,00	1.094.764.780,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.295.783.840,00	2.185.623.250,00	551.422.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.321.813.611,00	1.246.055.986,00	946.495.403,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	107.910.000,00	105.310.000,00	79.546.200,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan	8.874.000,00	8.864.000,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	708.550.000,00	647.171.500,00	91.130.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	585.468.750,00	572.321.450,00	123.580.000,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	3.128.104.450,00	2.784.932.527,00	5.910.547.742,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.066.934.700,00	2.526.979.850,00	131.959.460,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Barang habis pakai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	41.562.508.900,00	41.182.430.574,00	31.707.639.785,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.380.587.950,00	5.121.100.063,00	0,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.193.140.700,00	1.043.235.600,00	155.832.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	959.403.500,00	953.393.960,00	407.116.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	59.155.250,00	59.155.250,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.824.319.600,00	10.694.744.570,00	8.362.462.840,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.232.609.000,00	8.530.795.200,00	7.522.974.316,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	16.128.000,00	16.128.000,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.749.356.000,00	4.806.762.945,00	5.393.838.037,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	276.480.000,00	81.000.000,00	18.829.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	203.678.800,00	179.729.200,00	242.564.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	167.000.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	532.500.000,00	523.044.000,00	0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	32.500.000,00	32.370.000,00	0,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	36.000.000,00	35.964.000,00	13.495.576,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	593.232.000,00	565.200.250,00	331.250.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	655.445.000,00	651.908.300,00	717.800.000,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	87.700.000,00	87.564.000,00	161.050.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	46.500.000,00	46.268.000,00	77.877.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	2.500.000,00	0,00	67.500.000,00
Belanja Pakaian Teknik	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Belanja Pakaian Kerja Bengkel	300.000,00	300.000,00	0,00
Belanja Pakaian KORPRI	22.800.000,00	20.214.000,00	0,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	1.465.724.900,00	1.400.514.000,00	977.888.750,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	422.120.000,00	419.951.200,00	188.950.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	394.985.000,00	362.595.000,00	221.452.000,00
Belanja Pakaian Paskibraka	164.475.000,00	163.938.245,00	35.370.000,00
Belanja Pakaian Jas/Safari	54.000.000,00	53.280.000,00	0,00
Jumlah	144.478.334.008,00	132.913.035.025,00	107.249.827.538,00

Belanja barang tak habis pakai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00
Belanja pipa pipa plastic pvc (upvc)	20.950.000,00	16.756.000,00	9.621.000,00
jumlah	33.500.000,00	29.306.000,00	9.621.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Honorarium narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara dan panitia	5.453.820.000,00	4.750.072.499,00	2.030.699.646,00
Honorarium tim pelaksana kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan	18.164.947.674,00	17.050.925.454,00	13.132.848.050,00
Honorarium tim pelaksana kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Honorarium penyuluhan atau pendampingan	2.726.000.000,00	2.726.000.000,00	1.425.490.000,00
Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00	0	0,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	33.300.000,00	31.200.000,00	30.850.000,00
Honorarium Penyelenggara Ujian	235.100.000,00	50.100.000,00	0,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	49.100.000,00	49.100.000,00	50.000.000,00
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah	468.000.000,00	463.400.000,00	456.700.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	23.004.779.000,00	21.748.129.000,00	23.764.630.000,00
Belanja jasa tenaga kesehatan	14.739.553.000,00	12.929.471.919,00	11.688.730.000,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	364.613.000,00	320.570.000,00	392.597.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.064.600.000,00	2.058.145.782,00	1.988.900.000,00
Belanja jasa tenaga ketenteraman,ketertiban umum,dan perlindungan masyarakat	7.326.600.000,00	7.179.537.500,00	7.280.312.500,00
Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan	1.596.000.000,00	1.596.000.000,00	1.695.900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	600.000.000,00	600.000.000,00	450.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	95.400.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00
Belanja jasa teknis pertanian dan pangan	319.000.000,00	319.000.000,00	132.800.000,00
Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan	719.808.000,00	674.662.320,00	413.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.273.750.000,00	30.333.721.661,00	31.804.449.949,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.485.069.510,00	2.220.465.710,00	1.457.617.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.706.910.000,00	12.580.119.535,00	12.639.445.428,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.664.770.000,00	3.552.379.750,00	3.161.709.750,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	423.550.000,00	399.150.000,00	35.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	172.800.000,00	172.800.000,00	127.200.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	171.000.000,00	171.000.000,00	198.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	439.600.000,00	436.600.000,00	228.200.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	12.890.000,00	11.980.000,00	17.285.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	61.560.000,00	61.560.000,00	30.900.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	68.800.000,00	64.400.000,00	0,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	98.200.000,00	95.557.500,00	25.000.000,00
Belanja Jasa Kalibrasi	20.000.000,00	19.813.500,00	35.000.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	26.875.000,00	26.875.000,00	71.600.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	8.590.730.476,00	8.400.133.660,00	5.682.223.500,00
Belanja Tagihan Telepon	90.977.250,00	50.236.787,00	39.447.684,00
Belanja Tagihan Air	924.738.000,00	732.028.941,00	578.090.751,00
Belanja Tagihan Listrik	15.675.449.821,00	14.587.652.147,00	6.661.234.153,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	358.130.500,00	280.856.000,00	251.815.500,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.335.898.960,00	2.245.332.542,00	2.904.617.079,00
Belanja Paket/Pengiriman	29.500.000,00	25.934.200,00	1.496.000,00
Belanja Penambahan Daya	498.880.000,00	492.692.380,00	0,00
Belanja Registrasi/Keanggotaan	3.000.000,00	3.000.000,00	33.000.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	913.139.200,00	442.736.097,00	499.434.230,00
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	6.722.743.403,00
Belanja Medical Check Up	204.000.000,00	120.000.000,00	128.000.000,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00
Jumlah	159.366.639.391,00	150.314.939.884,00	138.372.266.623,00

Belanja iuran jaminan / asuransi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.850.000.000,00	1.847.368.548,00	1.164.478.068,00
Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	1.273.073.200,00	1.270.600.400,00	0,00
Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.195.011.000,00	9.171.253.390,00	0,00
Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3	522.606.000,00	522.606.000,00	7.539.028.575,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non asn	50.000.000,00	49.950.006,00	0,00
Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non asn	587.347.200,00	450.331.190,00	331.761.880,00
Belanja iuran jaminan kematian bagi non asn	734.184.000,00	562.014.009,00	414.805.674,00
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan	6.400.000,00	1.600.000,00	0,00
Jumlah	14.218.621.400,00	13.875.723.543,00	9.450.074.197,00

Belanja sewa peralatan dan mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Sewa Alat Pengangkat	1.800.000,00	0,00	3.600.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	134.550.000,00	51.750.000,00	46.575.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	415.250.000,00	387.350.000,00	26.250.000,00
Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	391.999.200,00	334.618.900,00	534.712.000,00
Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang	1.013.250.400,00	642.306.800,00	338.380.000,00
Belanja sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.000.000,00	0,00	0,00
Belanja sewa Alat Angkutan Darat bermotor lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Belanja sewa Alat Kantor lainnya	2.069.305.228,00	1.917.654.400,00	1.085.766.699,00
Belanja sewa mebel	452.297.500,00	410.827.820,00	143.360.000,00
Belanja sewa alat pendingin	20.000.000,00	20.000.000,00	10.930.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	673.750.000,00	616.950.000,00	455.687.000,00
Belanja sewa peralatan studio audio	0,00	0,00	3.000.000,00
Belanja sewa peralatan studio vidio dan film	45.000.000,00	42.600.000,00	77.000.000,00
Belanja sewa peralatan mini komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
Jumlah	5.302.202.328,00	4.508.057.920,00	2.725.260.699,00

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Sewa Bangunan Gudang Kantor	223.000.000,00	204.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0	7.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung tempat pertemuan	1.483.895.000,00	1.234.395.000,00	1.147.770.158,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	452.000.000,00	452.000.000,00	40.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00	0	287.000.000,00
Belanja Sewa mess/wisma/bungalow/ tempat peristirahatan	51.050.000,00	45.050.000,00	720.452.740,00
Belanja Sewa hotel	2.952.510.000,00	2.511.867.662,00	1.389.554.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Sewa motel	313.700.000,00	313.700.000,00	
Belanja Sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	470.640.000,00
Jumlah	5.532.155.000,00	4.797.012.662,00	4.062.917.248,00

Belanja Sewa aset tetap lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja sewa audio visual	138.000.000,00	136.308.000,00	135.000.000,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	11.760.000,00	9.520.000,00	6.280.000,00
Jumlah	149.760.000,00	145.828.000,00	141.280.000,00

Belanja jasa konsultasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	3.660.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	98.500.000,00
Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya	1.720.600.000,00	1.671.143.250,00	1.031.070.751,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	60.446.250,00	59.524.000,00	7.750.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	297.800.000,00	295.326.000,00	99.564.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	30.000.000,00	29.931.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	245.082.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	100.000.000,00	99.433.800,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	400.000.000,00	394.605.000,00	29.994.000,00
Belanja jasa konsultasi pengawas arsitektur	622.978.750,00	609.179.000,00	1.095.404.980,00
Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung	0,00	0,00	8.287.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	25.030.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	100.000.000,00	99.497.000,00	0,00
Belanja jasa konsultansi spesialis-jasa survey permukaan tanah	0,00	0,00	43.590.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	475.348.920,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	3.300.000,00	613.600,00	0,00
Belanja jasa konsultansi lainnya-jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan	275.000.000,00	148.667.850,00	267.777.300,00
Jumlah	3.627.075.000,00	3.424.870.500,00	3.431.059.451,00

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	12.711.720,00	12.711.720,00	11.508.480,00
Jumlah	12.711.720,00	12.711.720,00	11.508.480,00

Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment)	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	0,00	0,00	14.998.130,00
Jumlah	0,00	0,00	14.998.130,00

Belanja kursus/pelatihan,sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja kursus singkat/pelatihan	2.044.704.700,00	1.914.940.072,00	1.734.926.666,00
Belanja sosialisasi	2.164.740.000,00	2.076.540.000,00	3.440.490.000,00
Belanja bimbingan teknis	941.950.000,00	834.900.000,00	890.374.000,00
Jumlah	5.151.394.700,00	4.826.380.072,00	6.065.790.666,00

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00
Jumlah	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00

Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud - <i>Software</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Jumlah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
--------	--------------	--------------	------

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	33.750.000,00	33.266.700,00	33.363.000,00
Belanja Pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator	42.750.000,00	33.266.700,00	33.363.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	0,00	0,00	62.040.600,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- Darat Lainnya	150.000.000,00	147.852.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set	1.072.044.500,00	993.308.500,00	1.248.001.750,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	162.500.000,00	162.500.000,00	3.200.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan	250.000.000,00	248.961.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan	2.906.911.320,00	2.770.145.713,00	2.104.826.270,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang	292.816.190,00	272.582.740,00	965.684.254,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang	586.858.700,00	568.297.580,00	598.841.390,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua	47.910.000,00	39.573.400,00	60.100.600,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga	6.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus	0,00	0,00	265.000.000,00
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya	0,00	0,00	220.000,00
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat timbangan/biara	0,00	0,00	1.530.000,00
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-anak timbangan/biara	0,00	0,00	14.150.000,00
Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-takaran lainnya	0,00	0,00	625.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan	160.000.000,00	159.590.250,00	159.146.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Bermotor			
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (pengadaan)	44.198.000,00	17.950.000,00	35.900.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor	425.860.000,00	353.328.000,00	914.224.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-mebel	154.625.000,00	130.443.000,00	584.518.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pengukur waktu	0,00	0,00	100.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat bersih	0,00	0,00	1.332.245.800,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin	550.274.613,00	515.249.476,00	287.613.312,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat dapur	0,00	0,00	3.000.000,00
Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (home use)	45.000.000,00	43.750.000,00	112.250.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	8.000.000,00
Belanja pemeliharaan alat studio,komunikasidan pemancar-alat studio-peralatan studio audio	40.000.000,00	40.000.000,00	189.600.000,00
Belanja pemeliharaan alat studio,komunikasidan pemancar-alat studio-peralatan studio gambar	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum	100.000.000,00	98.830.000,00	74.998.260,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	45.310.000,00	44.905.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	26.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	0,00	0,00	741.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	99.400.500,00
Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer	521.650.000,00	492.485.000,00	294.210.000,00
Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mainframe	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer	253.370.400,00	237.939.878,00	187.765.000,00
Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan	0,00	0,00	95.000.000,00
Belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat pelindung lainnya	0,00	0,00	6.500.000,00
Belanja pemeliharaan rambu rambu-rambu rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar	50.000.000,00	49.866.076,00	39.925.384,00
Belanja pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Jumlah	8.022.448.723,00	7.534.711.013,00	9.862.583.370,00

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	1.140.964.000,00	1.102.252.556,00	1.303.230.252,00
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	50.000.000,00	42.359.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	255.000.000,00	245.591.971,00	84.798.290,30
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	428.000.000,00	368.000.000,00	515.179.400,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	70.000.000,00	67.280.000,00	0,00
Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah Negara golongan I	0,00	0,00	386.292.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	315.000.000,00	310.852.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Jumlah	2.276.044.000,00	2.153.415.527,00	2.289.499.942,30

Belanja pemeliharaan jalan,jaringan dan irigasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan jalan kabupaten	9.447.140.000,00	9.369.440.369,00	6.195.181.830,00
Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan-jembatan pada jalan kabupaten	500.000.000,00	499.955.725,00	697.674.678,00
Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi	1.314.188.000,00	1.081.662.177,00	999.479.151,00
Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai	9.500.000.000,00	9.475.878.750,00	2.486.691.410,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	199.944.406,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gas Lainnya	0,00	0,00	168.767.384,00
Belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif	0,00	0,00	48.700.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	0,00	0,00	34.844.988,20
Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik lainnya	700.000.000,00	694.814.566,00	688.138.152,99
Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
Jumlah	21.536.328.000,00	21.196.751.587,00	11.519.422.000,19

Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja pemeliharaan aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi	0,00	0,00	32.500.000,00
Jumlah	0,00	0,00	32.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja pemeliharaan aset tidak Berwujud	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	140.000.000,00	139.389.000,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	214.400.000,00	199.112.000,00	0,00
Jumlah	354.400.000,00	338.501.000,00	0,00

Belanja perjalanan dinas dalam negeri	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja perjalanan dinas biasa	22.364.789.000,00	18.779.760.200,00	52.913.870.332,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.316.000,00	50.316.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	45.686.154.000,00	41.708.983.590,00	0,00
Jumlah	68.113.259.000,00	60.551.059.790,00	52.913.870.332,00

Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja hadiah yang bersifat perombaan	1.295.609.401,00	1.212.672.401,00	687.637.500,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	9.000.000,00	9.000.000,00	687.637.500,00
Belanja Beasiswa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	118.772.000,00	118.772.000,00	0,00
Jumlah	2.423.381.401,00	2.340.444.401,00	710.637.500,00

Belanja Barang dan Jasa BOS	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BOS	40.000.000.000,00	67.537.419.747,00	64.218.665.752,00
Jumlah	40.000.000.000,00	67.537.419.747,00	64.218.665.752,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.451.859.131,00	56.134.768.894,95	47.944.397.699,21
Jumlah	58.451.859.131,00	56.134.768.894,95	47.944.397.699,21

Rincian Belanja Barang dan Jasa pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	45.711.767.314,00	42.623.956.417,00	36.266.614.384,00
2	Sekretariat DPRD	38.953.777.260,00	36.529.000.712,00	32.668.321.927,00
3	Inspektorat	5.511.248.205,00	4.734.001.889,00	3.273.603.520,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 (Rp)
4	Bappeda	6.067.462.323,00	4.972.740.030,00	2.741.109.252,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	7.302.517.424,00	5.941.675.425,00	4.773.175.041,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	10.988.723.132,00	9.767.249.936,00	9.085.128.316,00
7	Badan Pendapatan Daerah	5.625.532.861,00	5.336.217.611,00	4.663.183.410,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.460.940.400,00	4.374.701.180,00	1.467.554.750,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.390.044.200,00	2.178.846.176,00	4.310.828.660,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	79.922.277.800,00	104.387.931.166,00	104.015.590.083,00
11	Dinas Kesehatan	121.617.902.768,00	110.804.065.338,95	92.525.830.790,21
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.850.019.248,00	2.749.419.508,00	2.953.717.486,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	33.374.060.750,00	32.217.781.494,00	20.158.208.455,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	31.710.180.131,00	29.698.181.694,00	30.119.765.967,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	6.446.701.379,00	6.082.533.800,00	5.228.595.397,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	16.244.519.153,00	15.417.996.991,00	12.126.597.123,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	11.278.138.277,00	10.926.556.253,00	7.812.134.777,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	3.262.835.025,00	3.085.616.680,00	1.815.293.381,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	5.307.262.380,00	5.178.681.715,00	3.219.323.537,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	11.502.271.375,00	10.630.880.809,00	5.955.064.228,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	4.966.451.517,00	4.502.974.072,00	5.897.789.833,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.280.894.010,00	7.626.760.753,00	5.342.539.102,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	10.816.235.045,00	10.313.992.827,00	9.930.897.095,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	7.675.958.620,00	7.512.397.880,00	5.660.981.219,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.635.410.850,00	3.406.634.598,00	3.790.394.092,00
26	Dinas Perhubungan	12.602.981.400,00	12.122.843.162,00	10.520.435.946,49
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	2.086.734.000,00	1.995.165.206,00	1.767.236.534,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	11.459.871.357,00	11.428.006.388,00	7.374.950.294,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 (Rp)
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	13.096.941.100,00	12.613.616.088,00	12.919.207.847,00
30	Kecamatan Rambah	893.465.152,00	862.055.175,00	882.505.953,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	488.445.880,00	485.366.400,00	583.797.800,00
32	Kecamatan Kepenuhan	1.212.312.221,00	1.149.252.858,00	1.280.787.887,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	754.672.775,00	743.251.600,00	618.629.400,00
34	Kecamatan Tambusai	1.284.899.830,00	1.213.873.907,00	1.086.100.572,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	771.571.850,00	762.315.647,00	732.158.020,00
36	Kecamatan Bangun Purba	526.085.000,00	519.262.800,00	611.186.600,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	637.241.500,00	630.815.300,00	526.645.300,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	700.582.400,00	639.042.571,00	563.519.310,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	1.122.910.620,00	1.084.419.000,00	889.623.600,00
40	Kecamatan Rambah Samo	704.416.626,00	698.161.332,00	575.663.843,00
41	Kecamatan Ujungbatu	1.225.150.842,00	1.137.524.812,00	1.101.223.905,00
42	Kecamatan Kabun	601.440.765,00	597.241.033,00	471.463.264,00
43	Kecamatan Tandun	532.471.694,00	529.091.054,00	491.797.030,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	1.779.316.582,00	1.766.881.270,00	1.567.707.355,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	692.770.761,00	683.256.728,00	659.298.342,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	539.077.413.802,00	532.662.237.285,95	461.026.180.627,70

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.2.1.3 Belanja Hibah	71.162.846.960,00	57.407.324.181,00	49.448.489.040,44

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp57.407.324.181,00 atau 80,67% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp71.162.846.960,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp7.958.835.140,56 atau 16,10% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp49.448.489.040,44. Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.680.086.960,00	23.680.086.960,00	4.749.152.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	8.140.291.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.310.700.000,00	3.285.412.501,00	9.755.903.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	4.611.490.338,44
Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.196.400.000,00	7.078.235.358,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	3.285.000.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	22.875.120.000,00	13.077.519.424,00	12.153.094.652,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	9.536.120.000,00	5.721.649.938,00	5.632.745.050,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.544.420.000,00	2.544.420.000,00	1.120.813.000,00
Jumlah	71.162.846.960,00	57.407.324.181,00	49.448.489.040,44

Rincian Belanja Hibah pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran Belanja Hibah Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Hibah Tahun 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	3.195.000.000,00	3.195.000.000,00	4.150.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.529.506.960,00	23.529.506.960,00	1.330.813.000,00
3	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	42.768.340.000,00	29.037.817.221,00	32.572.338.040,44
4	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	661.230.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	8.140.291.000,00
6	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	0,00	0,00	388.260.000,00
7	Dinas Peternakan dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	8.025.000,00
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	200.000.000,00	200.000.000,00	1.497.532.000,00
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	400.000.000,00	375.000.000,00	0,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	700.000.000,00
	Jumlah	71.162.846.960,00	57.407.324.181,00	49.448.489.040,44

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	1.065.000.000,00	1.009.100.000,00	1.527.191.375,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp1.009.100.000,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

94,75% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.065.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp518.091.375,00 atau 33,92% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.527.191.375,00, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu	1.065.000.000,00	1.009.100.000,00	911.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	0,00	0,00	615.791.375,00
jumlah	1.065.000.000,00	1.009.100.000,00	1.527.191.375,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	550.000.000,00	508.000.000,00	200.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	10.000.000,00	4.100.000,00	0,00
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00
3	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	193.000.000,00	185.000.000,00	645.291.375,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	369.900.000,00
	Jumlah	1.065.000.000,00	1.009.100.000,00	1.527.191.375,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.3 Belanja Modal	374.806.820.303,00	356.642.073.590,00	244.048.047.090,57

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 adalah sebesar Rp356.642.073.590,00 atau 95,15% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp374.806.820.303,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp112.594.026.499,43 atau 46,14% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp244.048.047.090,57. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	1.479.609.400,00	1.388.769.000,00	6.857.269.200,00
2	Sekretariat DPRD	1.171.179.108,00	1.129.051.000,00	1.367.960.820,00
3	Inspektorat	577.784.100,00	552.440.000,00	0,00
4	Bappeda	1.548.762.700,00	1.509.711.100,00	1.202.796.400,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	317.077.666,00	314.964.000,00	104.285.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	467.099.800,00	439.196.500,00	1.211.018.027,00
7	Badan Pendapatan Daerah	393.305.900,00	382.071.485,00	537.537.500,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	97.928.250,00	97.928.250,00	129.257.723,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	122.693.850,00	111.120.000,00	3.435.398.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	72.963.385.750,00	59.473.597.792,00	92.305.131.904,58
11	Dinas Kesehatan	28.916.216.638,00	27.245.103.382,00	22.621.364.208,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	443.326.550,00	423.479.500,00	693.468.200,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	158.003.500.668,00	156.641.748.839,00	47.772.879.578,21
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	96.835.165.230,00	95.719.890.910,00	46.401.154.469,77
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	283.200.000,00	281.530.000,00	404.675.000,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	510.534.000,00	499.654.196,00	46.806.000,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	850.118.885,00	848.206.000,00	772.660.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	254.763.200,00	254.763.200,00	128.676.230,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	876.963.400,00	873.900.400,00	167.480.400,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	56.570.000,00	56.570.000,00	177.960.044,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	33.766.110,00	33.650.000,00	552.328.974,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	431.146.500,00	330.478.000,00	1.031.949.280,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	294.947.600,00	291.416.000,00	2.971.993.140,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	37.450.000,00	37.450.000,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.529.853.175,00	1.477.961.955,00	385.685.144,00
26	Dinas Perhubungan	1.030.867.525,00	1.021.666.315,00	1.788.373.992,91
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	653.287.500,00	652.853.000,00	8.386.811.808,10
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	796.171.200,00	746.957.491,00	642.189.500,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	2.599.334.323,00	2.591.905.000,00	871.152.750,00
30	Kecamatan Rambah	208.924.890,00	204.218.890,00	12.012.086,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	11.800.000,00	11.800.000,00	46.600.000,00
32	Kecamatan Kepenuhan	238.635.400,00	238.635.400,00	100.750.000,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	33.000.000,00	33.000.000,00	7.920.000,00
34	Kecamatan Tambusai	32.256.560,00	32.256.560,00	224.986.500,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	17.216.320,00	17.216.320,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	14.027.700,00	14.027.700,00	0,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	15.901.500,00	15.836.500,00	0,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	128.000.000,00	128.000.000,00	169.436.000,00
40	Kecamatan Rambah Samo	18.448.850,00	18.448.850,00	0,00
41	Kecamatan Ujungbatu	222.450.455,00	210.450.455,00	244.879.811,00
42	Kecamatan Kabun	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
43	Kecamatan Tandun	16.480.000,00	16.480.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
44	Kecamatan Kunto Darussalam	244.514.500,00	244.514.500,00	273.198.800,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	13.855.100,00	13.855.100,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	374.806.820.303,00	356.642.073.590,00	244.048.047.090,57

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.3.1 Belanja Tanah	0,00	0,00	149.670.000,00

Realisasi Belanja Modal-Tanah Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal-Tanah Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp149.670.000,00 atau 100% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp149.670.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	0,00	0,00	149.670.000,00
Jumlah	0,00	0,00	149.670.000,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.3.2 Belanja Peralatan Dan Mesin	61.239.868.857,00	50.670.206.258,00	66.006.237.949,50

Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebesar Rp50.670.206.258,00 atau 82,74% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp61.239.868.857,00. Realisasi Belanja Modal – Peralatan dan Mesin Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp15.336.031.691,50 atau 23,23% dibanding Tahun 2022 sebesar Rp66.006.237.949,50 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Mesin Proses	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Belanja Modal <i>Compressor</i>	0,00	0,00	154.500.000,00
Belanja Modal <i>Electric Generating Set</i>	200.000.000,00	199.500.000,00	219.350.000,00
Belanja Modal Pompa	355.820.000,00	355.320.000,00	390.610.400,00
Belanja Modal Mesin Proses	925.000.000,00	899.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	830.000.000,00	830.000.000,00	381.366.939,00
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	550.000.000,00	529.900.000,00	1.205.812.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.850.000.000,00	1.784.800.000,00	3.856.900.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	2.131.906.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.129.590,00	33.520.000,00	559.528.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	220.000.000,00	208.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.411.215.600,00	1.409.862.000,00	399.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	3.500.000,00
Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	79.780.000,00	49.380.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	14.340.000,00	14.200.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	140.000.000,00	139.330.000,00	79.698.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	19.000.000,00	13.700.000,00	135.315.000,00
Belanja Modal Alat Panen	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	8.059.000,00	8.055.000,00	0,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	25.693.200,00	25.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	179.483.870,00	174.493.410,00	208.618.440,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	815.604.500,00	802.751.210,00	555.196.840,00
Belanja Modal Mebel	2.129.051.120,00	2.067.912.632,00	2.024.049.747,00
Belanja Modal Alat Pembersih	87.272.250,00	85.159.750,00	83.072.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	707.691.824,00	695.224.000,00	638.926.394,00
Belanja Modal Alat Dapur	102.075.000,00	99.775.000,00	108.400.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	825.613.375,00	806.411.675,00	1.374.992.678,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	362.977.000,00	360.664.000,00	756.901.250,00
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	99.532.000,00	97.482.000,00	138.298.500,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	25.000.000,00	24.475.500,00	76.701.296,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	116.500.000,00	114.560.500,00	94.235.500,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	40.000.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	122.843.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	18.720.000,00	18.720.000,00	7.770.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	104.800.000,00	104.588.250,00	341.610.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	82.948.500,00	74.835.400,00	431.561.400,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	9.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	15.000.000,00	15.000.000,00	37.440.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	29.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Switcher/Menara Antena	400.000.000,00	399.422.000,00	2.695.234.000,00
Belanja Modal Program Input Equipment	55.000.000,00	54.834.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	72.000.000,00	71.225.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	10.318.920.276,00	9.617.769.667,00	782.668.110,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	1.118.000.408,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	60.000.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.901.030.399,00	6.626.136.779,00	2.560.875.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00	0,00	147.000.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	522.084.932,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	0,00	0,00	185.780.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	0,00	0,00	173.390.000,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	2.542.657.399,00	2.171.670.788,00	49.950.000,00
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	195.241.500,00	195.026.500,00	433.999.665,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	2.647.928.000,00	2.639.869.000,00	24.291.474.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00
Belanja Modal Komputer Jaringan	9.500.000,00	9.500.000,00	137.065.000,00
Belanja Modal Personal Computer	4.772.857.200,00	4.709.027.872,00	2.001.343.001,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	30.000.000,00	29.637.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	18.000.000,00	18.000.000,00	339.728.500,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	140.386.550,00	138.264.000,00	50.511.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.336.521.580,00	1.276.050.450,00	759.514.700,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	46.100.000,00	45.825.000,00	51.691.234,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	51.263.000,00
Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	30.500.000,00
Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	5.451.000,00
Belanja Modal Sepatu Lapangan	0,00	0,00	13.200.000,00
Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	38.700.000,00
Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	70.300.000,00
Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan	350.000.000,00	249.760.000,00	330.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Percontohan Lainnya			
Belanja Modal Rambu Bersuar	585.000.000,00	580.709.400,00	837.955.250,50
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	147.500.000,00	145.581.450,00	148.459.000,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	21.518.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	4.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.000.000.000,00	6.542.492.257,00	9.727.766.782,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.034.219.124,00	2.810.124.768,00	1.764.551.983,00
Jumlah	61.239.868.857,00	50.670.206.258,00	66.006.237.949,50

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	1.454.109.400,00	1.363.269.000,00	6.594.971.500,00
2	Sekretariat DPRD	831.629.108,00	808.953.000,00	947.026.000,00
3	Inspektorat	552.784.100,00	552.440.000,00	0,00
4	Bappeda	759.250.700,00	750.778.800,00	1.089.165.400,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	317.077.666,00	314.964.000,00	104.285.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	332.099.800,00	324.993.000,00	984.193.500,00
7	Badan Pendapatan Daerah	278.305.900,00	267.166.485,00	143.406.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	97.928.250,00	97.928.250,00	129.257.723,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	122.693.850,00	111.120.000,00	2.518.449.900,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	19.024.178.800,00	10.548.679.257,00	39.265.054.461,00
11	Dinas Kesehatan	26.715.416.638,00	25.080.093.382,00	7.417.088.969,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	443.326.550,00	423.479.500,00	693.468.200,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.292.620.000,00	2.201.212.232,00	77.779.410,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	728.165.230,00	726.710.510,00	835.025.000,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	133.200.000,00	133.200.000,00	83.979.000,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	380.534.000,00	372.668.046,00	46.806.000,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	269.456.385,00	268.806.000,00	523.190.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	179.763.200,00	179.763.200,00	128.676.230,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	198.465.000,00	198.299.000,00	57.314.000,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	56.570.000,00	56.570.000,00	175.960.044,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	33.766.110,00	33.650.000,00	303.867.074,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	431.146.500,00	330.478.000,00	764.949.280,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	294.947.600,00	291.416.000,00	49.950.000,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	37.450.000,00	37.450.000,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	733.853.175,00	733.853.175,00	101.996.694,00
26	Dinas Perhubungan	990.867.525,00	981.758.850,00	1.764.474.928,50
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	553.287.500,00	552.853.000,00	83.460.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	571.171.200,00	525.607.491,00	147.835.500,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.750.564.000,00	1.743.480.000,00	871.152.750,00
30	Kecamatan Rambah	71.108.940,00	66.499.350,00	12.012.086,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	11.800.000,00	11.800.000,00	41.000.000,00
32	Kecamatan Kepenuhan	163.635.400,00	163.635.400,00	0,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	33.000.000,00	33.000.000,00	7.920.000,00
34	Kecamatan Tambusai	32.256.560,00	32.256.560,00	10.586.500,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	17.216.320,00	17.216.320,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	14.027.700,00	14.027.700,00	0,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	15.901.500,00	15.836.500,00	0,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	3.000.000,00	3.000.000,00	8.900.000,00
40	Kecamatan Rambah Samo	10.448.850,00	10.448.850,00	0,00
41	Kecamatan Ujungbatu	162.695.800,00	150.695.800,00	12.838.000,00
42	Kecamatan Kabun	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
43	Kecamatan Tandun	16.480.000,00	16.480.000,00	0,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	94.514.500,00	94.514.500,00	10.198.800,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	13.855.100,00	13.855.100,00	0,00
	Jumlah	61.239.868.857,00	50.670.206.258,00	66.006.237.949,50

		Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.3.3	Belanja Gedung Dan Bangunan	66.316.975.890,00	64.342.140.106,00	89.832.903.897,07

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp64.342.140.106,00 atau 97,02% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp66.316.975.890,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp25.490.763.791,07 atau 28,38% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp89.832.903.897,07 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	11.901.980.000,00	11.512.841.230,00	7.715.431.305,98
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	0,00	0,00	717.058.700,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	2.042.719.540,00	2.036.929.540,00	15.005.915.239,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Kesehatan			
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.300.000.000,00	1.245.291.000,00	397.521.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	500.000.000,00	497.407.000,00	198.919.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	46.413.977.950,00	45.059.244.471,00	51.621.675.039,58
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.450.000.000,00	1.434.251.000,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	400.000.000,00	399.100.000,00	99.800.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	49.965.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	8.303.351.808,10
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	89.468.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	662.498.400,00	659.759.400,00	83.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	267.880.064,41
Belanja Modal Taman	400.000.000,00	398.745.000,00	4.058.200.040,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	52.000.000,00	39.907.465,00	178.511.900,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	157.686.100,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	0,00	0,00	10.400.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	0,00	98.200.000,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	300.000.000,00	198.666.000,00	198.800.000,00
Belanja Modal Pagar	715.000.000,00	711.198.000,00	278.000.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	104.760.700,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	170.800.000,00	140.800.000,00	198.360.000,00
Jumlah	66.316.975.890,00	64.342.140.106,00	89.832.903.897,07

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	174.243.700,00
2	Sekretariat DPRD	294.550.000,00	276.253.000,00	420.934.820,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00
4	Bappeda	226.000.000,00	224.497.300,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	196.824.527,00
7	Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	99.905.000,00	199.715.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	916.948.700,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	46.413.977.950,00	45.059.244.471,00	51.721.313.039,58
11	Dinas Kesehatan	2.200.800.000,00	2.165.010.000,00	15.204.275.239,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	166.430.000,00	166.130.000,00	199.693.000,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	14.645.000.000,00	14.140.568.000,00	8.075.615.508,98
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	150.000.000,00	148.330.000,00	320.696.000,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	100.000.000,00	97.086.150,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	500.000.000,00	498.900.000,00	99.800.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	562.498.400,00	560.159.400,00	104.400.000,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	248.461.900,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	267.000.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	2.922.043.140,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	697.000.000,00	645.429.780,00	283.688.450,00
26	Dinas Perhubungan	40.000.000,00	39.907.465,00	23.899.064,41
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	50.000.000,00	50.000.000,00	8.303.351.808,10
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	75.000.000,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Rambah	12.719.540,00	12.719.540,00	0,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Kepenuhan	75.000.000,00	75.000.000,00	45.000.000,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tambusai	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Rambah Samo	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
41	Kecamatan Ujungbatu	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Kabun	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	0,00	0,00	30.000.000,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	0,00	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	66.316.975.890,00	64.342.140.106,00	89.832.903.897,07

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.3.4 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	237.391.301.733,00	235.512.051.262,00	85.881.648.940,00

Realisasi Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 adalah sebesar Rp235.512.051.262,00 atau 99,21% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp237.391.301.733,00. Realisasi Belanja Modal – Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 mengalami penurunan Rp149.630.402.322,00 atau 174,23% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp85.881.648.940,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Jalan Kabupaten	88.029.301.000,00	87.083.681.936,00	39.111.820.865,50
Belanja Modal Jalan Desa	46.162.096.410,00	45.931.568.900,00	16.460.404.543,25
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	49.414.149.668,00	49.344.457.208,00	1.094.629.900,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	950.000.000,00	747.649.000,00	795.620.400,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	170.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	327.000.000,00	326.257.713,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.809.754.655,00	3.799.304.105,00	4.427.185.722,71
Belanja Modal Bangunan Pengaman	6.775.000.000,00	6.752.461.900,00	2.066.150.280,00
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	0,00	0,00	512.577.811,00
Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	200.000.000,00	199.756.500,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	125.000.000,00	124.518.000,00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	40.349.000.000,00	39.959.582.000,00	13.944.845.767,54
Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	0,00	0,00	6.406.918.650,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	750.000.000,00	746.116.000,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas	200.000.000,00	198.952.000,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi	300.000.000,00	297.746.000,00	891.495.000,00
Jumlah	237.391.301.733,00	235.512.051.262,00	85.881.648.940,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	155.544.450.668,00	154.274.406.607,00	47.495.407.168,21
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	81.362.000.000,00	80.752.890.000,00	37.490.513.960,79
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
6	Kecamatan Rambah	125.096.410,00	125.000.000,00	0,00
7	Kecamatan Kepenuhan	0,00	0,00	55.750.000,00
8	Kecamatan Tambusai	0,00	0,00	214.400.000,00
9	Kecamatan Rokan IV Koto	125.000.000,00	125.000.000,00	160.536.000,00
10	Kecamatan Ujungbatu	59.754.655,00	59.754.655,00	232.041.811,00
11	Kecamatan Kunto Darussalam	150.000.000,00	150.000.000,00	233.000.000,00
	Jumlah	237.391.301.733,00	235.512.051.262,00	85.881.648.940,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.3.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	9.778.673.823,00	6.038.713.964,00	2.177.586.304,00

Realisasi Belanja Modal-Aset Tetap lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.038.713.964,00 atau 61,75% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp9.778.673.823,00. Realisasi Belanja Modal – Aset Tetap lainnya Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.861.127.660,00 atau 177,31% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.177.586.304,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Aset Tetap Lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Audio Visual	21.509.000,00	21.509.000,00	387.940.000,00
Belanja Modal Musik Lainnya	0,00	0,00	14.104.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Belanja Modal Alat Musik	852.490.323,00	852.145.000,00	124.900.000,00
Belanja Modal Maket. Miniatur. Replika. Foto Dokumen. Dan Benda Bersejarah	136.000.000,00	135.442.000,00	0,00
Belanja Modal Barang Kerajinan	80.662.500,00	80.500.000,00	0,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	5.766.400,00
Belanja Modal Barang Kerajinan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Belanja Modal Software	1.158.012.000,00	1.078.672.900,00	426.011.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.500.000.000,00	3.840.445.064,00	1.218.864.404,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	30.000.000,00	29.900.000,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00	49.062.000,00	0,00
Jumlah	9.778.673.823,00	6.038.713.964,00	2.177.586.304,00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	25.500.000,00	25.500.000,00	88.054.000,00
2	Sekretariat DPRD	45.000.000,00	43.845.000,00	0,00
3	Inspektorat	25.000.000,00	0,00	0,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	513.512.000,00	485.373.000,00	113.631.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	135.000.000,00	114.203.500,00	30.000.000,00
6	Badan Pendapatan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	194.416.500,00
7	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	7.525.229.000,00	3.865.674.064,00	1.318.764.404,00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	100.000.000,00	99.722.400,00	0,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80.662.500,00	80.500.000,00	0,00
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	116.000.000,00	115.442.000,00	5.766.400,00
11	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	2.000.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.000.000,00	98.679.000,00	0,00
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	200.000.000,00	196.350.000,00	419.354.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	848.770.323,00	848.425.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

	Kebakaran			
15	Kecamatan Rambah Hilir	0,00	0,00	5.600.000,00
Jumlah		9.778.673.823,00	6.038.713.964,00	2.177.586.304,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.3.5 Belanja Modal Aset Lainnya	80.000.000,00	78.962.000,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset lainnya Tahun 2023 adalah sebesar Rp78.962.000,00 atau 98,70% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp80.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset lainnya Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	30.000.000,00	29.900.000,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00	49.062.000,00	0,00
Jumlah	80.000.000,00	78.962.000,00	0,00

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya pada masing-masing SKPD untuk Tahun anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000,00	49.062.000,00	0,00
2	Dinas Peternakan dan Perkebunan	30.000.000,00	29.900.000,00	0,00
Jumlah		80.000.000,00	78.962.000,00	0,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.4 Belanja Tak Terduga	9.335.520.000,00	9.153.526.845,00	26.553.965.877,00

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 adalah sebesar Rp9.153.526.845,00 atau 98,05% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp9.335.520.000,00. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp17.400.439.032,00 atau 65,53% dibanding realisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp26.553.965.877,00.

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.5. Belanja Transfer	256.438.116.810,00	255.207.270.537,00	237.000.639.863,00

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 adalah sebesar Rp255.207.270.537,00 atau 99,52% dari anggaran sebesar Rp256.438.116.810,00. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp18.206.630.674,00 atau 7,68% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp237.000.639.863,00.

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.5.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	8.436.611.187,00	7.205.792.096,00	6.664.212.649,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2023 sebesar Rp7.205.792.096,00 atau 85,41% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp8.436.611.187,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp541.579.447,00 atau 8,13% dibanding realisasi Tahun 2022 sebesar Rp6.664.212.649,00, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rambah	290.277.294,00	285.476.698,00	344.388.572,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rambah Samo	291.699.995,00	290.030.845,00	283.672.181,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rambah Hilir	446.501.524,00	442.770.626,00	363.087.801,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Tandun	508.739.828,00	508.739.828,00	522.498.922,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Tambusai	608.013.775,00	607.525.015,00	582.702.636,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Tambusai Utara	3.390.512.373,00	2.223.294.743,00	1.696.645.942,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Bangun Purba	109.055.164,00	107.802.005,00	154.895.572,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kepenuhan	784.484.020,00	784.484.020,00	692.012.435,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Ujung Batu	112.476.249,00	112.476.249,00	83.572.545,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Rokan IV Koto	125.856.335,00	120.999.719,00	113.717.920,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kunto Darussalam	562.963.927,00	562.893.927,00	667.483.822,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kabun	281.373.399,00	281.308.703,00	273.961.096,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Bonai Darussalam	607.639.490,00	598.980.083,00	556.034.186,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Pagaran Tapah	29.664.319,00	29.664.319,00	29.266.871,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Kepenuhan Hulu	134.990.058,00	97.462.779,00	161.281.092,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kecamatan Pandalian IV Koto	152.363.437,00	151.882.537,00	138.991.056,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Jumlah	8.436.611.187,00	7.205.792.096,00	6.664.212.649,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.5.2. Belanja Bantuan Keuangan	248.001.505.623,00	248.001.478.441,00	230.336.427.214,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp248.001.478.441,00 atau 100% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp248.001.505.623,00. Rincian Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari:

BELANJA BANTUAN KEUANGAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	248.001.505.623,00	248.001.478.441,00	223.297.561.214,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	0,00	0,00	7.038.866.000,00
Jumlah	248.001.505.623,00	248.001.478.441,00	230.336.427.214,00

Rincian Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa adalah sebagai berikut:

Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
Dana Desa (DD)	139.870.726.000,00	137.819.413.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)	108.130.752.441,00	85.478.148.214,00
Jumlah	248.001.478.441,00	223.297.561.214,00

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.6 Surplus/Defisit	(43.440.071.942,00)	29.890.093.589,27	(39.193.130.429,56)

Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2023 adalah sebesar Rp29.890.093.589,27 atau 68,81% dari anggaran Tahun 2023 sebesar (Rp43.440.071.942,00). Realisasi Surplus Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp69.083.224.018,83 176,26% dari realisasi Tahun 2022 sebesar (Rp39.193.130.429,56). Rincian perhitungan Surplus/Defisit Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Pendapatan	1.845.813.897.701,22	1.577.337.109.474,15
2.	Belanja	1.815.923.804.111,95	1.616.530.239.903,71
3.	Surplus/Defisi (1-2)	29.890.093.589,27	(39.193.130.429,56)

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.7 Pembiayaan	43.440.071.942,00	43.434.516.941,81	83.633.202.731,37

Realisasi Pembiayaan daerah netto Tahun 2023 adalah sebesar Rp43.434.516.941,81 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp43.440.071.942,00 dan Tahun 2022 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Rp83.633.202.371,37. Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.7.1 Penerimaan Pembiayaan	44.440.071.942,00	44.433.516.941,81	6.766.004.179,10

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp44.434.516.941,81 merupakan dari penerimaan kembali pinjaman daerah dan Penggunaan Silpa Tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.7.1.1 Penggunaan Silpa Tahun Lalu	44.440.071.942,00	44.433.516.941,81	83.633.202.371,37

SilPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp44.440.071.942,00 sedangkan penggunaan SilPA Tahun lalu 2022 adalah sebesar Rp44.433.516.941,81.

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.7.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.000.000,00	0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Penerimaan pembiayaan Tahun 2023 adalah pengembalian dari Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi, dan Tenaga kerja sebesar Rp1.000.000,00.

	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
5.1.8 SILPA	0,00	73.324.610.531,08	44.440.071.941,81

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu periode Tahun 2023 atas Laporan Keuangan yang disajikan berada pada kondisi Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Rp73.324.610.531,08. Hal tersebut adalah dari perhitungan nilai Surplus/Defisit Tahun 2023 Rp29.890.093.589,27 yaitu selisih antara realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp1.845.813.897.701,22 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.815.923.804.111,95 dan pembiayaan netto Rp43.434.516.941,81 selama satu periode pelaporan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Kas Daerah dan Dana Desa (Rp)	BLUD (Rp)	BOS dan PAUD (Rp)	BOK	Jumlah (Rp)
a.Pendapatan	1.655.911.069.779,68	61.347.584.428,54	106.503.371.493,00	22.501.872.000,00	1.845.813.897.701,22
b.Belanja	1.633.361.284.896,00	59.085.693.662,95	106.818.874.289,00	22.501.872.000,00	1.815.923.804.111,95
c.Surplus Defisit (a-b)	22.549.784.883,68	2.261.890.765,59	(315.502.796)	0,00	29.890.093.589,27
d.SilPA Tahun lalu (saldo Awal Kas – PFK)	40.021.987.279,90	3.702.323.043,91	715.761.618,00	0,00	44.440.071.941,81
e.Pembiayaan Netto	(999.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	(999.000.000,00)
f.Koreksi SilPA Tahun lalu	0,00	0,00	(6.555.000,00)		(6.555.000,00)
g.SILPA Tahun berjalan (c+d+e+f)	61.572.772.163,58	5.964.213.809,50	393.703.822,00	0,00	73.324.610.531,08



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Posisi Kas di Neraca (SiLPA) dengan rincian:

1	Kas di Kas Daerah	:	61.557.090.232,58
2	Kas di Bendahara Penerimaan	:	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	:	15.681.931,00
4	Kas di Bendahara BLUD	:	5.964.213.809,50
5	Kas di bendahara BOS	:	393.703.822,00
6	Kas Lainnya	:	5.393.920.736,00
7	Setara Kas	:	0,00
Jumlah Saldo Kas			73.324.610.531,08
8	Saldo PFK	:	0,00



5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari Laporan Keuangan Tahun 2023. Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2023 sebesar Rp44.440.071.942,00 dan saldo 2022 sebesar Rp86.398.929.423,37.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp44.433.516.941,81.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp73.324.610.531,0800 dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Surplus/ (Defisit) LRA	29.890.093.589,27	(39.193.130.429,56)
Pembiayaan	43.434.516.941,81	83.633.202.371,37
SILPA di LRA (Pembiayaan+ Defisit)	73.324.610.531,08	44.440.071.941,81

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.555.000,00) Koreksi ini adalah kareksi atas saldo kas di Kas BOS karena merupakan saldo kas pada 3 sekolah Swasta dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sekolah	Jumlah
1	SD Swasta YLPMD Bonai	3.480.000,00
2	SD Swasta Putri Sion Yusmarsah	2.435.000,00
3	SMP SwastaPutri Sion Yusmarsah	640.000,00
	Jumlah	6.555.000,00

5.2.5 Lain-lain

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL sebesar Rp0,00.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp73.324.610.531,08 dan Rp44.440.071.941,81.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3	Aset	3.655.296.923.891,80	3.382.713.418.813,28

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.655.296.923.891,80 dan Rp3.382.713.418.813,28 mengalami penurunan Rp272.583.505.078,52 atau sebesar 8,06%

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1	Aset Lancar	141.406.633.662,83	106.466.504.376,50

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp141.406.633.662,83 dan Rp106.466.504.376,50 mengalami penurunan sebesar Rp34.940.129.286,33 atau sebesar 32,82%

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1	Kas	73.324.610.531,08	44.472.783.789,81

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp73.324.610.531,08 dan Rp44.472.783.789,81 mengalami kenaikan sebesar Rp28.851.826.741,27 atau 64,88%, kas tersebut terdiri dari:

URAIAN	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	61.557.090.232,58	39.983.288.029,90
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.681.931,00	38.699.250,00
Kas di BLUD	5.964.213.809,50	3.702.323.043,91
Kas di Bendahara BOS	393.703.822,00	715.761.618,00
Kas Lainnya	5.393.920.736,00	32.711.848,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	73.324.610.531,08	44.472.783.789,81

Adapun penjelasan masing-masing rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.1	Kas di Daerah	61.557.090.232,58	39.983.288.029,90

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp61.557.090.232,58 dan Rp39.988.883.472,90. Kas di Kas Daerah merupakan kas di Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan rincian sebagai berikut,

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Rekening (Rp)	
			31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5
A				
1	Rekening Kas Umum Daerah			
-	PT Bank Riau Kepri	115-0200-400	61.550.738.154,92	40.093.190.371,23
-	BSI	1210199914	3.402.791,66	
		JUMLAH A	61.554.140.946,58	40.093.190.371,23
B	Rekonsiliasi			
	Koreksi Penambahan:			
1.	Pengenaan Biaya Administrasi Oleh bank		0,00	15.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo Rekening (Rp)	
			31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.	Koreksi atas bank lebih posting penyetoran PPN		0,00	9.000,00
3.	Koreksi Pengembalian Dana ADD		0,00	10.000,00
	Lebih Posting SP2D Pada Kantor Camat Pagaran Tapah		500,00	0,00
	Lebih Posting SP2D Pada Kantor Camat Kepenuhan		16,00	0,00
	Lebih Posting SP2D Pada Dinas Pendidikan		100,00	0,00
	Kurang Posting Pengembalian Sisa UP pada Sekretariat Daerah		20,00	0,00
	Dua kali Posting Pajak pada Sekretariat DPRD		3.460.000,00	0,00
	Jumlah Penambahan		3.460.636,00	34.000,00
	Koreksi Pengurangan:			0,00
1.	SP2D Out Standing		0,00	78.581.300,00
2.	Salah Setor Pajak Negara oleh SKPD		0,00	3.730.766,00
3.	Kurang Posting SP2D Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		200,00	200,00
4.	Kurang Posting atas PFK Galian C		0,00	200,00
5.	PPN yang belum diposting oleh Bank		0,00	19.762.243,00
6.	PFK lainnya belum diposting oleh Bank		511.150,00	2.266.188,95
5.	Kurang Posting SP2D Pembulatan di belakang Koma		0,00	0,38
	Jumlah Pengurangan		511.350,00	104.340.898,33
	JUMLAH B (penambahan-pengurangan)		2.949.286,00	(104.306.898,33)
	JUMLAH(A+B)		61.557.090.232,58	39.988.883.472,90

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	15.681.931,00	38.699.250,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa dana SP2D di setor ke Kas Daerah dan Kas Negara per 31 Desember 2023, kondisi akhir Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.681.931,00 dan Rp38.699.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
A	Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran yang merupakan Sisa SP2D		
1.	Badan Pendapatan Daerah	4.956,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	3.000.000,00	0,00
3.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	710.886,00	38.699.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

No	Nama Rekening	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4.	Dinas tanaman Pangan dan Holtikultura	1.450.000,00	0,00
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja	342.039,00	0,00
5.	Kecamatan Ujung batu	10.174.050,00	0,00
	Jumlah	15.681.931,00	38.699.250,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.4	Kas di Bendahara BLUD	5.964.213.809,50	3.702.323.043,91

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.964.213.809,50 dan Rp3.702.323.043,91. Saldo Kas di Bendahara BLUD merupakan kas yang berada pada Bendahara BLUD Rokan Hulu di RSUD dan 21 Puskesmas per 31 Desember 2022. Rincian Kas pada Bendahara BLUD terdiri dari:

NO	BLUD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
A.	RSUD :		
1.	RSUD	4.353.665.859,23	2.054.454.865,69
B.	PUSKESMAS :		
1.	Puskesmas Rambah	65.189.293,07	187.618.958,50
2.	Puskesmas Rambah Samo I	124.778.815,85	91.742.252,42
3.	Puskesmas Rambah Samo II	81.970.988,25	6.739.222,66
4.	Puskesmas Rambah Hilir I	117.494.068,92	188.980.143,94
5.	Puskesmas Rambah Hilir II	166.118.283,14	76.880.149,31
6.	Puskesmas Tandun I	59.661.445,44	99.464.775,70
7.	Puskesmas Tandun II	1.507.441,28	15.619.612,64
8.	Puskesmas Tambusai	293.755.729,72	57.926.808,72
9.	Puskesmas Tambusai Utara I	58.116.371,89	70.599.682,49
10.	Puskesmas Tambusai Utara II	90.007.588,92	222.017.588,20
11.	Puskesmas Bangun Purba	23.977.569,40	16.550.180,83
12.	Puskesmas Kepenuhan	32.819.995,78	131.817.774,51
13.	Puskesmas ujung Batu	34.695.069,37	202.648.571,48
14.	Puskesmas Rokan IV Koto I	108.188.028,27	35.526.857,06
15.	Puskesmas Rokan IV Koto II	42.252.276,88	1.039.638,51
16.	Puskesmas Kunto Darussalam	79.316.141,21	97.042.497,49
17.	Puskesmas Kabun	19.305.462,15	932.698,98
18.	Puskesmas Bonai Darussalam	130.840.817,97	21.060.971,15
19.	Puskesmas Pagaran Tapah Darussalam	37.313.659,05	4.181.615,95
20.	Puskesmas Kepenuhan Hulu	19.206.714,15	30.849.195,49
21.	Puskesmas Pendalian IV Koto	24.032.189,56	88.628.982,19
	Jumlah B	1.586.515.760,71	1.647.868.178,22
	Jumlah RSUD + PUSKESMAS	5.964.213.809,50	3.702.323.043,91

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.5	Kas di Bendahara Bos	393.703.822,00	715.761.618,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp393.703.822,00 dan Rp715.761.618,00. Saldo Kas di Bendahara BOS/BOP PAUD merupakan kas yang berada pada Bendahara BOS/BOP PAUD Rokan Hulu per 31 Desember 2023 sesuai dengan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana BOS (SP3B), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Dana BOS (Rp)	BOP PAUD (Rp)	Jumlah (Rp)
a. Saldo Awal	715.761.618,00	0,00	715.761.618,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

b. Koreksi Saldo Awal	(6.555.000,00)	0,00	(6.555.000,00)
c. Pendapatan BOS	94.405.165.634,00	10.099.347.859,00	104.504.513.493,00
d. Pendapatan Lain-lain (pengembalian Temuan Atas Tahun Sebelumnya)	1.998.858.000,00	0,00	1.998.858.000,00
d. Belanja	(96.719.526.430,00)	(10.099.347.859,00)	(106.818.874.289,00)
Saldo Akhir (a+b+c+d)	393.703.822,00	0,00	393.703.822,00

Koreksi saldo awal kas di Bendahara BOS adalah koreksi pengurangan karena merupakan sekolah Swasta dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sekolah	Jumlah
1	SD Swasta YLPMD Bonai	3.480.000,00
2	SD Swasta Putri Sion Yusmarsah	2.435.000,00
3	SMP Swasta Putri Sion Yusmarsah	640.000,00
	Jumlah	6.555.000,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.6 Kas lainnya	5.393.920.736,00	32.711.848,00

Nilai Kas lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.393.920.736,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp32.711.848,00. Saldo Kas Lainnya Tahun 2022 adalah Saldo kas pada masing-masing Puskesmas yang Mengelola Dana BOK Kesehatan yang ditransfer Pemerintah ke masing-masing rekening Puskesmas dengan Rincian Sebagai berikut:

NO	Puskesmas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.	Puskesmas Rambah	772.937.770,00	0,00
2.	Puskesmas Rambah Samo I	153.544.177,00	0,00
3.	Puskesmas Rambah Samo II	149.485.233,00	0,00
4.	Puskesmas Rambah Hilir I	75.451.064,00	0,00
5.	Puskesmas Rambah Hilir II	137.117.787,00	0,00
6.	Puskesmas Tandun I	82.570.169,00	0,00
7.	Puskesmas Tandun II	77.772.015,00	0,00
8.	Puskesmas Tambusai	443.409.354,00	0,00
9.	Puskesmas Tambusai Utara I	726.503.429,00	0,00
10.	Puskesmas Tambusai Utara II	212.380.536,00	0,00
11.	Puskesmas Bangun Purba	359.377.428,00	0,00
12.	Puskesmas Kepenuhan	349.230.821,00	0,00
13.	Puskesmas ujung Batu	147.367.882,00	0,00
14.	Puskesmas Rokan IV Koto I	196.620.650,00	0,00
15.	Puskesmas Rokan IV Koto II	120.019.861,00	0,00
16.	Puskesmas Kunto Darussalam	140.385.626,00	0,00
17.	Puskesmas Kunto Darussalam II	150.461.370,00	0,00
18.	Puskesmas Kabun	326.899.292,00	0,00
19.	Puskesmas Bonai Darussalam	438.619.192,00	0,00
20.	Puskesmas Pagaran Tapah Darussalam	96.727.842,00	0,00
21.	Puskesmas Kepenuhan Hulu	138.245.421,00	0,00
22.	Puskesmas Pendalian IV Koto	98.793.817,00	0,00
	Jumlah	5.393.920.736,00	0,00

Sedang Saldo kas lainnya 2022 adalah Saldo PFK pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 adalah :

1.	PPh 23	600.000,00
2.	PPh 4(2)	3.631.093,00
3.	IWP 1%	1.364.350,00
	Jumlah	5.595.443,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Dan Saldo PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD Kantor Camat Pagaran Tapah per 31 Desember 2022 adalah :

1.	PPh 22	3.001.478,00
2.	PPh 23	1.541.260,00
3.	PPN	13.392.704,00
4.	PFK-Lainnya	9.180.963,00
	Jumlah	27.116.405,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.7	Setara Kas	0,00	0,00

Setara kas adalah untuk mencatat investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabrakan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu Investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Nilai Setara kas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2	Piutang	38.117.995.336,13	44.204.158.666,77

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp38.117.995.336,13 dan Rp44.204.158.666,77 merupakan hak pemerintah Daerah atas pendapatan yang telah ditetapkan namun belum dibayar ke rekening Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4
A	PIUTANG PENDAPATAN		
1..	Piutang pajak Daerah	69.551.678.809,46	68.068.421.318,46
2.	Piutang Retribusi Daerah	8.230.912.287,00	7.639.306.287,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.763.985.329,00	3.313.233.648,82
4.	Piutang transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	4.487.764.411,00	14.656.504.421,08
	Jumlah Sebelum Penyisihan (1+2+3+4+5)	88.034.340.836,46	93.677.465.675,36
6	Penyisihan Piutang Pendapatan	(60.354.780.903,33)	(59.911.742.411,59)
	Jumlah Piutang Pendapatan setelah Penyisihan	27.679.559.933,13	33.765.723.263,77
B.	PIUTANG LAINNYA		
1.	Piutang Lainnya	18.230.387.224,00	18.231.387.224,00
2.	Penyisihan Piutang	(7.791.951.821,00)	(7.792.951.821,00)
	Jumlah Piutang lainnya (1+2)	10.438.435.403,00	10.438.435.403,00
	Jumlah Piutang (A+B)	38.117.995.336,13	44.204.158.666,77

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.1	Piutang Pendapatan	88.034.340.836,46	93.677.465.675,36

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp88.034.340.836,46 dan Rp93.677.465.675,36 merupakan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan yang telah ditetapkan, namun belum dibayar ke rekening Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4
	PIUTANG PENDAPATAN		
1.	Piutang pajak Daerah	69.551.678.809,46	68.068.421.318,46
2.	Piutang Retribusi Daerah	8.230.912.287,00	7.639.306.287,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.763.985.329,00	3.313.233.648,82
4.	Piutang transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	4.487.764.411,00	14.656.504.421,08
	Jumlah Sebelum Penyisihan (1+2+3+4+5)	88.034.340.836,46	93.677.465.675,36
6.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(60.354.780.903,33)	(59.911.742.411,59)
	Piutang Pendapatan setelah Penyisihan	27.679.559.933,13	33.765.723.263,77

Rincian Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.1.1	Piutang Pajak Daerah	69.551.678.809,46	68.068.421.318,46

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp69.551.678.809,46 dan Rp68.068.421.318,46 merupakan hak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu atas Pendapatan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah, namun belum disetor oleh Wajib Pajak ke rekening Kas Daerah s.d. 31 Desember 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Piutang Pajak Daerah	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2022 (Rp)	Koreksi+/- saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5-6
1	Pajak Restoran	49.654.728,00	0,00	11.692.600,00	2.667.500,00	58.679.828,00
2	Pajak Hotel	22.678.126,00	0,00	512.000,00	18.906.126,00	4.284.000,00
3	Pajak PPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak PPJ Non PLN	375.325.939,96	0,00	47.171.891,00	259.647.062,00	162.850.768,96
5	Pajak Reklame	321.078.838,00	0,00	160.669.478,00	91.783.940,00	389.964.376,00
6	Pajak MBLB	62.944.494,00	0,00	15.100,00	0,00	62.959.594,00
7	Pajak Air Tanah	12.788.724,00	0,00	332.476,00	150.000,00	12.971.200,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
9	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pajak Parkir	1.800.000,00	0,00	2.100.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00
11	PBB	66.150.926.767,00	0,00	2.517.778.857,00	882.660.283,00	67.786.045.341,00
12	BPHTB PH	221.639.265,50	0,00	0,00	0,00	221.639.265,50
13	BPHTB PHB	844.784.436,00	0,00	0,00	0,00	844.784.436,00
	JUMLAH	68.068.421.318,46	0,00	2.740.272.402,00	1.257.014.911,00	69.551.678.809,46
	Penyisihan Piutang Pajak	(54.737.514.006,37)	0,00	0,00	(324.193.920,05)	(54.413.320.086,32)
	JUMLAH	13.330.907.312,09	0,00	2.740.272.402,00	932.820.990,95	15.138.358.723,14

Mutasi Penambahan adalah ketetapan pajak Daerah yang dikeluarkan selama Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Anggaran 2023 dan Mutasi Pengurangan adalah pembayaran atas Surat ketetapan 2023 dan realisasi pembayaran atas piutang saldo Tahun 2022.

Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok Piutang Per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pajak Restoran :

(a) Saldo awal	:	49.654.728,00
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	(2.667.500,00)
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	<u>52.322.228,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2023	:	3.747.202.764,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023	:	3.735.510.164,00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g)	:	<u>11.692.600,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h)	:	<u>64.014.828,00</u>

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 terdiri dari 196 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

b. Piutang Pajak Hotel :

(a) Saldo awal	:	22.678.126,00
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	-18.906.126,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	<u>3.772.000,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2023	:	724.463.257,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023	:	723.951.257,00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g)	:	<u>512.000,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h)	:	<u>4.284.000,00</u>

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 terdiri dari 12 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

c. Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN :

(a) Saldo awal	:	375.325.939,96
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	-259.647.062,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	<u>115.678.877,96</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2023	:	3.647.816.598,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023	:	3.600.644.707,00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g)	:	<u>47.171.891,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h)	:	<u>162.850.768,96</u>

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN per 31 Desember 2023 terdiri dari 46 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

d. Piutang Pajak Reklame :

(a) Saldo awal	:	321.078.838,00
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	-91.783.940,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	<u>229.294.898,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2023	:	1.771.088.180,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023	:	1.610.418.702,00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g)	:	<u>160.669.478,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h)	:	<u>389.964.376,00</u>

Saldo piutang Pajak reklame 31 Desember 2023 terdiri dari 206 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

e. Piutang MBLB :

(a) Saldo awal	:	62.944.494,00
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	0,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	<u>62.944.494,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2023	:	978.254.545,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023	:	978.239.445,00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g)	:	<u>15.100,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h)	:	<u>62.959.594,00</u>

Saldo Piutang Pajak MBLB per 31 Desember 2023 terdiri dari 34 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

f. Piutang Pajak air tanah :

(a) Saldo awal	:	12.788.724,00
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	-150.000,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	<u>12.638.724,00</u>
(e) Surat Ketetapan Pajak 2023	:	188.623.286,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023	:	188.290.810,00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g)	:	<u>332.476,00</u>
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h)	:	<u>12.971.200,00</u>

Saldo Piutang Pajak air tanah per 31 Desember 2023 terdiri dari 18 Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

g. Piutang Pajak Sarang Burung Walet :

(a) Saldo awal	:	4.800.000,00
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	0,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	<u>4.800.000,00</u>



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

(e) Surat Ketetapan Pajak 2023	:	85.410.500,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023	:	85.410.500,00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g)	:	0,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h)	:	4.800.000,00

Saldo Piutang Pajak sarang burung walet per 31 Desember 2023 terdiri dari 32 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

h. Piutang Pajak Hiburan :

(a) Saldo awal	:	
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	0,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	0,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2023	:	137,306,400.00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023	:	137,306,400.00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g)	:	0,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h)	:	0,00

i. Piutang Pajak Parkir :

(a) Saldo awal	:	1.800.000,00
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	-1.200.000,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	600.000,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2023	:	651.380.154,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023	:	649.280.154,00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g)	:	2.100.000,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h)	:	2.700.000,00

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 terdiri dari 5 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

j. Piutang PBB dan BPHTB:

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang PBB -P2 :

(a) Saldo awal	:	66.150.926.767,00
(b) Koreksi Saldo Awal	:	0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	:	-882.660.283,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	:	65.268.266.484,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2023	:	13.436.544.734,00
(f) Koreksi Tahun berjalan	:	0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023	:	10.918.765.877,00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g)	:	2.517.778.857,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h) ; 67.786.045.341,00

Piutang BPHTB Pemindahan Hak :

(a) Saldo awal ; 221,639,265.50
(b) Koreksi Saldo Awal ; 0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal ; 0,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c) ; 221.639.265,50
(e) Surat Ketetapan Pajak 2023 ; 3.880.780.025,00
(f) Koreksi Tahun berjalan ; 0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023 ; 3.880.780.025,00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g) ; 0,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h) ; 221.639.265,50

Piutang BPHTB Pemberian Hak Baru :

(a) Saldo awal ; 844.784.436,00
(b) Koreksi Saldo Awal ; 0,00
(c) Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal ; 0,00
(d) Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c) ; 844.784.436,00
(e) Surat Ketetapan Pajak 2023 ; 19.566.100.622,00
(f) Koreksi Tahun berjalan ; 0,00
(g) Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023 ; 19.566.100.622,00
(h) Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g) ; 0,00
Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h) ; 844.784.436,00

Rincian Piutang Pajak PBB-P2 setiap tahun adalah sebagai berikut :

No	Tahun Penetapan	Saldo 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan(Rp)	Pengurangan(Rp)	Saldo Per 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	2010	4.142.150.201,00	0,00	25.779.514,00	4.116.370.687,00
2	2011	4.519.708.086,00	0,00	12.583.098,00	4.507.124.988,00
3	2012	4.983.567.255,00	0,00	14.501.023,00	4.969.066.232,00
4	2013	5.394.187.692,00	0,00	9.356.262,00	5.384.831.430,00
5	2014	2.626.557.244,00	0,00	4.813.505,00	2.621.743.739,00
6	2015	8.002.811.620,00	0,00	46.237.262,00	7.956.574.358,00
7	2016	7.139.014.705,00	0,00	59.795.874,00	7.079.218.831,00
8	2017	6.198.554.884,00	0,00	64.428.691,00	6.134.126.193,00
9	2018	7.903.775.632,00	0,00	55.867.552,00	7.847.908.080,00
10	2019	6.382.758.192,00	0,00	88.901.482,00	6.293.856.710,00
11	2020	6.427.596.379,00	0,00	87.084.523,00	6.340.511.856,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

12	2021	605.325.945,00	0,00	109.531.607,00	495.794.338,00
13	2022	1.824.918.932,00	0,00	303.779.890,00	1.521.139.042,00
14	2023	0,00	2.517.778.857,00	0,00	2.517.778.857,00
JUMLAH		66,150,926,767.00	2.517.778.857,00	882.660.283,00	67.786.045.341,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.1.2 Piutang Retribusi	8.106.382.287,00	7.639.306.287,00

Piutang Retribusi ini adalah adanya tagihan atas Surat Ketetapan retribusi yang sudah dikeluarkan oleh SKPD namun belum dilunasi oleh wajib retribusi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.106.382.287,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Piutang Retribusi	Piutang Retribusi 31 Desember 2022 (Rp)	Koreksi + / (-) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang Retribusi 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.698.325.287,00	0,00	3.318.056.000,00	2.726.450.000,00	6.289.931.287,00
2.	Izin Gangguan	1.816.451.000,00	0,00	0,00	0,00	1.816.451.000,00
3.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	124.530.000,00	0,00	0,00	0,00	124.530.000,00
	Jumlah	7.639.306.287,00	0,00	3.318.056.000,00	2.726.450.000,00	8.230.912.287,00

a. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Saldo Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah Piutang pendapatan retribusi pada Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman yang dikelola UPTD PAB (Unit Pengelola Teknis Dinas Pengelola Air Bersih), dengan perhitungan:

(a)	Saldo awal	;	5.698.325.287,00
(b)	Koreksi Saldo Awal	;	0,00
(c)	Realisasi Pendapatan atas Saldo Awal	;	332.632.500,00
(d)	Saldo Piutang dari saldo awal (a+b-c)	;	<u>5.365.692.787,00</u>
(e)	Surat Ketetapan Pajak 2023	;	3.318.056.000,00
(f)	Koreksi Tahun berjalan	;	0,00
(g)	Realisasi Pendapatan atas Ketetapan 2023	;	2.393.817.500,00
(h)	Piutang dari ketetapan 2023 (e+f-g)	;	<u>924.238.500,00</u>
	Saldo Piutang s.d 31 Desember 2023 (d+h)	;	<u>6.289.931.287,00</u>

b. Piutang retribusi Izin gangguan

Piutang retribusi Izin gangguan adalah piutang pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tidak terdapat mutasi di Tahun 2023.

d. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Piutang pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika dengan saldo pada Tahun 2022 sebesar Rp124.530.000,00 dan tidak ada Penambahan Piutang pada tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.1.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.763.985.329,00	3.313.233.648,82

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.763.985.329,00 dan Rp3.313.233.648,82. Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Piutang pada RSUD Kabupaten Rokan Hulu dan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Sebesar Rp5.751.910.045,00 dan Piutang atas denda keterlambatan pembayaran pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp12.075.284,00, Rincian Piutang tersebut sebagai berikut:

a. Piutang pada BLUD sebesar Rp5.751.910.045,00:

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	RSUD (Rp)	PUSKESMAS (Rp)	RSUD (Rp)	PUSKESMAS (Rp)
Piutang BLUD				
BPJS	2.595.448.800,00	47.034.000,00	2.039.723.623,00	63.375.000,00
BPJS KETENAGAKERJAAN	149.390.792,00	0,00	6.539.767,00	0,00
JAMPERSAL	412.652.900,00	0,00	388.384.000,00	0,00
INHEALTH	3.161.067,00	0,00	3.161.067,00	0,00
BUMIDA	13.658.973,00	0,00	13.658.973,00	0,00
PT. MARGE ANDALAN	139.313.827,00	0,00	139.313.827,00	0,00
PT. TOTAL	415.869,00	0,00	415.869,00	0,00
PT. EDI	27.187.869,00	0,00	27.187.869,00	0,00
JASA RAHARJA	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIEN - PERORANGAN	370.646.848,00	0,00	349.964.863,00	0,00
SEWA KANTIN	29.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
SEWA ATM	0,00	0,00	45.090.000,00	0,00
UTD AWAL BROSS	36.755.000,00	0,00	10.830.000,00	0,00
PASIEN COVID-19	1.927.244.100,00	0,00	173.208.500,00	0,00
JUMLAH	5.751.910.045,00		3.288.853.358,00	

b. Piutang Denda Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Rp12.075.284,00:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Denda Pajak Rumah Makan	0,00	0,00
Denda Pajak Reklame	5.029.470,00	5.029.470,00
Denda PPJ Non PLN	6.679.327,00	6.679.327,00
Denda Pajak Parkir	366.487,00	366.487,00
	12.075.284,00	12.075.284,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.1.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00

Piutang Transfer/Dana Perimbangan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.1.5	Piutang Transfer Antar Daerah	4.487.764.411,00	14.656.504.421,08

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah adalah Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 dan 2022 adalah Rp4.487.764.411,00 dan Rp14.656.504.421,08 mengalami penambahan selama Tahun 2022. Piutang tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Piutang Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.215.918.085,00	4.025.839.411,00	4.215.918.085,00	4.025.839.411,00
2.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.978.661.336,00	0,00	9.978.661.336,00	0,00
3..	Piutang Jembatan Timbang	461.925.000,00	0,00	0,00	461.925.000,00
	Jumlah	14.656.504.421,00	4.025.839.411,00	14.194.579.421,00	4.487.764.411,00

Piutang Bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan bagian bagi hasil yang belum direalisasikan berdasarkan keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.7726/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan triwulan IV (Oktober-November) Kabupaten Rokan Hulu .

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.2	Piutang Lainnya	18.230.387.224,00	18.231.387.224,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.230.387.224,00 dan Rp18.231.387.224,00 dengan rincian sebagai berikut;

SKPD	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.043.460.469,00	0,00	1.000.000,00	1.042.460.469,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.894.688.333,00	0,00	0,00	1.894.688.333,00
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	267.040.364,00	0,00	0,00	267.040.364,00
Dinas Pertenakan dan Perkebunan	11.743.452.484,00	0,00	0,00	11.743.452.484,00
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.672.600.000,00	0,00	0,00	1.672.600.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	1.610.145.574,00	0,00	0,00	1.610.145.574,00
Jumlah (sebelum Penyisihan)	18.231.387.224,00	0,00	1.000.000,00	18.230.387.224,00

Piutang lainnya pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Pangan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Dinas Koperasi dan UKM. Mutasi Pengurangan adalah terdapat pengembalian Piutang Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.000.000,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.3 Penyisihan Piutang	(68.146.732.724,33)	(67.704.694.232,59)

Penyisihan Piutang dilakukan berdasarkan Klasifikasi Umur Piutang. Penyisihan Piutang pertama kali diterapkan pada Tahun 2015. Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp68.146.732.724,33) dan (Rp67.704.694.232,59), dengan rincian sebagai berikut;

No	SKPD	Penyisihan Piutang 2023	Penyisihan Piutang 2022
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
1	Bapenda	(54.413.320.086,32)	(54.737.514.006,37)
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah		
1	Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman	(3.534.503.536,00)	(2.910.582.623,70)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu	(1.816.451.000,00)	(1.816.451.000,00)
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		
1.	Dinas Kesehatan/RSUD BLUD	(590.506.281,01)	(447.194.781,52)
	Penyisihan Piutang Lainnya		
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.042.460.469,00)	(1.043.460.469,00)
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(1.894.688.333,00)	(1.894.688.333,00)
3.	Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura	(267.040.364,00)	(267.040.364,00)
4.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	(3.034.713.101,00)	(3.034.713.101,00)
5.	Dinas Koperasi dan UKM	(1.553.049.554,00)	(1.553.049.554,00)
	JUMLAH	(68.146.732.724,33)	(67.704.694.232,59)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3 Beban Dibayar Di Muka	0,00	0,00

Beban dibayar di muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 tidak terdapat mutasi di Tahun Anggaran 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.4 Persediaan	29.964.027.795,62	17.789.561.919,92

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp29.964.027.795,62 dan Rp17.789.561.919,92. Saldo Persediaan merupakan barang habis pakai yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang dimaksud tidak untuk diperjualbelikan namun akan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo tersebut merupakan hasil dari perhitungan *stock opname* pada SKPD per 31 Desember 2023 yang dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan terdiri dari beberapa objek barang diantaranya seperti persediaan barang material, persediaan obat-obatan di Puskesmas dan Dinas lainnya, dan barang lainnya seperti pengadaan barang yang akan diserahkan ke



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

masyarakat, namun per 31 Desember 2023 yang belum dilakukan serah terima, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	228.878.236,00	62.775.884,00
2	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery Kering)	2.332.000,00	551.200,00
3	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	380.000,00	1.550.000,00
4	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	432.125.656,00	21.734.430,00
5	Persediaan Isi tabung gas	0,00	0,00
6	Persediaan Bahan obat-obatan	11.825.556.829,88	12.279.445.753,12
7	Persediaan Bahan kimia	6.885.000,00	4.560.000,00
8	Persediaan Bahan Lainnya	160.750.000,00	160.750.000,00
9	Persediaan Komponen Lainnya	1.474.500,00	0,00
10	Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	15.882.225.305,00	3.780.017.400,00
11	Persediaan Cetak	175.003.599,74	104.085.652,80
12	Persediaan Bahan Komputer	543.496.400,00	677.024.200,00
13	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.962.069,00	0,00
14	Persediaan Bahan Baku	31.200,00	140.400,00
15	Bahan Bangunan dan Konstruksi	696.927.000,00	696.927.000,00
	JUMLAH	29.964.027.795,62	17.789.561.919,92

Rincian Saldo Persediaan SKPD adalah sebagai;

No	SKPD	Persediaan 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Persediaan 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	3.293.925,00	14.928.381.136,00	14.890.900.853,00	40.774.208,00
2	Sekretariat DPRD	14.288.000,00	5.776.145.270,00	5.783.959.270,00	6.474.000,00
3	Inspektorat	1.575.730,00	857.178.750,00	857.584.550,00	1.169.930,00
4	Bappeda	8.682.800,00	1.484.237.400,00	1.470.748.200,00	22.172.000,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	0,00	1.206.827.950,00	1.206.827.950,00	0,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.025.196,00	2.703.305.142,00	2.703.522.369,00	807.969,00
7	Badan Pendapatan Daerah	2.512.000,00	1.251.680.995,00	1.252.006.595,00	2.186.400,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	1.009.362.545,00	1.009.362.545,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	604.184.532,00	604.184.532,00	0,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	0,00	15.420.408.946,00	15.420.408.946,00	0,00
11	Dinas Kesehatan	12.310.663.878,12	41.496.162.693,86	42.052.962.731,11	11.753.863.840,86
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	767.840.490,80	1.285.146.301,95	1.323.710.404,00	729.276.388,75
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	4.507.452.516,00	4.507.452.516,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Persediaan 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Persediaan 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	3.679.117.400,00	15.965.779.093,00	2.713.349.338,00	16.931.547.155,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	0,00	3.198.882.060,00	3.198.882.060,00	0,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	0,00	12.341.690.321,00	12.202.298.321,00	139.392.000,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	8.968.906.740,00	8.968.906.740,00	0,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	1.233.625.461,00	1.233.625.461,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	797.827.000,00	1.384.539.200,00	2.182.366.200,00	0,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	0,00	7.104.199.359,63	7.104.199.359,63	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	0,00	1.308.978.015,00	1.308.978.015,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	2.271.510.700,00	2.271.510.700,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	5.418.000,00	3.670.578.572,00	3.666.355.596,00	9.640.976,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	942.000,00	5.975.961.750,00	5.975.743.150,00	1.160.600,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Teadu Satu Pintu	0,00	887.379.933,00	887.379.933,00	0,00
26	Dinas Perhubungan	18.724.300,00	1.122.072.950,00	1.063.559.950,00	77.237.300,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	16.901.200,00	728.766.185,00	662.115.557,00	83.551.828,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	1.433.978.159,92	1.433.978.159,92	0,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	160.750.000,00	1.213.212.920,00	1.213.212.920,00	160.750.000,00
30	Kecamatan Rambah	0,00	288.869.800,00	288.869.800,00	0,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	0,00	248.525.400,00	248.525.400,00	0,00
32	Kecamatan Kepenuhan	0,00	442.469.900,00	438.446.700,00	4.023.200,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	253.274.600,00	253.274.600,00	0,00
34	Kecamatan Tambusai	0,00	429.051.175,00	429.051.175,00	0,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	258.729.850,00	258.729.850,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	154.829.100,00	154.829.100,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	0,00	287.516.300,00	287.516.300,00	0,00
38	Kecamatan Pendalian Iv Koto	0,00	244.586.900,00	244.586.900,00	0,00
39	Kecamatan Rokan Iv Koto	0,00	363.840.700,00	363.840.700,00	0,00
40	Kecamatan Rambah Samo	0,00	268.894.350,00	268.894.350,00	0,00
41	Kecamatan Ujungbatu	0,00	438.048.300,00	438.048.300,00	0,00
42	Kecamatan Kabun	0,00	220.411.400,00	220.411.400,00	0,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	248.266.120,00	248.266.120,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Persediaan 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Persediaan 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
44	Kecamatan Kunto Darussalam	0,00	604.298.300,00	604.298.300,00	0,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	0,00	291.897.100,00	291.897.100,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	17.789.561.919,92	166.384.044.892,36	154.209.579.016,66	29.964.027.795,62

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2 Investasi Jangka Panjang	104.724.463.420,00	70.374.381.117,00

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp104.724.463.420,00 dan Rp70.374.381.117,00 adalah Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	70.374.381.117,00	35.057.925.574,00	707.843.271,00	104.724.463.420,00
JUMLAH	70.595.082.253,00	35.057.925.574,00	707.843.271,00	104.724.463.420,00

Mutasi penambahan sebesar Rp.35.057.925.574,00 adalah penambahan dari laba pada laporan Keuangan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu Rp970.485.356,00 dan Penambahan penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Rp1.000.000.000,00 serta laba TA 2023 Perumda Rokan Hulu Jaya Rp33.087.440.218,00. Sedang Mutasi Pengurangan adalah penyetoran Dividen oleh Perumda Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu Sebesar Rp707.843.271,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1 Investasi Non Permanen	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.2 Investasi Permanen	104.724.463.420,00	70.374.381.117,00

Saldo Investasi Jangka Panjang-Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp104.724.463.420,00 dan Rp70.374.381.117,00 adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada empat BUMD dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
PT Riau Airlines	5.400.000.000,00	0,00	0,00	5.400.000.000,00
PT Bank Riau	8.280.700.000,00	0,00	0,00	8.280.700.000,00
PERUMDA BPR Rokan Hulu	9.972.441.436,00	1.970.485.356,00	707.843.271,00	11.235.083.521,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

PERUMDA Rokan Hulu Jaya	46.721.239.681,00	33.087.440.218,00	0,00	79.808.679.899,00
JUMLAH	70.374.381.117,00	35.057.925.574,00	707.843.271,00	104.724.463.420,00

Penjelasan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yaitu;

a. PT Riau Airlines

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Riau Airlines per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.400.000.000,00. Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 2,54% atau kurang dari 20% sehingga penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehan dengan metode biaya/cost. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Riau Airlines sebesar Rp5.400.000.000,00 yang terdiri atas.

- 1) Penyertaan modal sebesar Rp2.400.000.000,00 dengan jumlah saham sebanyak 2.400 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar Saham. Kepemilikan saham dengan Sertifikat Saham Nomor 46751-21151/RAL/2006 tanggal 13 Desember 2006;
- 2) Penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan jumlah saham sebanyak 3.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00/lembar Saham. Kepemilikan saham dengan Sertifikat Saham Nomor 15001-18000/RAL/2005.

b. PT Bank Riau Kepri Syariah

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada a. PT Bank Riau Kepri Syariah per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.280.700.000,00. Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 0,75% atau kurang dari 20% sehingga penyertaan modal dicatat sebesar harga perolehan dengan metode biaya/cost. Kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada PT Bank Riau Kepri Syariah berupa saham sebanyak 82.807 lembar dengan nilai nominal Rp100.000,00/lembar saham. Kepemilikan saham dengan sertifikat saham Nomor A/II-12/2009 tanggal 31 Desember 2009. Perubahan porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyesuaikan dengan penambahan modal dari pemerintah kabupaten lain sebagai pemegang saham.

c. Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hulu

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu PD Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu 31 Desember 2023 sebesar Rp11.235.083.521,00. Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 100%. Penilaian penyertaan modal pada Perumda BPR Rokan Hulu dengan menggunakan metode *equity*/ekuitas. Nilai penyertaan tersebut diperoleh dari nilai ekuitas Perumda BPR Rokan Hulu yang ada dalam Laporan Keuangan. Kenaikan Investasi pada Perumda BPR sebesar Rp1.262.642.085,00 adalah dari mutasi penambahan sebesar terdiri dari dari Laba Tahun 2023 sebesar Rp970.485.356,00 dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hulu tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 serta pengurangan dari penyeteroran dividen di tahun 2023 ke Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp707.843.271,00

d. Perumda Rokan Hulu Jaya

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Perumda Rokan Hulu Jaya per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.721.239.681,00. Dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap perusahaan sebesar 100%. Penilaian penyertaan modal pada Perumda Rokan Hulu Jaya dengan menggunakan metode *equity*. Nilai penyertaan tersebut diperoleh dari nilai ekuitas Perumda Rokan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Hulu Jaya yang ada dalam Laporan Keuangan. Terdapat kenaikan Investasi pada Perumda Rokan Hulu jaya sebesar Rp33.087.440.218 yang merupakan laba pada Perumda Rokan Hulu jaya. Perumda Rokan Hulu jaya Memperoleh Dividen dari PT Riau Petroleum Rokan pada tahun 2023 sebesar Rp32.543.907.455,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.3	Aset Tetap	3.265.941.590.205,71	3.100.581.239.674,95

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.265.941.590.205,71 dan Rp3.100.581.239.674,95 Saldo Aset setelah akumulasi penyusutan Tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp165.360.350.530,76 atau 5,33%. Rincian Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut ;

NO	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Tanah	402.922.737.118,07	615.388.650,00	1.493.805.000,00	402.044.320.768,07
2.	Peralatan Dan Mesin	644.040.132.348,86	49.322.422.961,00	673.836.965,00	692.688.718.344,86
3.	Gedung Dan Bangunan	1.596.551.323.945,06	70.635.573.043,70	48.018.092.070,17	1.619.168.804.918,61
4.	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	2.801.847.863.529,54	244.569.283.287,00	0,00	3.046.417.146.816,54
5.	Aset Tetap Lainnya	95.445.502.018,81	7.345.984.099,00	49.500.000,00	102.741.986.117,81
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	126.052.652.296,44	21.754.060.344,00	98.500.000,00	147.708.212.640,44
	Jumlah (1+2+3+4+5+6)	5.666.860.211.256,78	394.242.712.384,70	50.134.234.035,17	6.010.769.189.606,33
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.566.278.971.581,83)	59.369.079.275,80	237.917.707.094,59	(2.744.827.599.400,62)
	Jumlah setelah Akumulasi Penyusutan	3.100.581.239.674,95	453.611.791.660,50	288.251.441.129,76	3.265.941.590.205,71

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.3.1	Tanah	403.171.237.118,07	402.922.737.118,07

Aset – Tanah 2023 sebesar Rp403.171.237.118,07 atau mengalami kenaikan senilai Rp248.500.000,00 atau sebesar 0,06% dibanding Aset Tetap Tanah Tahun 2022. Mutasi Penambahan tanah adalah dari Belanja Tahun 2023, dari hibah masyarakat, aset yang baru dicatat, dan mutasi antar SKPD mutasi pengurangan adalah mutasi antar SKPD dan diserahkan kemasyarakat. Rincian Aset Tetap – Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut;



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	112.782.684.502,00	0,00	0,00	112.782.684.502,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	1.771.904.000,00	0,00	0,00	1.771.904.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.021.952.000,00	0,00	0,00	1.021.952.000,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	2.272.128.000,00	0,00	0,00	2.272.128.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.955.840.000,00	0,00	0,00	1.955.840.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.357.632.000,00	0,00	0,00	2.357.632.000,00
10	Dinas Pendidikan	98.430.324.900,00	0,00	538.305.000,00	97.892.019.900,00
11	Dinas Kesehatan	8.017.766.175,00	0,00	0,00	8.017.766.175,00
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	1.717.504.000,00	0,00	0,00	1.717.504.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	128.516.479.085,00	0,00	0,00	128.516.479.085,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	9.127.202.456,07	0,00	0,00	9.127.202.456,07
15	Dinas Tanaman Dan Hortikultura	2.378.367.000,00	0,00	0,00	2.378.367.000,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	2.736.512.500,00	213.888.650,00	0,00	2.950.401.150,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.169.382.500,00	202.000.000,00	199.500.000,00	1.171.882.500,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	909.350.000,00	0,00	0,00	909.350.000,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan	258.405.000,00	0,00	0,00	258.405.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	322.660.000,00	0,00	0,00	322.660.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	1.700.780.000,00	0,00	0,00	1.700.780.000,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	663.321.500,00	0,00	0,00	663.321.500,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.695.935.000,00	0,00	0,00	1.695.935.000,00
26	Dinas Perhubungan	10.707.008.000,00	0,00	0,00	10.707.008.000,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	261.140.000,00	0,00	0,00	261.140.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.245.824.000,00	0,00	0,00	1.245.824.000,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec. Rambah	662.750.000,00	0,00	0,00	662.750.000,00
31	Kec. Rambah Hiir	29.386.000,00	0,00	0,00	29.386.000,00
32	Kec. Kepenuhan	7.183.862.250,00	199.500.000,00	0,00	7.383.362.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

33	Kec.Keenuhan Hulu	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
34	Kec.Tambusai	293.356.250,00	0,00	0,00	293.356.250,00
35	Kec.Tambusai Utara	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
36	Kec.Bangun Purba	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
37	Kec.Bonai Darussalam	106.000.000,00	0,00	0,00	106.000.000,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	82.445.000,00	0,00	0,00	82.445.000,00
40	Kec.Rambah Samo	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
41	Kec.Ujung Batu	410.000.000,00	0,00	0,00	410.000.000,00
42	Kec.Kabun	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
43	Kec.Tandun	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
44	Kec.Kunto Darussalam	180.800.000,00	0,00	0,00	180.800.000,00
45	Kec.Pagaran Tapah	142.000.000,00	0,00	0,00	142.000.000,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.077.035.000,00	0,00	756.000.000,00	321.035.000,00
	JUMLAH	402.922.737.118,07	615.388.650,00	1.493.805.000,00	402.044.320.768,07

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.3.2 Peralatan Dan Mesin	692.688.718.344,86	644.040.132.348,86

Saldo Aset-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp692.688.718.344,86 dan Rp644.040.132.348,86. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp48.648.585.996,00 atau sebesar 7,55% dari Tahun 2022. Mutasi Penambahan adalah dari realisasi Belanja tahun 2023, mutasi antar SKPD, Aset peralatan dan mesin yang baru dicatat dan mutasi pengurangan adalah mutasi antar SKPD, penghapusan kendaraan yang di lelang dan mutasi reklasifikasi antar aset tetap. Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

No	Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2023(Rp)
1	Alat Besar	65.998.625.735,29	593.074.100,00	0,00	66.591.699.835,29
2	Alat Angkutan	136.767.237.004,62	3.971.982.000,00	465.913.000,00	140.273.306.004,62
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	10.400.536.941,31	225.050.000,00	0,00	10.625.586.941,31
4	Alat Pertanian	4.499.954.730,00	1.150.000,00	0,00	4.501.104.730,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	137.482.718.955,56	9.687.516.244,00	34.256.410,00	147.135.978.789,56
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	13.146.788.247,00	934.832.079,00	0,00	14.081.620.326,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	128.303.229.791,58	16.921.899.096,00	0,00	145.225.128.887,58
8	Alat Laboratorium	23.430.518.858,00	4.612.877.489,00	0,00	28.043.396.347,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2023(Rp)
9	Alat Persenjataan	1.306.374.900,00	51.385.000,00	0,00	1.357.759.900,00
10	Komputer	114.848.198.013,92	11.353.280.738,00	4.000.000,00	126.197.478.751,92
11	Alat Keselamatan Kerja	308.233.778,00	394.102.631,00	0,00	702.336.409,00
12	Rambu-Rambu	7.006.107.482,58	245.482.185,00	0,00	7.251.589.667,58
13	Peralatan Olah Raga	541.607.911,00	318.441.399,00	0,00	860.049.310,00
JUMLAH		644.040.132.348,86	49.311.072.961,00	504.169.410,00	692.847.035.899,86

Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin untuk Setiap SKPD per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut;

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	72.173.821.580,00	1.363.269.000,00	0,00	73.537.090.580,00
2	Sekretariat DPRD	11.274.159.039,00	808.953.000,00	0,00	12.083.112.039,00
3	Inspektorat	4.588.483.826,00	506.440.000,00	0,00	5.094.923.826,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.130.616.429,00	748.978.800,00	11.000.000,00	6.868.595.229,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	3.558.853.187,00	314.964.000,00	0,00	3.873.817.187,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.176.563.317,00	324.993.000,00	14.307.000,00	7.487.249.317,00
7	Badan Pendapatan Daerah	5.353.345.121,04	267.166.485,00	0,00	5.620.511.606,04
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	979.139.198,00	97.928.250,00	0,00	1.077.067.448,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.319.016.990,00	111.120.000,00	440.606.000,00	8.989.530.990,00
10	Dinas Pendidikan	119.991.667.755,00	10.336.081.357,00	0,00	130.327.749.112,00
11	Dinas Kesehatan	196.915.168.362,55	24.633.875.600,00	11.350.000,00	221.537.693.962,55
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	10.538.561.800,00	423.479.500,00	4.000.000,00	10.958.041.300,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	42.401.829.301,00	2.212.698.642,00	14.986.410,00	44.599.541.533,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	24.009.014.083,33	826.310.510,00	0,00	24.835.324.593,33
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	8.251.796.481,84	117.600.000,00	0,00	8.369.396.481,84
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	6.241.824.592,00	172.294.421,00	0,00	6.414.119.013,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4.100.014.350,00	281.806.000,00	0,00	4.381.820.350,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan	1.998.435.586,00	179.763.200,00	0,00	2.178.198.786,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
	Tenaga Kerja				
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.933.275.491,00	143.465.000,00	0,00	3.076.740.491,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan	5.285.362.482,00	92.398.800,00	0,00	5.377.761.282,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	2.838.734.857,00	33.650.000,00	0,00	2.872.384.857,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.164.951.656,00	80.718.000,00	0,00	4.245.669.656,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	17.725.582.453,10	291.416.000,00	0,00	18.016.998.453,10
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	3.732.679.663,14	37.450.000,00	0,00	3.770.129.663,14
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.551.323.320,00	808.703.175,00	0,00	5.360.026.495,00
26	Dinas Perhubungan	33.239.502.819,99	540.857.650,00	0,00	33.780.360.469,99
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	2.770.103.600,00	651.353.000,00	0,00	3.421.456.600,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.275.598.541,00	520.907.491,00	0,00	4.796.506.032,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	7.054.844.457,00	1.743.480.000,00	0,00	8.798.324.457,00
30	Kec.Rambah	945.252.210,00	64.915.350,00	0,00	1.010.167.560,00
31	Kec.Rambah Hilir	625.143.500,00	11.800.000,00	0,00	636.943.500,00
32	Kec.Kepenuhan	1.033.579.890,00	146.335.400,00	0,00	1.179.915.290,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	684.805.924,00	40.920.000,00	7.920.000,00	717.805.924,00
34	Kec.Tambusai	919.571.620,00	23.606.560,00	0,00	943.178.180,00
35	Kec.Tambusai Utara	656.684.494,00	17.216.320,00	0,00	673.900.814,00
36	Kec.Bangun Purba	530.878.700,00	3.500.000,00	0,00	534.378.700,00
37	Kec.Bonai Darussalam	731.568.180,00	14.027.700,00	0,00	745.595.880,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	830.170.300,00	15.836.500,00	0,00	846.006.800,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	1.394.031.186,00	3.000.000,00	0,00	1.397.031.186,00
40	Kec.Rambah Samo	561.978.625,00	10.448.850,00	0,00	572.427.475,00
41	Kec.Ujung Batu	1.418.381.100,00	150.695.800,00	0,00	1.569.076.900,00
42	Kec.Kabun	1.015.855.865,00	11.800.000,00	0,00	1.027.655.865,00
43	Kec.Tandun	984.148.464,00	16.480.000,00	0,00	1.000.628.464,00
44	Kec.Kunto Darussalam	997.204.781,00	94.514.500,00	0,00	1.091.719.281,00
45	Kec.Pagaran Tapah	724.656.000,00	13.855.100,00	0,00	738.511.100,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	6.411.951.170,87	0,00	0,00	6.411.951.170,87
	JUMLAH	644.040.132.348,86	49.311.072.961,00	504.169.410,00	692.847.035.899,86



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.3.3 Gedung Dan Bangunan	1.619.168.804.918,61	1.596.551.323.945,06

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.651.639.000.861,76 dan Rp1.596.551.323.945,06 atau terjadi kenaikan sebesar Rp55.087.676.916,70 atau 3,45% dibandingkan saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2022. Mutasi Penambahan gedung dan bangunan adalah dari belanja Tahun 2023, mutasi antar SKPD, reklasifikasi antar aset tetap, aset yang baru dicatat, penambahan dari hibah dan untuk mutasi pengurangan adalah mutasi antar SKPD dan aset gedung, penghapusan, bangunan yang diserahkan ke pihak lain dan rekasifikasi jenis aset. Rincian Aset Gedung Dan Bangunan untuk setiap SKPD per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut;

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	49.935.674.662,00	591.211.000,00	260.732.200,00	50.266.153.462,00
2	Sekretariat DPRD	3.712.941.452,00	476.817.000,00	100.101.000,00	4.089.657.452,00
3	Inspektorat	3.301.613.405,00	0,00	10.890.000,00	3.290.723.405,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.467.109.802,00	135.147.300,00	30.025.266,00	2.572.231.836,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	12.023.917.054,83	0,00	50.270.000,00	11.973.647.054,83
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.579.748.156,00	0,00	21.581.800,00	4.558.166.356,00
7	Badan Pendapatan Daerah	981.005.600,00	99.905.000,00	0,00	1.080.910.600,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.875.901.070,54	0,00	0,00	3.875.901.070,54
10	Dinas Pendidikan	582.532.611.986,74	52.268.048.277,70	816.828.742,00	633.983.831.522,44
11	Dinas Kesehatan	150.868.996.176,43	4.468.363.950,00	158.122.000,00	155.179.238.126,43
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5.076.380.985,00	0,00	0,00	5.076.380.985,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	32.169.998.724,21	166.130.000,00	19.145.000,00	32.316.983.724,21
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	504.594.078.125,64	7.904.324.000,00	44.649.251.718,15	467.849.150.407,49
15	Dinas Tanaman Dan Hortikultura	15.680.051.787,00	25.000.000,00	214.570.025,00	15.490.481.762,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	7.572.563.986,00	486.853.746,00	113.920.000,00	7.945.497.732,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3.317.754.250,00	99.800.000,00	57.128.400,00	3.360.425.850,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	1.623.917.100,00	75.000.000,00	9.980.000,00	1.688.937.100,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	10.785.337.635,25	2.496.036.450,00	352.254.763,00	12.929.119.322,25
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.359.591.382,00	0,00	19.391.183,00	1.340.200.199,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	390.690.200,00	0,00	9.800.000,00	380.890.200,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk	5.106.576.000,00	0,00	337.986.000,00	4.768.590.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
	Dan Keluarga Berencana				
23	Dinas Lingkungan Hidup	5.204.784.903,59	0,00	73.650.491,00	5.131.134.412,59
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	1.616.021.850,00	0,00	45.848.000,00	1.570.173.850,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.993.148.520,23	570.579.780,00	61.350.000,00	12.502.378.300,23
26	Dinas Perhubungan	53.613.761.530,41	0,00	111.571.500,00	53.502.190.030,41
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	9.114.220.608,10	50.000.000,00	0,00	9.164.220.608,10
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.673.730.214,00	30.000.000,00	10.000.000,00	4.693.730.214,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	147.882.850,00	0,00	0,00	147.882.850,00
30	Kec.Rambah	411.053.750,00	12.719.540,00	0,00	423.773.290,00
31	Kec.Rambah Hilir	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	0,00
32	Kec.Kepenuhan	1.221.012.400,00	298.900.000,00	66.457.400,00	1.453.455.000,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	1.587.917.450,00	0,00	10.000.000,00	1.577.917.450,00
34	Kec.Tambusai	2.108.152.600,00	0,00	14.580.000,00	2.093.572.600,00
35	Kec.Tambusai Utara	1.312.683.800,00	0,00	69.479.000,00	1.243.204.800,00
36	Kec.Bangun Purba	621.397.200,00	0,00	0,00	621.397.200,00
37	Kec.Bonai Darussalam	632.852.842,00	0,00	25.333.000,00	607.519.842,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	715.113.521,00	0,00	0,00	715.113.521,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	1.300.803.055,00	51.862.000,00	18.449.982,00	1.334.215.073,00
40	Kec.Rambah Samo	270.120.201,00	0,00	0,00	270.120.201,00
41	Kec.Ujung Batu	692.774.000,00	158.875.000,00	168.475.000,00	683.174.000,00
42	Kec.Kabun	151.099.920,00	0,00	17.000.000,00	134.099.920,00
43	Kec.Tandun	3.680.764.107,00	0,00	0,00	3.680.764.107,00
44	Kec.Kunto Darussalam	656.424.600,00	170.000.000,00	51.919.600,00	774.505.000,00
45	Kec.Pagaran Tapah	58.774.300,00	0,00	14.000.000,00	44.774.300,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	92.782.370.182,10	0,00	0,00	92.782.370.182,10
	JUMLAH	1.596.551.323.945,06	70.635.573.043,70	48.018.092.070,15	1.619.168.804.918,61

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.3.4 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	3.046.417.146.816,54	2.801.847.863.529,54

Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.046.417.146.816,54 dan Rp2.801.847.863.529,54 atau terjadi kenaikan aset Tahun 2023 sebesar Rp244.569.283.287,00 atau sebesar 8,73% dibandingkan Tahun 2022. Mutasi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Tahun 2023 dan reklasifikasi antar jenis aset dan mutasi pengurangan adalah mutasi dari reklasifikasi antar jenis aset. Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	1.021.147.200,00	0,00	0,00	1.021.147.200,00
2	Sekretariat DPRD	183.946.000,00	0,00	0,00	183.946.000,00
3	Inspektorat	131.522.000,00	0,00	0,00	131.522.000,00
4	Bappeda	476.211.500,00	74.450.000,00	0,00	550.661.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	134.942.000,00	0,00	0,00	134.942.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	264.174.500,00	0,00	0,00	264.174.500,00
7	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.564.551.364,16	0,00	0,00	16.564.551.364,16
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	4.439.202.500,00	149.800.000,00	0,00	4.589.002.500,00
11	Dinas Kesehatan	8.164.884.725,24	0,00	0,00	8.164.884.725,24
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	151.570.000,00	0,00	0,00	151.570.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.168.697.439.778,89	161.554.767.280,00	0,00	2.330.252.207.058,89
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	433.979.725.409,03	80.872.399.200,00	0,00	514.852.124.609,03
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.510.822.990,00	157.930.000,00	0,00	1.668.752.990,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	945.543.500,00	0,00	0,00	945.543.500,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	57.412.000,00	0,00	0,00	57.412.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.505.921.184,00	0,00	0,00	2.505.921.184,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	406.954.000,00	0,00	0,00	406.954.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	74.400.000,00	0,00	0,00	74.400.000,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	223.659.800,00	0,00	0,00	223.659.800,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	1.702.161.280,41	0,00	0,00	1.702.161.280,41
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	13.489.075.787,33	0,00	0,00	13.489.075.787,33
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
26	Dinas Perhubungan	138.944.502.493,48	1.275.182.152,00	0,00	140.219.684.645,48
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	20.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	38.261.933,00	25.000.000,00	0,00	63.261.933,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
30	Kecamatan Rambah	666.971.114,00	125.000.000,00	0,00	791.971.114,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
32	Kecamatan Kepenuhan	900.548.295,00	0,00	0,00	900.548.295,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
34	Kecamatan Tambusai	1.044.415.850,00	0,00	0,00	1.044.415.850,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00		0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	1.132.043.750,00	125.000.000,00	0,00	1.257.043.750,00
40	Kecamatan Rambah Samo	179.769.000,00	0,00	0,00	179.769.000,00
41	Kecamatan Ujungbatu	1.779.386.075,00	59.754.655,00	0,00	1.839.140.730,00
42	Kecamatan Kabun	23.400.000,00	0,00	0,00	23.400.000,00
43	Kecamatan Tandun	23.183.700,00	0,00	0,00	23.183.700,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	1.846.013.800,00	150.000.000,00	0,00	1.996.013.800,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	2.801.847.863.529,54	244.569.283.287,00	0,00	3.046.417.146.816,54

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya	102.741.986.117,81	95.445.502.018,81

Saldo Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp102.741.986.117,81 dan Rp95.445.502.018,81 terjadi kenaikan sebesar Rp7.296.484.099,00 atau 7,64%. Mutasi penambahan aset tetap lainnya dari belanja Tahun 2023 dan reklasifikasi antar jenis aset. Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 per SKPD terdiri dari;

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	4.012.152.469,00	0,00	0,00	4.012.152.469,00
2	Sekretariat DPRD	105.737.400,00	0,00	0,00	105.737.400,00
3	Inspektorat	33.830.000,00	0,00	0,00	33.830.000,00
4	Bappeda	1.278.837.500,00	99.433.800,00	0,00	1.378.271.300,00
5	Badan Kepegawaian,	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
	Pendidikan, Dan Pelatihan				
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
7	Badan Pendapatan Daerah	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	74.301.635,00	0,00	74.301.635,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	73.586.904.447,81	4.125.948.464,00	0,00	77.712.852.911,81
11	Dinas Kesehatan	1.040.505.000,00	0,00	0,00	1.040.505.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	19.940.000,00	0,00	0,00	19.940.000,00
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	7.831.059.500,00	1.842.840.450,00	0,00	9.673.899.950,00
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	431.186.400,00	0,00	0,00	431.186.400,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.995.000,00	94.168.750,00	0,00	96.163.750,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.009.522.242,00	135.442.000,00	0,00	1.144.964.242,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	177.711.200,00	0,00	0,00	177.711.200,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	897.177.000,00	0,00	0,00	897.177.000,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	114.486.440,00	0,00	0,00	114.486.440,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.325.000,00	0,00	0,00	2.325.000,00
26	Dinas Perhubungan	99.550.000,00	25.924.000,00	0,00	125.474.000,00
27	Dinas Perpustakaan Dan	2.816.685.750,00	99.500.000,00	49.500.000,00	2.866.685.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
	Arsip				
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	15.100.000,00	0,00	0,00	15.100.000,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.925.561.670,00	848.425.000,00	0,00	2.773.986.670,00
30	Kecamatan Rambah	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
32	Kecamatan Kepenuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tambusai	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
40	Kecamatan Rambah Samo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41	Kecamatan Ujungbatu	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
42	Kecamatan Kabun	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	95.445.502.018,81	7.345.984.099,00	49.500.000,00	102.741.986.117,81

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	147.708.212.640,44	126.052.652.296,44

Saldo Aset Tetap – Kontruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp147.708.212.640,44 dan Rp126.052.652.296,44 mengalami kenaikan sebesar Rp21.655.560.344,00 atau 17,18%. Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah dari belanja Tahun 2023, dan reklasifikasi antar jenis aset dan untuk mutasi pengurangan adalah reklasifikasi antar jenis aset. Rincian Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut;

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bappeda	49.775.000,00	0,00	0,00	49.775.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga	189.081.500,00	3.980.000,00	0,00	193.061.500,00
11	Dinas Kesehatan	34.929.235.321,00	14.687.166.173,00	0,00	49.616.401.494,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	48.627.224.863,50	2.089.082.171,00	0,00	50.716.307.034,50
14	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	41.124.506.111,94	4.549.296.000,00	0,00	45.673.802.111,94
15	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	740.146.500,00	394.605.000,00	0,00	1.134.751.500,00
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	0,00			
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Perhubungan	137.942.000,00	29.931.000,00	0,00	167.873.000,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	98.500.000,00	0,00	98.500.000,00	0,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	148.791.000,00	0,00	0,00	148.791.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Rambah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Rambah Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Kepenuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tambusai	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Bangun Purba	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Bonai Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Pendalian IV Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Rokan IV Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Rambah Samo	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Ujungbatu	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Kabun	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Tandun	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Kunto Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Pagaran Tapah	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	126.052.652.296,44	21.754.060.344,00	98.500.000,00	147.708.212.640,44

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.744.827.599.400,62)	(2.566.278.971.581,83)

Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp2.744.827.599.400,62) dan (Rp2.566.278.971.581,83). Adapun rincian nilai akumulasi penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	SKPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	84.693.682.635,42	77.222.493.293,54
2	Sekretariat DPRD	10.853.449.957,37	10.280.937.713,13
3	Inspektorat	5.288.104.291,97	5.118.988.293,55
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.957.023.671,23	5.504.318.812,20
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	5.256.496.083,73	4.927.719.835,50
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.307.532.671,41	6.933.677.531,70
7	Badan Pendapatan Daerah	5.268.663.319,55	5.056.722.423,47
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	873.140.387,63	828.373.253,72
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.055.425.651,82	11.413.126.267,16
10	Dinas Pendidikan	290.598.222.583,72	254.740.513.448,76
11	Dinas Kesehatan	206.177.052.030,43	186.941.972.206,43
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	10.985.352.244,64	10.572.849.580,02
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.574.909.546.659,33	1.468.459.911.861,93



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	303.380.023.403,00	315.692.124.237,42
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	12.059.201.682,91	11.599.997.586,04
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	8.753.618.085,93	8.532.649.144,73
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4.562.104.065,26	4.347.150.866,68
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	2.379.461.853,49	2.299.756.641,83
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	7.368.974.136,63	6.431.766.486,04
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.726.468.731,58	5.570.599.435,05
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	2.649.444.108,25	2.451.597.871,82
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.133.329.140,09	3.766.281.733,17
23	Dinas Lingkungan Hidup	16.808.101.389,14	16.815.540.685,86
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	7.782.096.162,68	7.379.145.805,27
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.026.501.751,25	5.721.988.223,14
26	Dinas Perhubungan	78.063.556.842,31	71.572.719.010,95
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	3.537.082.832,28	2.543.481.588,75
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.554.373.268,11	4.190.340.918,17
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	8.461.794.749,94	6.160.213.617,59
30	Kec.Rambah	1.229.791.047,54	1.133.829.872,89
31	Kec.Rambah Hiir	585.562.666,65	570.730.166,67
32	Kec.Kepenuhan	1.512.365.739,85	1.390.096.201,08
33	Kec.Kepenuhan Hulu	1.088.830.515,10	1.060.088.849,10
34	Kec.Tambusai	1.460.139.481,26	1.269.308.351,23
35	Kec.Tambusai Utara	1.120.296.049,04	1.105.161.480,58
36	Kec.Bangun Purba	739.662.003,70	719.979.217,79
37	Kec.Bonai Darussalam	838.806.218,97	808.657.283,74
38	Kec.Pendalian IV Koto	1.041.843.804,68	1.015.709.914,98
39	Kec.Rokan IV Koto	2.018.095.242,23	1.841.464.476,79
40	Kec.Rambah Samo	792.180.050,65	756.932.390,16
41	Kec.Ujung Batu	2.260.036.965,49	2.055.557.005,76
42	Kec.Kabun	1.064.477.952,34	1.054.776.080,30
43	Kec.Tandun	1.653.961.095,16	1.565.973.039,50
44	Kec.Kunto Darussalam	1.797.716.566,41	1.568.860.019,16
45	Kec.Pagaran Tapah	689.078.621,16	675.605.072,67
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	26.464.931.189,29	24.609.283.785,81
	Jumlah	2.744.827.599.400,62	2.566.278.971.581,83

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.4 Aset Lainnya	89.999.747.726,15	105.291.293.644,83

Saldo Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.89.999.747.726,15 dan Rp105.291.293.644,83 terjadi penurunan sebesar Rp15.291.545.918,68 atau 15,64%,



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

dengan rincian sebagai berikut;

Aset Lainnya	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
Kemitraan dengan pihak Ketiga	0,00	48.841.337.376,57
Aset Tak Berwujud	6.247.031.826,23	4.615.061.926,23
Aset Lain-Lain	31.911.073.694,92	14.036.277.143,44
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
(Amortisasi)	(4.246.451.795,00)	(3.672.107.030,41)
Dana Transfer Deposit Facility (TDF)	56.088.094.000,00	41.470.724.229,00
JUMLAH	89.999.747.726,15	105.291.293.644,83

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.4.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	48.841.337.376,57

Saldo kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp48.841.337.376,57 dan sebesar Rp50.028.830.519,20 terdiri atas tanah dan Gedung Pasar Modern yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya. Pengelolaan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pengelolaan pasar Modern, Tradisional Pasir Pengaraian. Kemitraan dengan pihak ketiga disajikan sebesar nilai buku dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Jumlah (Rp)
1.	Tanah pada pasar Modern	6.860.974.939,00	0,00	6.860.974.939,00	0,00
2.	Gedung Pasar Modern	41.980.362.437,57	0,00	41.980.362.437,57	0,00
	Jumlah	48.841.337.376,57	0,00	48.841.337.376,57	0,00

Mutasi Pengurangan Kemitraan Pihak Ketiga karena di reklasifikasi ke Aset Properti Investasi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.4.2 Aset Tidak Berwujud	6.247.031.826,23	4.615.061.926,23

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.247.031.826,23 dan Rp4.615.061.926,23 terjadi Kenaikan sebesar Rp1.631.969.900,00 atau 35,36%. Rincian atas aset tidak berwujud Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	131.066.434,23	429.900.834,23	Aplikasi Sistem Mangement Data Base Pelanggan BPAB 1.0
2	Badan Perencanaan.Pembangunan Daerah	764.660.100,00	1.299.095.100	1. perangkat lunak sistem operasi. 2. pembagi signal wifi 3. pengadaan peralatan jaringan 4. sistem aplikasin e-



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
				moniv 5. pengadaan jaringan komputer /server lengkap 6. Aplikasi e - bangkit 7. Aplikasi - e strong
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.460.600,00	52.460.600,00	1. Antivirus Server 2. APLIKASI SIPADU
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.714.000,00	17.714.000,00	SOFTWARE APLIKASI BKKBN
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.000.000,00	74.834.000,00	Sistem Informasi Pariwisata
6	Sekretariat Daerah	765.708.500,00	892.208.500,00	1. Software Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa Kab.Rokan Hulu 2. Aplikasi E-MTQ 3. Aplikasi Sistem Informasi Geospasial Batas Daerah 4. Aplikasi Monev Pengadaan Barang dan jasa 5. Perangkat Pendukung SPSE 1 Set 6. 6. Software/Aplikasi Sistem Pengelolaan Administrasi Kontrak (SIPAK) 7. DVD Aplikasi DAK Versi 1.0 8. Updating standart aplikasi 9. 9. E-doc (Sistem Aplikasi Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rokan Hulu)
7	Badan Kepegawaian.Pendidikan dan Pelatihan	266.772.792,00	266.772.792,00	Aplikasi Kepegawaian
8	Badan Pengelolaan. Keuangan dan Aset	359.480.000,00	473.683.500,00	1. Aplikasi Stukda 2. Windows server
9	Inspektorat	260.610.000,00	260.610.000,00	1. Aplikasi komputer 2. Anti Virus
10	Dinas Penanaman Modal Dan	109.375.000,00	208.054.000,00	1. Aplikasi perizinan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	79.700.000,00	79.700.000,00	SISKUEDES
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip	29.975.000,00	29.975.000,00	1.Aplikasi Surat 2.Aplikasi Kearsipan
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	371.694.000,00	568.044.000,00	1.Aplikasi Rohul Smart Access (ROSA) Diskominfo Rohul 2.Aplikasi covid 3.Aplikasi Pelikat 4.Aplikasi Dashboard Corona 5.APLIKASI SILADA 6.Website Badan Publik 7.Microsoft Office 365 Personal Original 8.Windows 10 Pro or 11 pro License Publik
14	Badan Pendapatan Daerah	1.260.131.500,00	1.374.920.500,00	1.Oracle 2.Aplikasi Simpatda 3.Aplikasi Pbb 4.Aplikasi E-Bphtb 5.Aplikasi Simpada
15	Dinas Perhubungan	125.714.000,00	125.714.000,00	1.Aplikasi Software Sim 2.Aplikasi Software Pemeriksaan Uji Kendaraan 3.Aplikasi Sim PKB
16	Dinas Peternakan dan Perkebunan		29.900.000,00	
17	Sekretariat DPRD		63.445.000,00	
	JUMLAH	4.615.061.926,23	6.247.031.826,23	

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.4.3 Aset Lain-lain	31.911.073.694,92	14.036.277.143,44

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.911.073.694,92 dan Rp14.036.277.143,44. Aset lain-lain disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan atau sebesar nilai buku. Aset lain-lain terdiri dari:

No	Uraian	per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat/Usang	11.505.064.782,38	11.159.496.316,52
2.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	2.531.212.361,06	20.751.577.378,40



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Operasional Pemerintah		
Jumlah	14.036.277.143,44	31.911.073.694,92

Rincian atas aset lain-lain Tahun 2023 dan Tahun 2022 per SKPD adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022(Rp)
1	2	3	4
1	Sekretariat Daerah	780.624.365,00	785.769.248,33
2	Sekretariat DPRD	25.003.718,75	25.902.593,75
3	Inspektorat	0,00	1.953.692,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	62.222.500,00	63.392.500,00
5	Badan Kepegawaian.Pendidian Dan Pelatihan	45.382.966,67	45.692.966,67
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00
7	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	60.321.365,63	62.219.968,13
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95.853.580,84	123.025.334,17
10	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
11	Dinas Kesehatan	22.713,91	23.499,41
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	19.338.000,00	19.338.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.432.663.981,89	1.675.833.315,62
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	493.683.000,00	499.726.333,33
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	0,00	0,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	969.876.968,35	997.091.741,99
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	67.992.100,00	69.788.500,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah.Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	173.208.943,50	178.682.914,83
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	791.232.668,67	810.555.396,67
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	1.198.908,33
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	per 31 Desember 2022(Rp)
	Perikanan		
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	372.757.495,83	383.228.612,50
26	Dinas Perhubungan	8.297.866.725,44	8.523.016.015,39
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0,00	0,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	321.276.040,00	322.026.040,00
30	Kec.Rambah	0,00	0,00
31	Kec.Rambah Hilir	2.000.000,00	2.000.000,00
32	Kec.Kepenuhan	0,00	0,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	0,00	0,00
34	Kec.Tambusai	27.500,00	57.500,00
35	Kec.Tambusai Utara	17.556.744,79	18.322.857,29
36	Kec.Bangun Purba	1027.500,00	2.557.500,00
37	Kec.Bonai Darussalam	0,00	0,00
38	Kec.Pendalian Iv Koto	267.500,00	297.500,00
39	Kec.Rokan Iv Koto	5.652.014,17	6.607.284,17
40	Kec.Rambah Samo	418.750,00	433.750,00
41	Kec.Ujung Batu	0,00	0,00
42	Kec.Kabun	0,00	0,00
43	Kec.Tandun	0,00	0,00
44	Kec.Kunto Darussalam	0,00	1.580.000,00
45	Kec.Pagaran Tapah	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00
	JUMLAH	14.036.277.143,44	14.620.321.972,58

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.3.4.4 Aset Yang Dibatasi Penggunaannya

0,00

0,00

kas yang dibatasi penggunaannya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut;

No	SKPD	per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.3.4.5 Amortisasi

(4.246.451.795,00)

(3.672.107.030,41)

Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp4.246.451.795,00) dan (Rp33.672.107.030,41). Nilai Amortisasi Aset Lainnya sampai dengan Tahun 2023 dan 2022 dengan rincian SKPD sebagai berikut;

NO	SKPD	Amortisasi 2023 (Rp)	Amortisasi 2022 (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(361.859.239,59)	(359.480.000,00)
2	Inspektorat	(260.610.000,00)	(234.935.312,50)
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(17.714.000,00)	(17.714.000,00)
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(266.772.792,00)	(266.772.792,00)
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	(79.700.000,00)	(79.700.000,00)
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(234.937.000,90)	(131.066.434,23)
7	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	0,00	0,00
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	(29.975.000,00)	(29.975.000,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(52.460.600,00)	(52.460.600,00)
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	(111.430.812,50)	(109.375.000,00)
11	Badan Pendapatan Daerah	(1.107.869.468,75)	(991.779.927,08)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(728.287.225,00)	(668.906.412,50)
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	(301.304.291,67)	(232.168.916,67)
14	Sekretariat Daerah	(604.451.718,76)	(448.208.552,09)
15.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(16.559.041,67)	(10.416.666,67)
16.	Dinas Perhubungan	(70.575.916,66)	(39.147.416,67)
17.	Sekretariat DPRD	(1.321.770,83)	0,00
18.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	(622.916,67)	0,00
	TOTAL	(4.246.451.795,00)	(3.672.107.030,41)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.4.6 Dana Transfer Deposit Facility (TDF)	56.088.094.000,00	41.470.724.229,00

Dana *Transfer Deposit Facility* (TDF) adalah Penyaluran Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara non tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF). Saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp56.088.094.000,00 dan Rp41.470.724.229,00. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.5 Properti Investasi	53.224.488.877,11	0,00

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak digunakan dalam kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

pemerintahan, dimanfaatkan masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.224.488.877,11 sedangkan pada per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Properti Investasi Tanah	0,00	7.616.974.939,00	0,00	7.616.974.939,00
2.	Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	0,00	61.050.847.416,93	0,00	61.050.847.416,93
	Jumlah (1+2)	0,00	68.667.822.355,93	0,00	68.667.822.355,93
7.	Akumulasi Penyusutan	0,00	(15.443.333.478,82)	0,00	(15.443.333.478,82)
	Jumlah setelah Akumulasi Penyusutan	0,00	53.224.488.877,11	0,00	53.224.488.877,11

Penambahan Mutasi Properti Investasi adalah reklasifikasi dari Aset Kemitraan dan Pihak ketiga dan Aset tanah maupun gedung yang memenuhi kriteria Properti Investasi, pada SKPD:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.5.1 Properti Investasi Tanah	7.616.974.939,00	0,00

Properti Investasi Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp7.616.974.939,00 dan Rp0,00. Penambahan Properti Investasi yaitu reklasifikasi dari aset Kemitraan Pihak Ketiga berupa Tanah gedung Pasar Modern, dengan rincian:

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	0,00	6.860.974.939,00	0,00	6.860.974.939,00
2	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	756.000.000,00	0,00	756.000.000,00
	JUMLAH	0,00	7.616.974.939,00	0,00	7.616.974.939,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.5.2 Properti Investasi Gedung Dan Bangunan	45.607.513.938,11	0,00

Properti Investasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp45.607.513.938,11 dan Rp0,00. Penambahan Properti Investasi Gedung dan Bangunan yaitu reklasifikasi dari Aset Kemitraan Pihak Ketiga berupa Gedung pasar Modern dan Aset gedung dan reklasifikasi dari Aset Gedung Bangunan, dengan rincian:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	0,00	61.050.847.416,93	0,00	61.050.847.416,93
2	Akumulasi Penyusutan	0,00	(15.443.333.478,82)	0,00	(15.443.333.478,82)
	JUMLAH	0,00	45.607.513.938,11	0,00	45.607.513.938,11

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.6 Kewajiban	14.682.505.218,67	16.845.922.897,16

Saldo Kewajiban yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.682.505.218,67 dan Rp16.845.922.897,16 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut;

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.6.1 Kewajiban Jangka Pendek	14.682.505.218,67	16.845.922.897,16

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp14.682.505.218,67 dan Rp16.845.922.897,16. Kewajiban Jangka Pendek terdiri Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Pendapatan terima dimuka, Utang Beban, Utang jangka pendek lainnya dan Utang Kepada Pihak Ketiga, dengan rincian sebagai berikut;

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.3.6.1.1 Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Ketiga (PFK)	0,00	32.711.848,00

Per 31 Desember 2023 terdapat Utang PFK sebesar Rp0,00 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut;

Saldo PFK pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 adalah :

1. PPh 23	600.000,00
2. PPh 4(2)	3.631.093,00
3. IWP 1%	1.364.350,00
Jumlah	5.595.443,00

Saldo PFK pada Bendahara Pengeluaran SKPD Kantor Camat Pagaran Tapah per 31 Desember 2022 kan adalah :

1. PPh 22	3.001.478,00
2. PPh 23	1.541.260,00
3. PPN	13.392.704,00
4. PFK-Lainnya	9.180.963,00
Jumlah	27.116.405,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.6.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	672.723.988,67	747.278.377,16

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp672.723.988,67 dan Rp747.278.377,16. Pendapatan Diterima Di Muka tersebut adalah dari pajak reklame pada SKPD Badan Pendapatan Daerah.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.6.1.3 Utang Belanja	14.009.781.230,00	7.730.412.672,00

Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp14.009.781.230,00 dan Rp7.730.412.672,00. Utang Belanja adalah Utang dari anggaran Belanja Tahun 2023 yang belum terbayarkan, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	998.260.519,00	0,00	0,00	998.260.519,00
7	Badan Pendapatan Daerah	844.641.385,00	1.058.096.620,00	844.641.385,00	1.058.096.620,00
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Kesehatan	5.825.497.768,00	11.378.046.365,00	5.312.133.042,00	11.891.411.091,00
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	22.693.000,00	0,00	0,00	22.693.000,00
15	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kec.Rambah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kec.Rambah Hiir	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kec.Kepenuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kec.Kepenuhan Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kec.Tambusai	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kec.Tambusai Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kec.Bangun Purba	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kec.Bonai Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kec.Pendalian IV Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kec.Rokan IV Koto	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kec.Rambah Samo	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kec.Ujung Batu	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kec.Kabun	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kec.Tandun	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kec.Kunto Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kec.Pagaran Tapah Darussalam	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah	39.320.000,00	0,00	0,00	39.320.000,00
	JUMLAH	7.730.412.672,00	12.436.142.985,00	6.156.774.427,00	14.009.781.230,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.6.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	8.335.520.000,00

Utang Jangka Pendek Lainnya pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp8.335.520.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	SKPKD	8.335.520.000,00	0,00	8.335.520.000,00	0,00
	JUMLAH	8.335.520.000,00	0,00	8.335.520.000,00	0,00

Mutasi Pengurangan Utang pada SKPKD adalah Pembayaran atas Utang atas Utang atas Kelebihan Pembayaran BPHTB Tahun 2019 pada PT. Subur Arum Makmur (SAM) sebesar Rp8.335.520.000,00 (Rp16.335.520.000,00 - Rp8.000.000,00)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.6.1.5 Utang kepada pihak ketiga	0,00	0,00
Utang kepada pihak ketiga pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.;		
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.6..2 Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Saldo Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.		
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.7 Ekuitas	3.640.614.418.673,13	3.365.867.495.916,12

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.640.614.418.673,13 dan Rp3.365.867.495.916,12.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2023. LO tahun 2023 disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya karena laporan keuangan Tahun 2022 sudah berbasis akrual yang sudah menyajikan LO.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1	Pendapatan-LO	1.926.863.595.788,07	1.639.462.712.589,92

Pendapatan-LO Kabupaten Rokan Hulu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.926.863.595.788,07 dan Tahun 2022 sebesar Rp1.639.462.712.589,92 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Operasional		Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
5.4.1	PENDAPATAN – LO	1.926.863.595.788,07	1.639.462.712.589,92
5.4.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	186.388.432.761,71	109.953.461.404,64
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	69.386.924.268,41	45.803.800.059,69
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	9.124.689.042,00	8.614.077.293,00
5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan –LO	35.748.087.811,00	3.768.214.681,00
5.4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah -LO	72.128.731.640,30	51.767.369.370,95
5.4.1.2	PENDAPATAN TRANSFER – LO	1.701.597.423.801,00	1.421.093.453.780,00
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO / Dana Perimbangan	1.347.298.896.181,00	1.105.486.794.518,00
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	153.364.327.500,00	163.317.241.000,00
5.4.1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	144.953.039.852,00	130.736.543.262,00
5.4.1.2.4	Bantuan Keuangan - LO /Pendapatan Bantuan Pajak	55.981.160.268,00	21.552.875.000,00
5.4.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -LO	38.877.739.225,36	108.415.797.405,28
5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah – LO	38.753.164.562,36	108.415.797.405,28
5.4.1.3.2	Dana Darurat – LO	0,00	0,00
5.4.1.3.3	Pendapatan Lainnya – LO	124.574.663,00	0,00
5.4.1.3.4	JUMLAH	1.926.863.595.788,07	1.639.462.712.589,92

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah -LO	186.388.432.761,71	109.953.461.404,64

Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Rokan Hulu adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp186.388.432.761,71 dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	69.386.924.268,41	45.803.800.059,69

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp69.386.924.268,41 dan Rp45.803.800.059,69 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Pendapatan	Saldo 2023(Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	724.463.257,00	623.473.337,00
2	Pajak Restoran	3.840.577.194,92	3.679.352.743,52
3	Pajak Hiburan	137.306.400,00	113.918.963,00
4	Pajak Reklame	1.846.129.056,49	1.632.864.261,67
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.374.263.447,00	17.488.528.399,00
6	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	3.647.817.578,00	3.067.005.880,50
7	Pajak Parkir	651.380.154,00	519.258.256,00
8	Pajak Air Tanah	188.623.286,00	167.502.747,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	85.410.500,00	92.623.000,00
10	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	1.007.202.651,00	577.293.776,00
11	Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	13.436.870.097,00	11.617.520.880,00
12	BPHTB Pemindahan Hak	3.880.780.025,00	3.170.307.508,00
13	BPHTB Pemberian Hak Baru	19.566.100.622,00	3.054.150.308,00
	JUMLAH	69.386.924.268,41	45.803.800.059,69

Pendapatan Pajak Daerah-LO Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp69.386.924.268,41 merupakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D), Surat Tagihan Pajak Daerah (STP-D) maupun dokumen sejenis yang dikeluarkan sebagai bentuk penagihan kepada wajib pajak selama periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	9.124.689.042,00	8.614.077.293,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2023 dan 2022 masing - masing sebesar Rp9.124.689.042,00 dan Rp8.614.077.293,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	538.337.000,00	517.250.000,00
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	360.342.000,00	307.160.000,00
4	Retribusi Los-LO	0,00	60.800.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	523.205.000,00	516.742.500,00
6	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	49.078.000,00	55.247.000,00
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	6.200.000,00	12.750.000,00
8	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	992.970.000,00	1.132.170.000,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	657.247.000,00	578.712.000,00
10	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	0,00	25.755.000,00
11	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	585.388.000,00	613.396.500,00
12	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	159.715.000,00	123.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Pendapatan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
13	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	12.040.000,00	478.050.000,00
14	Retribusi Pemakaian Alat-LO	504.650.000,00	6.300.000,00
15	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO	77.005.000,00	75.472.000,00
16	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	7.530.000,00	7.500.000,00
17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	65.720.000,00	126.930.000,00
18	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	35.950.000,00	30.500.000,00
19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO	3.329.156.000,00	3.131.699.000,00
20	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	1.220.156.042,00	814.143.293,00
Jumlah		9.124.689.042,00	8.614.077.293,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp9.124.689.042,00 merupakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) maupun dokumen sejenis yang digunakan sebagai dasar penagihan atas pembayaran oleh wajib retribusi selama periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO		
	35.748.087.811,00	3.768.214.681,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp35.748.087.811,00 dan Rp3.768.214.681,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO ini berbeda dengan Laporan hasil kekayaan yang dipisahkan di LRA. Pada Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebesar Rp2.398.005.508,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Deviden dari PT.Bank Riau Kepri	1.690.162.237,00
2.	Penerimaan Devide dari Perumda BPR	707.843.271,00
	Jumlah	2.398.005.508,00

Sedangkan Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp35.748.087.811,00 adalah:

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Deviden dari PT.Bank Riau Kepri	1.690.162.237,00
2.	Laba pada Laporan Keuangan Perumda Rokan Hulu Jaya TA 2023	33.087.440.218,00
3.	Laba pada Laporan Keuangan Perumda BPR Rokan Hulu Jaya TA 2023	970.485.356,00
	Jumlah	35.748.087.811,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah-LO		
	72.128.731.640,30	51.767.369.370,95

Lain-lain PAD Yang Sah-LO pada Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2023 dan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

2022 masing-masing sebesar Rp72.128.731.640,30 dan Rp51.767.369.370,95. Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan yang bersifat tanpa penetapan, kecuali pendapatan RSUD. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Lain-lain PAD Yang Sah - LO	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	24.044.925,00	135.747.726,00
2	Hasil Sewa BMD-LO	0,00	0,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.936.572.403,83	2.381.631.325,07
4	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	0,00	940.148,00
5	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	177.549.059,00	470.637.606,00
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	0,00
7	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	281.849.316,00	549.391.535,00
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	2.000.458.716,00	9.541.167,00
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	3.632.449.590,93	2.354.823.692,99
10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	614.225.539,36
11	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	2.005.413,00	38.000,00
12	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	19.154.469,00	15.432.233,00
13	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO	87.998,00	28.140,00
14	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	9.708.979,00	14.130.674,00
15	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	19.697.945,00	8.173.109,00
16	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	5.058.097,00	2.571.015,00
17	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	22.234,00	8.069,00
18	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO	481.740,00	482.080,00
19	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	31.896.500,00	34.909.000,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	211.695.239,00	191.992.864,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	11.356.000,00	17.342.000,00
22	Pendapatan dari BLUD-LO	63.708.293.015,54	44.895.573.447,53
23	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	56.350.000,00	69.750.000,00
	Jumlah	72.128.731.640,30	51.767.369.370,95

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO	1.701.597.423.801,00	1.421.093.453.780,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Transfer-LO pada Kabupaten Rokan Hulu adalah Pendapatan Transfer untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Pendapatan Transfer-LO pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.701.597.423.801,00 dan Rp1.421.093.453.780,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Transfer-LO terdiri dari:

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO / Dana Perimbangan	1.347.298.896.181,00	1.105.486.794.518,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	153.364.327.500,00	163.317.241.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	144.953.039.852,00	130.736.543.262,00
4	Bantuan Keuangan-LO	55.981.160.268,00	21.552.875.000,00
Jumlah		1.701.597.423.801,00	1.421.093.453.780,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdiri dari:

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak - LO	101.711.521.000,00	87.597.180.127,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	278.669.095.000,00	155.868.265.229,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	678.915.439.397,00	642.058.489.477,00
4	DAK Fisik -LO	58.208.064.851,00	108.221.256.591,00
6	DAK Non Fisik -LO	229.794.775.933,00	111.741.603.094,00
JUMLAH		1.347.298.896.181,00	1.105.486.794.518,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO terdiri dari:

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah - LO	5.256.625.000,00	25.497.828.000,00
2	Dana Desa - LO	139.870.726.000,00	137.819.413.000,00
3	Insentif Fiskal-LO	8.236.976.500,00	0,00
JUMLAH		153.364.327.500,00	163.317.241.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO terdiri dari :

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	35.440.828.963,00	27.012.208.422,00
2	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -LO	26.154.485.085,00	27.741.388.227,00
3	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor -LO	56.301.780.799,00	45.786.481.787,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan -LO	1.413.296.802,00	1.238.121.681,00
5	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok -LO	25.642.648.203,00	28.958.343.145,00
JUMLAH		144.953.039.852,00	130.736.543.262,00

Bantuan Keuangan – LO/ Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

No	Jenis Pendapatan Transfer	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi-LO	0,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	55.981.160.268,00	21.552.875.000,00
JUMLAH		55.981.160.268,00	21.552.875.000,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	38.877.739.225,36	108.415.797.405,28

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp38.877.739.225,36 dan Rp108.415.797.405,28. Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	14.687.166.173,00	5.022.635.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	24.063.498.389,36	10.719.207.509,28
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perseorangan Dalam Negeri	2.500.000,00	183.862.250,00
4	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	92.490.092.646,00
5	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	124.574.663,00	0,00
Jumlah		38.877.739.225,36	108.415.797.405,28

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2 Beban	1.680.794.269.250,79	1.572.341.377.916,80

Jumlah Beban Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.680.794.269.250,79 dan Rp1.572.341.377.916,80 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Beban Operasi	1.424.768.991.868,79	1.335.340.738.053,80
2	Beban Transfer	255.207.270.537,00	237.000.639.863,00
3	Beban Tidak Terduga	818.006.845,00	0,00
Jumlah		1.680.794.269.250,79	1.572.341.377.916,80

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1 Beban Operasi	1.424.768.991.868,79	1.335.340.738.053,80

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.424.768.991.868,79 apabila dibandingkan Beban Operasi pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.335.340.738.053,80. Berikut ini merupakan rincian Beban Operasi



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Tahun Anggaran 2023 dan 2022:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Beban Pegawai	604.058.408.158,00	597.873.581.634,00
2	Beban Persediaan	144.848.486.839,16	130.185.636.116,93
3	Beban Jasa	222.592.675.128,95	190.292.928.626,21
4	Beban Pemeliharaan	22.996.213.336,00	16.656.565.195,20
5	Beban Perjalanan Dinas	60.991.846.008,00	53.208.861.623,20
6	Beban Bunga	0,00	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
8	Beban Hibah/Belanja BOS	148.007.405.956,00	115.012.304.342,44
9	Beban Bantuan Sosial	1.009.100.000,00	1.527.191.375,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	219.338.262.162,52	218.685.626.001,94
11	Beban Penyisihan Piutang	926.594.280,16	7.235.141.474,88
12.	Beban lain-lain	0,00	4.662.901.664,00
	JUMLAH	1.424.768.991.868,79	1.335.340.738.053,80

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.2.1.1 **Beban Pegawai** 604.058.408.158,00 597.873.581.634,00

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp604.058.408.158,00 dan Rp597.873.581.634,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	375.571.671.121,00	369.724.879.629,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	107.163.351.378,00	107.568.930.122,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	95.597.760.333,00	94.392.117.833,00
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	24.279.735.822,00	24.235.007.962,00
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	694.089.504,00	165.206.088,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	751.800.000,00	648.000.000,00
7	Beban Pegawai BOS	0,00	0,00
8	Beban Pegawai BLUD	0,00	1.139.440.000,00
	JUMLAH	604.058.408.158,00	597.873.581.634,00

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.2.1.2 **Beban Persediaan** 144.848.486.839,16 130.185.636.116,93

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp144.848.486.839,16 dan Rp130.185.636.116,93 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.132.200,00	131.378.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.179.152.999,00	1.610.632.638,00
3.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.870.611.235,00	15.932.552.190,00
4.	Beban Bahan-Bahan Baku	6.377.441.895,00	738.925.590,00
5..	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	601.249.950,00	1.204.585.357,00
6.	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.518.400,00	0,00
7.	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	826.107.139,00	1.010.458.598,00
8.	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	405.646.700,00	307.563.696,00
9.	Beban Bahan-Bahan Lainnya	201.192.000,00	188.570.700,00
10.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.569.149.802,00	2.191.557.779,00
11.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.934.476.275,00	1.838.162.400,00
12.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.195.200,00	6.910.432,00
13.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	4.351.000,00
14.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	753.494.000,00	628.847.500,00
15.	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	41.744.000,00	780.014.469,00
16.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.401.036.693,00	6.826.848.222,00
17.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.751.502.348,00	0,00
18.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.644.473.957,20	10.766.341.993,14
19.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	388.112.000,00	350.279.400,00
20.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.260.813.000,00	431.959.280,00
21.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.947.408.870,00	466.942.500,00
22.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.351.817.986,00	1.042.560.973,00
23.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	105.310.000,00	79.546.200,00
24.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	8.864.000,00	0,00
25.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	647.171.500,00	91.130.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
26.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	605.744.200,00	800.102.586,00
27.	Beban Obat-Obatan-Obat	26.162.611.310,96	24.750.974.495,79
28.	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.388.648.443,00	131.959.460,00
29.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	26.618.148.169,00	31.806.648.509,00
30.	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.438.235.063,00	0,00
31.	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.043.235.600,00	155.832.000,00
32.	Beban Natura dan Pakan-Pakan	953.393.960,00	407.116.000,00
33.	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	59.155.250,00	0,00
34.	Beban Makanan dan Minuman Rapat	11.261.579.570,00	8.655.174.840,00
35.	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.530.795.200,00	7.522.974.316,00
36.	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	16.128.000,00	0,00
37.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	4.806.762.945,00	5.393.838.037,00
38.	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	947.870.784,00	719.078.630,00
39.	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	179.729.200,00	242.564.000,00
40.	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	167.000.000,00
41.	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	523.044.000,00	0,00
42.	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	32.370.000,00	0,00
43.	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	35.964.000,00	13.495.576,00
44.	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	580.700.250,00	331.250.000,00
45.	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	651.908.300,00	717.800.000,00
46.	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	87.564.000,00	161.050.000,00
47.	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	46.268.000,00	77.877.000,00
48.	Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	67.500.000,00
49.	Beban Pakaian Teknik	90.000.000,00	0,00
50.	Beban Pakaian Kerja Bengkel	300.000,00	0,00
51.	Beban Pakaian KORPRI	20.214.000,00	0,00
52.	Beban Pakaian Adat Daerah	1.417.514.000,00	977.888.750,00
53.	Beban Pakaian Batik Tradisional	419.951.200,00	188.950.000,00
54.	Beban Pakaian Olahraga	381.505.000,00	221.452.000,00
55.	Beban Pakaian Paskibraka	163.938.245,00	35.370.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
56	Beban Pakaian Jas/Safari	53.280.000,00	0,00
57	Beban Komponen-Komponen Peralatan	12.550.000,00	0,00
	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	16.756.000,00	9.621.000,00
	JUMLAH	144.848.486.839,16	130.185.636.116,93

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1.3 Beban Jasa	222.592.675.128,95	190.292.928.626,21

Jumlah Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp222.592.675.128,95 dan Rp190.292.928.626,21 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Jasa Kantor	190.808.623.312,95	165.072.060.247,21
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	13.875.723.543,00	9.450.074.197,00
3.	Beban Sewa Tanah	0,00	5.100.000,00
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.644.819.920,00	2.746.260.699,00
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.882.492.451,00	4.062.917.248,00
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	145.828.000,00	185.432.470,00
7.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	350.583.780,00	0,00
8.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.536.843.242,00	2.364.068.331,00
9.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	12.711.720,00	11.508.480,00
10.	Beban Jasa Ketersediaan layanan (availability Payment)	0,00	14.998.130,00
11.	Beban Kursus, Peatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.313.749.160,00	6.380.508.824,00
12.	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	21.300.000,00	0,00
	JUMLAH	222.592.675.128,95	190.292.928.626,21

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan	22.996.213.336,00	16.656.565.195,20

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.996.213.336,00 dan Rp16.656.565.195,20 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.908.831.610,00	10.773.665.170,00
2.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.886.109.454,00	1.722.346.326,00
3.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.200.406.272,00	4.115.553.699,20
4.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	866.000,00	45.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	JUMLAH	22.996.213.336,00	16.656.565.195,20

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas	60.991.846.008,00	53.208.861.623,20

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp60.991.846.008,00 dan Rp53.208.861.623,20 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.991.846.008,00	53.208.861.623,20
	JUMLAH	60.991.846.008,00	53.208.861.623,20

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00

Jumlah Beban Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1.7 Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00

Jumlah Beban Beban barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyajian Beban atas Belanja BLUD disajikan menyesuaikan dengan beban masing-masing belanja.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1.8 Beban Hibah/Belanja BOS	148.007.405.956,00	115.012.304.342,44

Jumlah Beban Hibah/Belanja BOS Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp148.007.405.956,00 dan Rp115.012.304.342,44 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	903.147.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.851.886.960,00	5.451.789.500,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.991.251.127,00	6.521.989.000,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.335.284.902,00	9.755.903.000,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	67.525.866.747,00	5.958.477.388,44
6	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.078.235.358,00	0,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.020.000.000,00	3.293.000.000,00
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.742.519.500,00	2.680.000,00
9	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	118.772.000,00	0,00
10	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	64.218.665.752,00
11	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	13.077.519.424,00	12.153.094.652,00
12	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	5.721.649.938,00	5.632.745.050,00
13	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.544.420.000,00	1.120.813.000,00
	JUMLAH	148.007.405.956,00	115.012.304.342,44

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.2.1.9 Beban Bantuan Sosial	1.009.100.000,00	1.527.191.375,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.009.100.000,00 dan Rp1.527.191.375,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.009.100.000,00	911.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	0,00	615.791.375,00
	JUMLAH	1.009.100.000,00	1.527.191.375,00

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.2.1.10 **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

219.338.262.162,52

218.685.626.001,94

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp219.338.262.162,52 dan Tahun 2022 sebesar Rp218.685.626.001,94, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.886.028.269,30	43.030.245.038,97
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.271.785.957,85	33.499.966.433,98
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.822.837.357,29	139.882.057.838,47
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.828.559.740,68	0,00
5.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.954.865.864,47	1.833.686.013,43
6.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	574.184.972,93	439.670.677,09
	Jumlah	219.338.262.162,52	218.685.626.001,94

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.2.1.11 **Beban Penyisihan Piutang**

926.594.280,16

7.235.141.474,88

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 adalah sebesar Rp926.594.280,16 dan Tahun 2022 sebesar Rp7.235.141.474,88, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	143.311.499,49	69.124.865,09
2.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	623.920.912,30	1.052.560.951,20
3.	Badan Pendapatan Daerah	159.361.868,37	6.113.455.658,59
	Jumlah	926.594.280,16	7.235.141.474,88

31 Desember 2023

31 Desember 2022

5.4.2.2 **Beban Transfer**

255.207.270.537,00

237.000.639.863,00

Jumlah Beban Transfer untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp255.207.270.537,00 dan Rp237.000.639.863,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7.205.792.096,00	6.664.212.649,00
2.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Lainnya	0,00	0,00
3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	248.001.478.441,00	223.297.561.214,00
4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	7.038.866.000,00
	JUMLAH	255.207.270.537,00	237.000.639.863,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2023 adalah beban transfer bagi hasil pajak dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ke Pemerintah Desa sebesar Rp7.205.792.096,00 dan Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2023 sebesar Rp248.001.478.441,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.3		
SURPLUS DEFISIT DARI		
KEGIATAN NON	0,00	1.777.109.952,00
OPERASIONAL		

Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.777.109.952,00. Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 merupakan hasil lelang kendaraan pada Tahun 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.3.1		
SURPLUS DEFISIT DARI POS		
LUAR BIASA	(818.006.845,00)	(14.702.215.877,00)

Surplus Defisit Dari Pos Luar biasa Tahun 2023 adalah sebesar (Rp818.006.845,00) dan Tahun 2022 sebesar (Rp14.702.215.877,00). Surplus Defisit dari Pos Luar biasa merupakan Beban Luar Biasa.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.4.5		
SURPLUS/DEFISIT -LO	246.069.326.537,28	54.196.228.748,12

Terjadi Surplus-LO pada periode Tahun 2023 sebesar Rp.246.069.326.537,28 dan Tahun 2022 sebesar Rp54.196.228.748,12.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	386.532.167.179,27	203.077.806.709,01

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam membiayai aktivitas operasionalnya. Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun 2023 Rp386.532.167.179,27 yang berasal dari selisih arus masuk kas sebesar Rp1.845.813.897.701,22 dengan arus keluar kas untuk aktivitas operasi pada tahun berkenaan sebesar Rp1.459.281.730.521,95.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.845.813.897.701,22	1.575.559.999.522,15

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.845.813.897.701,22 dan Rp1.575.559.999.522,15 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
PAD - Pajak Daerah	67.829.112.388,92	45.407.125.436,02
PAD – Retribusi Daerah	8.533.083.042,00	8.208.584.693,00
PAD – Hasil Kekayaan yang dipisahkan	2.398.005.508,00	2.114.662.284,00
PAD – Lain – Lain PAD yang Sah	69.780.328.059,30	50.815.044.358,13
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	365.763.246.229,00	201.994.721.127,00
Dana Alokasi Umum	678.915.439.397,00	642.058.489.477,00
Dana Alokasi Khusus	288.002.840.784,00	219.962.859.685,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	155.121.779.862,00	127.638.303.816,00
Dana Penyesuaian dan Otsus	153.364.327.500,00	163.317.241.000,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah	55.981.160.268,00	21.552.875.000,00
Pendapatan Hibah	124.574.663,00	92.490.092.646,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.845.813.897.701,22	1.575.559.999.522,15

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	1.459.281.730.521,95	1.372.482.192.813,14

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.459.281.730.521,95 dan Rp1.372.482.192.813,14 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	603.842.271.673,00	596.925.726.030,00
Belanja Barang dan Jasa	532.662.237.285,95	461.026.180.627,70
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	57.407.324.181,00	49.448.489.040,44
Belanja Bantuan Sosial	1.009.100.000,00	1.527.191.375,00
Belanja Transfer Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	7.205.792.096,00	6.664.212.649,00
Belanja Bantuan Kepada	248.001.478.441,00	230.336.427.214,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pemerintah Desa		
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	9.153.526.845,00	26.553.965.877,00
JUMLAH	1.459.281.730.521,95	1.372.482.192.813,14

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(356.642.073.590,00)	(242.270.937.138,57)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2023 sebesar (Rp356.642.073.590,00) yang merupakan selisih Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp0,00 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp.356.642.073.590,00 nilai ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Investasi Non Keuangan Tahun 2022 sebesar (Rp242.270.937.138,57) yang merupakan selisih Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp1.777.109.952,00 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Non Keuangan pada tahun 2022 sebesar (Rp244.048.047.090,57).

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	0,00	1.777.109.952,00

Arus kas masuk aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.777.109.952,00;

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	0,00	1.777.109.952,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	1.777.109.952,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	356.642.073.590,00	244.048.047.090,57

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp356.642.073.590,00 dan Rp244.048.047.090,57. Arus kas ini mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun berjalan yang berasal dari arus kas keluar dari Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Tanah	0,00	149.670.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	50.670.206.258,00	66.006.237.949,50
Belanja Gedung dan Bangunan	64.342.140.106,00	89.832.903.897,07
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.512.051.262,00	85.881.648.940,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.038.713.964,00	2.177.586.304,00
Belanja Aset Lainnya	78.962.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tahun Anggaran 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Jumlah Arus Kas Keluar	356.642.073.590,00	244.048.047.090,57

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(999.000.000,00)	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp999.000.000,00) dan Rp0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan	1.000.000,00	0,00

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	32.144.250,00	(2.808.458.195,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris pada Tahun 2023 sebesar Rp32.144.250,00 merupakan selisih arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp104.406.366.752,00 dengan Arus Kas Keluar untuk Aktivitas transitoris pada Tahun 2023 sebesar Rp 104.374.222.502,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris pada Tahun 2022 sebesar (Rp2.808.458.195,00) merupakan selisih arus kas masuk yang berasal dari Aktivitas transitoris Tahun 2022 sebesar Rp78.806.489.862,37 dengan Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Transitoris pada Tahun 2022 sebesar Rp81.614.948.057,37.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.4.1 Arus Kas masuk dari Aktivitas Transitoris	104.406.366.752,00	78.806.489.862,37

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp104.406.366.752,00 dan Rp78.806.489.862,37 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	104.367.667.502,00	78.806.290.662,37
Penerimaan Sisa UP Tahun lalu dari Bend.SKPD	38.699.250,00	199.200,00
Penerimaan Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Penerimaan Dana Talangan BPJS Pada RSUD BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus kas masuk	104.406.366.752,00	78.806.489.862,37

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	104.389.904.433,00	81.614.948.057,37

Arus Kas Keluar dari Aktivitas transitoris Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp104.389.904.433,00 dan Rp81.614.948.057,37 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	104.367.667.502,00	78.810.521.755,37
Sisa UP Tahun Berjalan yang masih pada Bendahara SKPD	15.681.931,00	38.699.250,00
Pengeluaran Lainnya (Koreksi Saldo Awal Dana BOS)	0,00	0,00
Pengeluaran Pembayaran Dana Talangan BPJS Pada RSUD BLUD	0,00	0,00
Pengeluaran Lainnya (Koreksi Silpa Tahun Lalu)	6.555.000,00	2.765.727.052,00
Jumlah Arus Kas Keluar	104.389.904.433,00	81.614.948.057,37

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.5 Kenaikan / Penurunan Bersih Kas Periode Berjalan	28.923.237.839,27	(42.001.588.624,56)

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp28.923.237.839,27 dan (Rp42.001.588.624,56) dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	386.532.167.179,27	203.077.806.709,01
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(356.642.073.590,00)	(242.270.937.138,57)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	32.144.250,00	(2.808.458.195,00)
Jumlah	28.923.237.839,27	(42.001.588.624,56)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.6 Saldo Awal Kas BUD, BLUD Dan BOS	44.401.372.691,81	86.402.961.316,37

Saldo awal Kas BUD, BOS, BLUD tahun 2023 sebesar Rp44.401.372.691,81 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	39.983.288.029,90	71.811.647.535,78
Kas di BLUD	3.702.323.043,91	10.648.781.116,59
Kas Dana BOS	715.761.618,00	3.942.532.664,00
Jumlah	44.401.372.691,81	86.402.961.316,37

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD Dan BOS	67.915.007.864,08	44.401.372.691,81

Saldo Akhir Kas BUD Tahun 2023 sebesar Rp44.401.372.691,81 merupakan arus kas bersih selama periode Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas di Kas Daerah	61.557.090.232,58	39.983.288.029,90
Kas di Bendahara BLUD	5.964.213.809,50	3.702.323.043,91
Kas di bendahara BOS	393.703.822,00	715.761.618,00
Jumlah	67.915.007.864,08	44.401.372.691,81

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.8 Kas di Bendahara Pengeluaran	15.681.931,00	38.699.250,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 sebesar Rp15.681.931,00 adalah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Daerah Per 31 Desember 2023, yang terdiri dari:

1. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp4.956,00;
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.000.000,00;
3. Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp710.886,00;
4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp1.450.000,00;
5. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar Rp342.093,00 dan,
6. Kecamatan Ujung Batu sebesar Rp10.174.050,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.9 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 Rp0,00

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.10 Kas Lainnya	5.393.920.736,00	32.711.848,00

Saldo Akhir Kas Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp5.393.920.736,00 dan Tahun 2022 Rp32.711.848,00. Kas Lainnya Tahun 2023 merupakan saldo Kas BOP Puskesmas sedangkan saldo kas lainnya 2023 merupakan Saldo Utang PFK atas Pajak yang belum di setor sampai dengan 31 Desember 2022

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.11 Saldo Akhir	73.324.610.531,08	44.472.783.789,81



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp73.324.610.531,08 dan Rp44.472.783.789,81 terdiri dari Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan ditambah dengan kas BLUD dan Dana BOS dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	61.557.090.232,58	39.983.288.029,90
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.681.931,00	38.699.250,00
Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	5964.213.809,50	3.702.323.043,91
Kas di Bendahara BOS	393.703.822,00	715.761.618,00
Kas Lainnya	5.393.920.736,00	32.711.848,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	73.324.610.531,08	44.472.783.789,81



5.6 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.6.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp3.365.867.495.916,12 merupakan saldo Ekuitas akhir per 31 Desember 2022.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp246.069.326.537,28.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Sebesar Rp28.677.596.219,73

Dampak Kumulatif dan Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut;

5.6.3.1 Koreksi Nilai Persediaan tahun 2023 sebesar Rp67.300.000,00 merupakan koreksi pada Dinas Perhubungan atas Kartu Uji PKB (*Smart Card*) yang merupakan saldo tahun 2022 yang tidak tercatat dan masih bersaldo di 31 Desember 2023.

5.6.3.2 Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar (Rp.0,00) dan (Rp5.912.626.266,68).

5.6.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap tahun 2023 sebesar (Rp2.767.294.203,82) dan tahun 2022 sebesar (Rp.1.067.973.700,00) dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Koreksi Nilai Aset Tetap (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	(100.101.000,00)
2.	Inspektorat	(10.890.000,00)
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	(35.888.800,00)
4.	Badan Pendapatan Daerah	0,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
6.	Dinas Pendidikan	(218.785.042,00)
7.	Dinas Kesehatan	(158.122.000,00)
8.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(19.145.000,00)
9.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(170.711.946,82)
10.	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	(214.570.025,00)
11.	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	53.468.650,00
12.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	(456.228.400,00)
13.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(19.391.183,00)
14.	Dinas Lingkungan Hidup	(73.650.491,00)
15.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	(45.848.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Koreksi Nilai Aset Tetap (Rp)
16.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	0,00
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	(10.000.000,00)
18.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00
19.	Kec.Rokan IV Koto	(18.449.982,00)
20.	Kec.Kunto Darussalam	(51.919.600,00)
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	(9.800.000,00)
22.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(337.986.000,00)
23.	SKPKD	0,00
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00
25.	Dinas Perhubungan	(249.313.755,00)
26.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	(9.980.000,00)
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(61.350.000,00)
28.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(352.254.763,00)
29.	Sekretariat Daerah	(260.732.200,00)
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(30.025.266,00)
31.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(50.270.000,00)
32.	Kecamatan Tambusai	(14.580.000,00)
33.	Kecamatan Kepenuhan	332.642.600,00
34.	Kecamatan Ujung Batu	(9.600.000,00)
35.	Kecamatan Rambah Samo	0,00
36.	Kecamatan Rambah Hilir	(28.000.000,00)
37.	Kecamatan Bangun Purba	0,00
38.	Kecamatan Tambusai Utara	(69.479.000,00)
39.	Kecamatan Bonai Darussalam	(25.333.000,00)
40.	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	(14.000.000,00)
41.	Kecamatan Kepenuhan Hulu	(10.000.000,00)
42.	Kecamatan Pendalian IV Koto	0,00
43.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00
44.	Kecamatan Tandun	0,00
45.	Kecamatan Kabun	(17.000.000,00)
	JUMLAH	(2.767.294.203,82)

Koreksi Nilai Aset Tetap pada SKPD adalah koreksi atas saldo awal Aset yang diantaranya dikarenakan direklas ke aset lainnya (rusak berat) dan reklas ke Aset Extracomtable, karena tidak memenuhi batasan kapitalisasi

5.6.3.4 Koreksi Nilai Piutang Tahun 2023 adalah sebesar (Rp102.348.099,18) adalah Koreksi tambah Piutang pada RSUD BLUD Sebesar Rp102.348.100,00 koreksi Piutang Jaminan Persalinan dan BPJS Ketenagakerjaan.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

- 5.6.3.5 Koreksi Nilai Utang Tahun 2023 adalah sebesar Rp87.621.583,00 adalah Koreksi Kurang nilai Utang Beban Belanja Insentif Retribusi pada Bapenda sebesar Rp109.891.385,00, Koreksi kurang Utang pada Dinas Kesehatan Rp84.940.333,00 dan Koreksi Tambah Utang Beban Belanja Insentif Retribusi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp8.750.000,00), Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar (Rp10.875.000,00), Dinas Perhubungan sebesar (Rp4.895.135,00), Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar (Rp45.000.000,00), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar (Rp1.690.000,00), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp36.000.000,00).
- 5.6.3.6 Koreksi Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran/BOS di tahun 2023 sebesar (Rp6.555.000,00) adalah Koreksi Saldo BOS yang merupakan saldo Kas pada Sekolah Swasta
- 5.6.3.7 Koreksi Nilai aset lainnya Tahun 2023 sebesar (Rp.0,00)
- 5.6.3.8 Koreksi nilai Kas di Kas Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00
- 5.6.3.9 Koreksi nilai penyertaan Modal tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.
- 5.6.3.10 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp32.965.159.619,66 adalah koreksi terhadap perhitungan Penyusutan Aset Tetap tahun sebelumnya dengan masa manfaat yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Niai Koreksi Penyusutan Aset Tetap (Rp)
1.	Sekretariat DPRD	3.806.403,40
2.	Inspektorat	(6.645.595,78)
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.637.060,32
4.	Badan Pendapatan Daerah	(9.127.433,34)
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.988.958,28)
6.	Dinas Pendidikan	(3.588.795.955,82)
7.	Dinas Kesehatan	(270.767.839,06)
8.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(36.714.788,33)
9.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	43.381.289.131,40
10.	Dinas Tanaman Dan Holtikultura	59.586.757,23
11.	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	21.188.799,97
12.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	12.573.718,82
13.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(868.984,59)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No.	SKPD	Niai Koreksi Penyusutan Aset Tetap (Rp)
14.	Dinas Lingkungan Hidup	1.149.518.299,50
15.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	(2.628.545,63)
16.	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	(569.383.249,96)
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.917.885,66
18.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(1.516.222.066,63)
19.	Kecamatan Rokan IV Koto	4.911.744,60
20.	Kecamatan Kunto Darussalam	19.038.380,73
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	(816.192,60)
22.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42.508.943,25
23.	SKPKD	0,09
24.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.493.712,48
25.	Dinas Perhubungan	(1.469.990.738,05)
26.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.813.033,31
27.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.027.104,08
28.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(547.697.740,05)
29.	Sekretariat Daerah	(3.793.220.541,38)
30.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.385.903,27
31.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(14.826.816,61)
32.	Kecamatan Tambusai	1.177.251,36
33.	Kecamatan Kepenuhan	18.186.042,75
34.	Kecamatan Ujung Batu	1.200.000,04
35.	Kecamatan Rambah Samo	(0,01)
36.	Kecamatan Rambah Hilir	3.966.666,68
37.	Kecamatan Bangun Purba	(3.447.570,51)
38.	Kecamatan Tambusai Utara	14.321.178,34
39.	Kecamatan Bonai Darussalam	5.356.088,93
40.	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam	3.663.333,34
41.	Kecamatan Kepenuhan Hulu	12.994.266,58
42.	Kecamatan Pendalian IV Koto	(0,01)
43.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(0,04)
44.	Kecamatan Tandun	(0,02)
45.	Kecamatan Kabun	(1.793.125,01)
46.	Kecamatan Rambah	534.055,24
	JUMLAH	32.965.159.619,66

5.6.3.11 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp2.255.539.666,71) adalah koreksi terhadap perhitungan Penyusutan Aset Lainnya tahun sebelumnya Menyesuaikan dengan masa manfaat yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

ca



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

No	SKPD	Nilai Koreksi (Rp)
1..	Sekretariat Daerah	(36.405.000,00)
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	369.444,43
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(440.606.000)
4.	Kec.Rambah Samo	(181.250,00)
5.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	(109.096.047,62)
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	(23.140.000,04)
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(875.000)
8.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(120.393.500)
9.	Dinas Perhubungan	(2.066.458,25)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	(159.791,67)
11	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(319.463.540,00)
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.192.522.523,56)
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(11.000.000,00)
	JUMLAH	(2.255.539.666,71)

5.6.3.12 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp484.555.788,42 adalah Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp483.555.038,42 dan Penyisihan Piutang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp1.000.000,00.



BAB VI

INFORMASI PENTING LAINNYA

1. BASIS AKRUAL

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 adalah Basis AkruaI sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan basis kas, dengan demikian Laporan Realisasi Anggaran juga disusun berdasarkan basis kas.

3. PERUBAHAN PENJABARAN APBD

APBD TA 2023 Kabupaten Rokan Hulu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 tanggal 22 Desember 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD TA 2023 dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanggal 2 Januari 2023 dengan nilai Rp.1.685.187.049.868. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada Tahun 2023 maka dilaksanakan beberapa kali pergeseran APBD TA 2023, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Perubahan I Penjabaran APBD TA 2023 dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 tanggal 24 Januari 2023 dengan DPPA tanggal 30 Januari 2023 dengan nilai Total APBD Rp1.744.245.049.868. Perubahan ini dilaksanakan dalam rangka untuk penguangan Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1/1/2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- b. Perubahan II Penjabaran APBD TA 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2023 tanggal 12 April 2023 dan DPPA tanggal 17 April 2023 dengan nilai Rp1.743.983.444.013,00 Perubahan ini disusun untuk penyesuaian Belanja DAK dan Belanja DID Tahun berjalan.
- c. Perubahan III Penjabaran APBD TA 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 tanggal 7 Juli 2023 dengan DPPA tanggal 14 Juli 2023 dengan Nilai APBD Rp1.743.983.444.013,00. Perubahan ini terkait Penyesuaian Nama Penerima Rumah Layak Huni yang bersumber dari Bankeu Provinsi berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : Kpts.100.3.3.2/PERKIM/475/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Keuangan Khusus Rumah Layak Huni



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2023

Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023, dan Penyesuaian Gaji ASN).

4. PERUBAHAN PENJABARAN APBD PERUBAHAN

Perubahan APBD TA 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 tanggal 1 November 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 tanggal 1 November 2023 dengan DPPA tanggal 3 November 2023 dengan nilai APBD Rp1.928.061.230.967. APBD Perubahan TA 2023 juga mengalami perubahan penjabaran sebanyak 1 kali yaitu :

Perubahan I Penjabaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 tanggal 15 Desember 2023, DPPA tanggal 19 Desember 2023 dengan nilai Rp1.925.679.380.635,00. Perubahan ini menindaklanuti Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.7559/XI/2023 tentang Perubahan Atas keputusan Gubernur Nomor Kpts.7476//2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1/1/2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023.

5. PENANGANAN DAMPAK INFLASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 /PMK.07/2022 tanggal 5 September 2022 Tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023 yang telah dianggarkan pada APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun Anggaran 2023.

6. PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu per 31 Desember 2023 dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023 disusun dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (PABU) dengan basis/dasar akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

BUPATI ROKAN HULU,

H. SUKIMAN